



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/236/KEP/15/2024

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024-2028

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Kabupaten Magelang yang terpadu, perlu Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Perubahan Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Arsitektur Proses Bisnis;
- b. Bab II Arsitektur Layanan;
- c. Bab III Arsitektur Aplikasi;
- d. Bab IV Arsitektur Data dan Informasi;
- e. Bab V Arsitektur Infrastruktur; dan
- f. Bab VI Arsitektur Keamanan.

- KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/236/KEP/15/2024
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024-2028

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024-2028

BAB I
ARSITEKTUR PROSES BISNIS

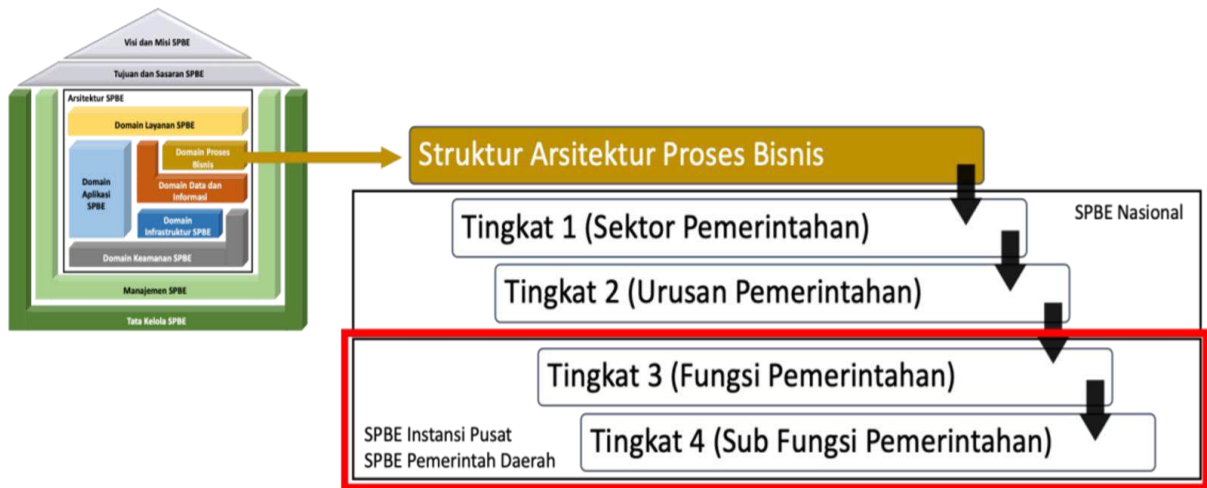
A. Struktur dan Referensi Arsitektur Proses Bisnis

1. Prinsip Arsitektur Proses Bisnis

Prinsip-prinsip proses bisnis dalam *framework enterprise* Arsitektur Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. bersifat konsisten dan komprehensif;
2. bersifat adaptif mengikuti kebutuhan *stakeholder* dan perubahan regulasi; dan
3. dilakukan secara berkesinambungan.

Arsitektur proses bisnis Kabupaten Magelang menggambarkan proses bisnis dan tugas utama dari Kabupaten Magelang dengan acuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Arsitektur proses bisnis juga disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 1.1. Struktur Arsitektur Proses Bisnis

Penyusunan arsitektur proses bisnis ini mengacu pada proses bisnis di tingkat nasional dengan tujuan untuk membentuk layanan SPBE. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, arsitektur proses bisnis berfokus pada Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) dan Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan). Fungsi Pemerintahan menjelaskan lebih rinci arsitektur proses bisnis Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan) dengan tetap mengacu pada arsitektur Tingkat 1 dan Tingkat 2. Arsitektur proses bisnis Tingkat 3 disusun untuk mengatur fungsi

pemerintahan dan dijelaskan lebih rinci pada arsitektur proses bisnis Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan).

Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

2. Referensi Proses Bisnis Tingkat Nasional

Domain proses bisnis juga mengacu pada referensi proses bisnis (RB) tingkat nasional, khususnya pada kode referensi Pemerintahan Umum (09) seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Referensi Proses Bisnis (RB) Tingkat Nasional Pemerintahan Umum (09)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri termasuk di dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pengawalan program prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara termasuk di dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, manajemen perekonomian, pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pajak.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pelayanan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi termasuk di dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos, serta penyelenggaraan pos.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis program/kebijakan.

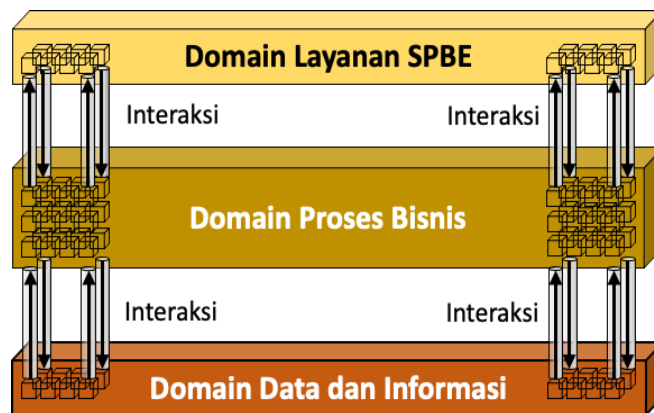
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, manajemen pelayanan publik, manajemen SPBE, kearsipan nasional, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.
09.07	Kesekretariatan Negara	bidang sekretariat negara termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan pemerintahan, pengkajian strategis, serta pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia, politik dalam negeri, litigasi isu strategis, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Di bidang pemerintahan umum, target Arsitektur SPBE adalah untuk mewujudkan layanan digital pemerintah terintegrasi. Transformasi proses bisnis pada sektor pemerintah diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan internal (G2E dan G2G) yang menerapkan konsep *digital working collaboration* serta *smart city* pada *smart government*, yang merupakan arah kebijakan nasional hingga tahun 2024.

Transformasi digital nasional diidentifikasi untuk mendukung operasional pemerintah berupa urusan pemerintahan dalam negeri (RB 09.01), keuangan (RB 09.02), perencanaan pembangunan nasional (RB 09.05), aparatur negara (RB 09.06), sekretariat negara (RB.09.07) di tingkat nasional.

3. Keterkaitan Antar Domain

Arsitektur proses bisnis berinteraksi dengan domain layanan SPBE serta domain data dan informasi. Domain arsitektur proses bisnis mencakup berbagai macam proses bisnis yang akan menghasilkan data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah. Domain proses bisnis berelasi langsung dengan domain data dan informasi, untuk menggambarkan data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses bisnis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Domain proses bisnis juga harus dapat mengidentifikasi layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan di Kabupaten Magelang. Keterkaitan antara domain proses bisnis, data dan informasi, serta layanan ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 1.2. Interaksi domain proses bisnis dengan domain layanan serta domain data dan informasi

Arsitektur proses bisnis disusun berdasarkan tujuan pembangunan nasional, transformasi digital, penyediaan layanan pemerintahan internal, digital working collaboration, smart city dan smart government. Identifikasi proses bisnis di bidang kebijakan dan tata kelola *egovernment* ditujukan untuk mendukung terbentuknya layanan SPBE di bidang layanan *egovernment*, serta sebagai acuan untuk mengidentifikasi data dan informasi berupa data pokok dan data tematik yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh fungsi-fungsi Kabupaten Magelang.

4. Metadata Proses Bisnis

Struktur arsitektur proses bisnis berfokus pada SPBE Instansi Pusat dan SPBE Pemerintah Daerah, namun disusun dengan tetap berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pasal 11 dan 12. Untuk menjamin struktur dan format baku untuk mengidentifikasi proses bisnis, telah disusun metadata proses bisnis dalam Perpres SPBE. Penggunaan metadata ini juga ditujukan untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan proses bisnis, serta untuk mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah dalam Satu Data Indonesia. Dalam pengumpulan data tentang proses bisnis yang diterapkan di lingkungan Kabupaten Magelang, atribut-atribut metadata yang diterapkan ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih

5	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis IPPD
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
7	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan
8	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang dicapai
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

B. Arsitektur Proses Bisnis Saat Ini

1. Identifikasi Stakeholder SPBE Kabupaten Magelang

Berdasarkan visi, misi, dan sasaran Kabupaten Magelang, dilakukan pula identifikasi mitra kerja yang merupakan stakeholders beserta keterlibatan dan aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses bisnis dalam Kabupaten Magelang, yang terdiri atas stakeholder internal dan stakeholder eksternal.

Stakeholder internal Kabupaten Magelang dapat diidentifikasi dari struktur organisasi yang tercantum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang terdiri atas:

1. Pimpinan Daerah
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
10. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
20. Dinas Pertanian dan Pangan
21. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
22. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
23. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
25. Kecamatan Salaman
26. Kecamatan Borobudur
27. Kecamatan Ngluwar

28. Kecamatan Salam
29. Kecamatan Srumbung
30. Kecamatan Dukun
31. Kecamatan Sawangan
32. Kecamatan Muntilan
33. Kecamatan Mungkid
34. Kecamatan Mertoyudan
35. Kecamatan Tempuran
36. Kecamatan Kajoran
37. Kecamatan Kaliangkrik
38. Kecamatan Bandongan
39. Kecamatan Candimulyo
40. Kecamatan Pakis
41. Kecamatan Ngablak
42. Kecamatan Grabag
43. Kecamatan Tegalrejo
44. Kecamatan Secang
45. Kecamatan Windusari
46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sementara itu, hasil identifikasi *stakeholder* eksternal Kabupaten Magelang sesuai dengan dokumen peta proses bisnis yang ada, dipetakan bahwa *stakeholder* eksternal Kabupaten Magelang meliputi:

1. Pemerintah
2. Legislatif
3. Masyarakat
4. Dunia Usaha
5. Media

2. Pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis

Pada kondisi eksisting arsitektur proses bisnis Kabupaten Magelang, diperlukan pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis. Pemetaan tersebut berperan penting untuk memastikan keterlibatan unit-unit kerja Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kabupaten Magelang. Pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis ditunjukkan dalam bentuk ringkasan pemetaan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Ringkasan pemetaan proses berdasarkan unit kerja

Perangkat Daerah	Proses Bisnis Terkait
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	KABMGL.01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	KABMGL.01
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	KABMGL.01
Dinas Kesehatan	KABMGL.02
Dinas Sosial PPKB PPPA	KABMGL.02, KABMGL.03, KABMGL.06
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KABMGL.03, KABMGL.09
Dinas Pertanian dan Pangan	KABMGL.04

Perangkat Daerah	Proses Bisnis Terkait
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	KABMGL.05
Dinas Lingkungan Hidup	KABMGL.07
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KABMGL.08
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	KABMGL.08
Dinas Perhubungan	KABMGL.08
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	KABMGL.09
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KABMGL.09
Satpol PP	KABMGL.09
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KABMGL.09
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	KABMGL.09
Sekretariat Daerah	KABMGL.10
Sekretariat Dewan	KABMGL.10
Bappeda dan Litbangda	KABMGL.10
Inspektorat	KABMGL.10
Diskominfo	KABMGL.11
BPPKAD	KABMGL.12
Disdukcapil	KABMGL.13
BKPPD	KABMGL.14

Tabel menunjukkan ringkasan hasil pemetaan proses bisnis dan SOP berdasarkan organisasi perangkat daerah. Secara umum, proses bisnis utama dan pendukung dilaksanakan berdasarkan bidang cakupan masing-masing. Hasil analisis ini perlu didiskusikan lebih lanjut dengan tim Kabupaten Magelang untuk dikonfirmasi apakah kondisi tersebut sudah ideal dan sesuai kebutuhan.

3. Arsitektur Proses Bisnis Target

Architecture Vision adalah arsitektur yang menjelaskan gambaran umum Kabupaten Magelang meliputi penjelasan: visi, misi, model bisnis, dan pemetaan serta sinergi semua lapisan arsitektur di dalam pengembangan Enterprise Architecture. *Architecture Vision* pada Kabupaten Magelang terdiri dari 7 (tujuh) *artifact* sebagai berikut:

- a. *Architecture Principles* adalah prinsip-prinsip tentang arsitektur yang dibangun sehingga akan menjadi landasan pertimbangan setiap langkah dalam pengembangan arsitektur, yaitu fleksibilitas, keselarasan, kepatuhan realistik dan standarisasi.
- b. *Architecture Goals* merupakan tujuan yang ingin dihasilkan dari arsitektur yang akan dibangun selama periode waktu tertentu. Arsitektur Kabupaten Magelang memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu simplifikasi bisnis, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan organisasi dengan keselarasan TIK.

- c. *Vision, Mission, and Strategy* adalah *artifact* yang menjelaskan visi, misi, dan peta strategis Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang telah menetapkan visi yang bersifat jangka panjang dan dapat memberikan aspirasi, motivasi dan gambaran dari organisasi yang ingin dikembangkan.
- d. *Value Chain Diagram* adalah diagram yang menggambarkan fungsi inti dan pendukung yang saling bersinergi untuk mewujudkan visi Kabupaten Magelang. Misi pembangunan Kabupaten Magelang diacu sebagai gambaran fungsi utama yang harus menjadi prioritas.
- e. *Business Model Canvas* (BMC) adalah sebuah gambaran model bisnis yang merepresentasikan strategi dan proses bisnis dalam organisasi. BMC Kabupaten Magelang memiliki 9 (sembilan) bagian informasi. Bagian tersebut terdiri dari *key partners, key activities, key resources, value propositions, customer relationships, customer segment, channels, cost structure, revenue streams*.
- f. *Solution Concept Diagram* adalah *grand design enterprose architecture* yang menyajikan hubungan *strategic plan, business architecture, data architecture, application architecture, technology architecture, services architecture, dan security architecture*. Hubungan ini mengindikasikan dukungan arsitektur yang dibutuhkan mencapai IKU.

3.1. Pemetaan Visi, Misi dan Strategi (*Vision, Mission, and Strategy*)

Visi, Misi, dan strategi SPBE Kabupaten Magelang merupakan turunan penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi sebagai mandat kepada Bupati Magelang yang harus memiliki keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional.

a. Visi

Visi Kabupaten Magelang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing, dan Amanah “(SEDAYA AMANAH)”.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah Kabupaten Magelang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH).

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut diatas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah yang disingkat menjadi “Sedaya Amanah”.

Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir, batin, adil dan merata. Dalam terminologi Jawa, komponen kebutuhan dasar ini adalah *wareg, wutuh, waras* dan *wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan; *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan; *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat jasmani dan rohani; sementara *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

- 2) Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang memiliki kemampuan untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan baik domestik, regional maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) Amanah adalah terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia;
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Amanah.

c. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

- 1) Misi pertama “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”. Makna yang terkandung dalam misi pertama ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Misi ini memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Tujuan pertama pada misi pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran pada tujuan ini adalah:

- (1) meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dengan indikatornya yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal.
- (2) meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan dengan indikatornya yaitu angka harapan hidup.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
- (2) Meningkatkan mutu pendidikan
- (3) Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga
- (4) Meningkatkan pengelolaan kebudayaan
- (5) Meningkatkan minat baca masyarakat
- (6) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat
- (7) Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan pendidikan formal/kesetaraan
 - (2) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - (3) Meningkatkan kapasitas daya saing olahraga
 - (4) Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda
 - (5) Meningkatkan pengembangan kebudayaan
 - (6) Meningkatkan pengembangan kesenian tradisional
 - (7) Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
 - (8) Meningkatkan pembinaan perpustakaan dalam membudayakan kegemaran membaca
 - (9) Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - (10) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
 - (11) Meningkatkan ketersediaan farmasi, dan alat kesehatan serta penjaminan kesehatan makanan minuman di masyarakat
 - (12) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
 - (13) Meningkatkan kualitas puskesmas dan rumah sakit termasuk pemenuhan sarana, prasarana dan SPM rumah sakit
 - (14) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan KB, dan kesehatan reproduksi
 - (15) Meningkatkan pengendalian penduduk
 - (16) Meningkatkan pemberdayaan pembangunan ketahanan keluarga
- b) Tujuan kedua pada misi pertama adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi.

Sasaran pada tujuan ini adalah:

- (1) menurunnya jumlah PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS;
- (2) meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator indeks ketahanan pangan;
- (3) menurunnya tingkat pengangguran terbuka dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

- (1) Meningkatkan penanganan PMKS
- (2) Meningkatkan akses, kesempatan kerja penduduk usia kerja dan kompetensi tenaga kerja
- (3) Meningkatkan ketahanan pangan

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan rehabilitasi sosial,
- (2) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
- (3) Meningkatkan penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
- (4) Meningkatkan pemberdayaan sosial
- (5) Meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif

- (6) Meningkatkan sarana, prasarana, jumlah instruktur pelatihan, serta produktivitas tenaga kerja
- (7) Meningkatkan hubungan industrial dengan stakeholder
- (8) Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan
- (9) Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- (10) Menanggulangi kerawanan pangan masyarakat
- (11) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat

c) Tujuan ketiga pada misi pertama adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan kategori kabupaten layak anak.

Strategi yang akan ditempuh adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga. Adapun arah kebijakannya adalah :

- (1) Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- (2) Meningkatkan perlindungan perempuan
- (3) Meningkatkan perlindungan terhadap anak
- (4) Meningkatkan pemenuhan hak anak

2) Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”.

Misi ini ingin mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik serta meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Tujuan Misi ini adalah meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita.

Sasaran pada tujuan ini adalah:

- a) tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- b) meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah;
- c) meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan misi dan sasaran ini adalah:

- a) Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri
- b) Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing
- c) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
- d) Meningkatkan kinerja UMKM.
- e) Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan
- f) Meningkatkan pelayanan investasi di daerah.
- g) Meningkatkan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)
- h) Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana
- i) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat
- j) Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
- k) Mengembangkan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- l) Mengembangkan produk peternakan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- m) Mengembangkan produk perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- n) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan
- o) Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang
- p) Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas
- q) Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri
- b) Meningkatkan kualitas pengelolaan data industri
- c) Menjaga stabilisasi harga barang terutama barang kebutuhan pokok dan barang penting
- d) Meningkatkan pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan
- e) Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
- f) Mengembangkan ekspor
- g) Meningkatkan sarana dan prasarana pasar rakyat untuk menunjang peningkatan sektor perdagangan
- h) Mengoptimalkan standarisasi pengukuran dan perlindungan konsumen
- i) Optimalisasi kelembagaan koperasi
- j) Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi
- k) Meningkatkan omzet penjualan produk usaha mikro.
- l) Meningkatkan keberdayaan UMKM
- m) Meningkatkan atraksi, amenities dan aksesibilitas destinasi pariwisata
- n) Mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- o) Meningkatkan pemasaran pariwisata
- p) Mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif
- q) Mengembangkan sebaran investasi PMA dan PMDN
- r) Meningkatkan upaya promosi penanaman modal

- s) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- t) Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
- u) Meningkatkan pelayanan penanaman modal terutama kepatuhan terhadap SOP perizinan dan pengembangan perizinan berbasis IT
- v) Meningkatkan penertiban dan penegakan perda dalam mendukung peningkatan Trantibumlinmas
- w) Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
- x) Meningkatkan penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak
- y) Menguatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
- z) Meningkatkan keberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- aa) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
- ab) Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial
- ac) Peningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- ad) Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam penataan dan pembangunan desa untuk mendukung kemandirian desa
- ae) Meningkatkan kerjasama desa
- af) Meningkatkan fasilitasi administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa
- ag) Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan sosial budaya lainnya
- ah) Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian
- ai) Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- aj) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- ak) Meningkatkan pelayanan perizinan usaha pertanian
- al) Penguatan penyuluhan pertanian
- am) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan
- an) Mengoptimalkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- ao) Mengoptimalkan perizinan usaha sektor pertanian sub sektor peternakan, khususnya pengawasan peredaran obat hewan
- ap) Meningkatkan penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan
- aq) Meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya
- ar) Meningkatkan pengawasan sumberdaya perikanan
- as) Meningkatkan kualitas dan jenis produk olahan hasil perikanan serta pemasarannya
- at) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- au) Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- av) Meningkatkan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan

- aw) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - ax) Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas
 - ay) Meningkatkan penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup
 - az) Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati
 - ba) Meningkatkan pengakuan dan pembinaan terhadap masyarakat hukum adat dan kearifan lokal terkait PPLH
 - bb) Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
 - bc) Meningkatkan penyelenggaraan jalan
 - bd) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
 - be) Meningkatkan penataan bangunan gedung
 - bf) Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan
 - bg) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 - bh) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
 - bi) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
 - bj) Meningkatkan pengembangan permukiman
 - bk) Meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS
 - bl) Meningkatkan pengembangan jasa konstruksi
 - bm) Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
 - bn) Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
 - bo) Meningkatkan pengembangan perumahan
 - bp) Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dan penyediaan PSU di kawasan permukiman yang diduga kumuh
 - bq) Meningkatkan penanganan PSU perumahan
 - br) Meningkatkan layanan sertifikasi kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perumahan
 - bs) Meningkatkan kawasan permukiman layak
 - bt) Meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Misi ketiga “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah”.
- Misi ini memiliki tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
- Adapun sasaran daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga adalah:
- a) meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran nilai AKIP;
 - b) meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c) meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK;
 - d) meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

- e) meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian dengan indikator sasaran Indeks Sistem Merit

Strategi yang dilakukan untuk mencapai misi dan sasaran ini adalah:

- a) Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan
- b) Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- c) Meningkatkan kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah
- d) Meningkatkan fasilitasi layanan lembaga DPRD
- e) Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan
- f) Meningkatkan kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah
- g) Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah
- h) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i) Meningkatkan pelaksanaan *e-government*
- j) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- k) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
- l) Meningkatnya pengelolaan aset daerah
- m) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- n) Meningkatkan pelayanan kearsipan
- o) Meningkatkan kualitas aparatur.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan
- b) Mengoptimalkan perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- c) Meningkatkan kualitas penataan organisasi, keprotokolan dan komunikasi pimpinan, administrasi umum kesekretariatan daerah
- d) Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- e) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan
- f) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- g) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
- h) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum
- i) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- j) Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- k) Meningkatkan implementasi penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah
- l) Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi daerah
- m) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan
- n) Meningkatkan mutu perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan

- o) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi
- p) Meningkatkan diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat
- q) Menyediakan sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar
- r) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik
- s) Meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan
- t) Meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah
- u) Meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan aset daerah
- v) Meningkatkan pendataan dan penataan administrasi kependudukan
- w) Meningkatkan pencatatan sipil terutama kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan
- x) Meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan
- y) Meningkatkan pengelolaan profil kependudukan
- z) Meningkatkan mutu pengelolaan kearsipan
- aa) Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
- bb) Optimalisasi kepegawaian daerah terutama pemenuhan formasi ASN, layanan pemberhentian dan pengembangan informasi.

Tahun ini merupakan tahun akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan saat ini telah disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode tahun 2025-2026. Tujuan ini akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini, tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada isu strategis daerah karena tidak adanya visi misi kepala daerah. Isu strategis daerah sendiri disimpulkan dari isu strategis lingkungan (isu global, nasional, dan regional), permasalahan daerah, serta potensi daerah.

Logframe Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Perwujudan kesejahteraan masyarakat didukung oleh empat tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing adalah mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Dukungan sumber daya manusia Kabupaten Magelang yang berkualitas, baik secara fisik maupun mental akan berdampak positif pada segala aspek kehidupan, tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kabupaten Magelang. Tujuan ini dimaknai dengan menciptakan masyarakat yang berkualitas (cerdas dan sehat), inovatif, dan berbudaya. Tujuan ini dilakukan melalui penguatan sistem dan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan

andal, pengoptimalan kualitas pembangunan keluarga, pembangunan manusia berbasis gender, peningkatan literasi masyarakat, pemajuan kebudayaan, serta daya saing pemuda dan olahraga.

2. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah

Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah, antara lain pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, dan UMKM, berbasis inovasi dengan dukungan iklim berinvestasi yang kondusif, untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Pengembangan potensi lokal unggulan tersebut salah satunya diupayakan melalui penguatan sektor hulu dan sektor hilirnya. Penguatan sektor pertanian juga akan mendorong ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan.

Selanjutnya, penguatan sektor hilir yang diterapkan Pada industry pengolahan selain diharapkan mampu memberi nilai tambah ekonomi untuk masyarakat, juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Masyarakat juga diharapkan mampu memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencapai tingkat kehidupan yang layak, yang melibatkan stabilitas keuangan, akses ke pekerjaan yang layak, serta pendapatan yang cukup.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Magelang harus dilaksanakan secara holistik dengan mempertimbangkan seluruh aspek pendukung, seperti atraksi di setiap objek wisata yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas, pelaku usaha wisata yang berkompeten, dan melaksanakan *event-event* yang berkaitan dengan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM, industri, serta pertanian yang terintegrasi akan mampu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Magelang mendorong pembangunan infrastruktur wilayah yang adil dan merata, selalu memperhatikan keselamatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki tugas untuk memenuhi penyediaan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman layak huni baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan infrastruktur wilayah serta penyediaan perumahan dan kawasan permukiman harus bersinergi dan mengacu kebijakan penataan ruang wilayah, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, harus diseimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap berpedoman pada kaidah kelestarian lingkungan hidup dan konsep berkelanjutan. Saat ini, perubahan iklim semakin terasa hingga mempengaruhi kondisi alam dan kehidupan manusia seperti terjadinya degradasi lingkungan, meningkatnya temperatur udara, menurunnya kualitas dan kuantitas air, menurunnya luasan lahan pertanian, dan kekeringan ekstrem yang berpeluang menyebabkan kebakaran hutan dan

perubahan lainnya. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi dan adaptasi, yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

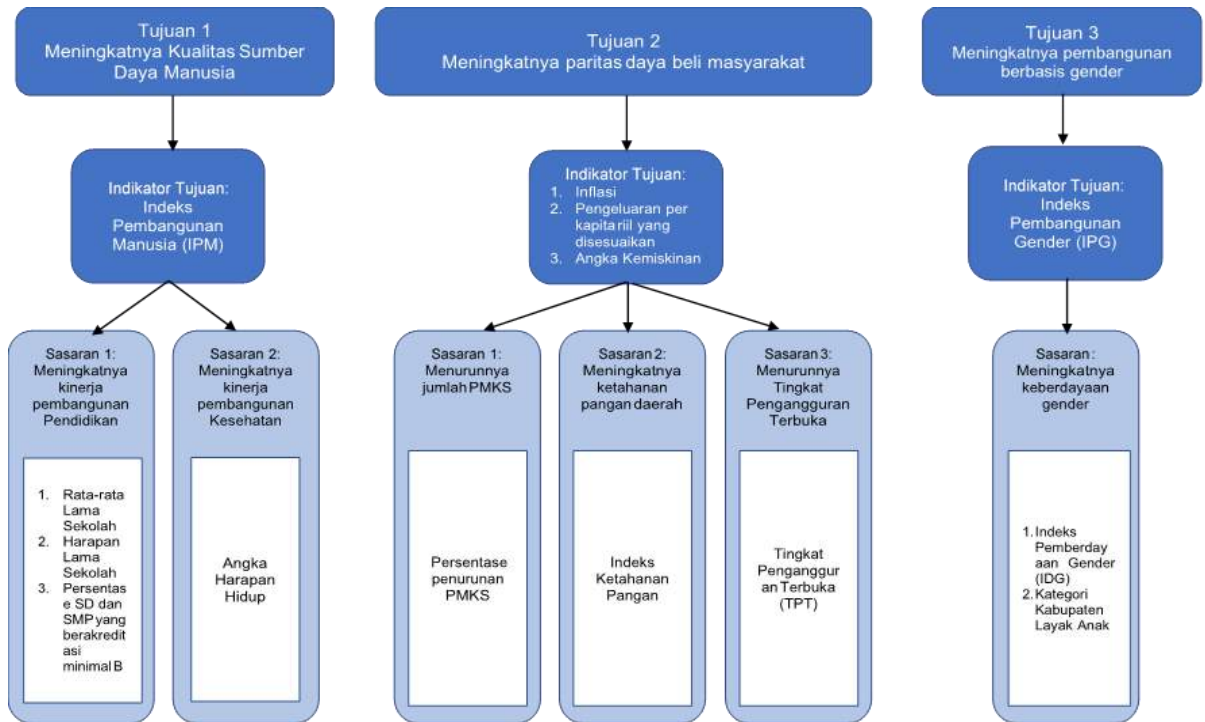
Pemerintah daerah Kabupaten Magelang perlu mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan pelayanan sektor publik serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga harus didukung oleh aparatur yang berintegritas dan kompeten untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima. Selanjutnya, seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang diarahkan untuk berperan aktif dalam rangka mewujudkan pemantapan stabilitas daerah melalui penciptaan kondusivitas wilayah.

Perwujudan empat tujuan pembangunan didukung dengan lima belas sasaran sebagai berikut:

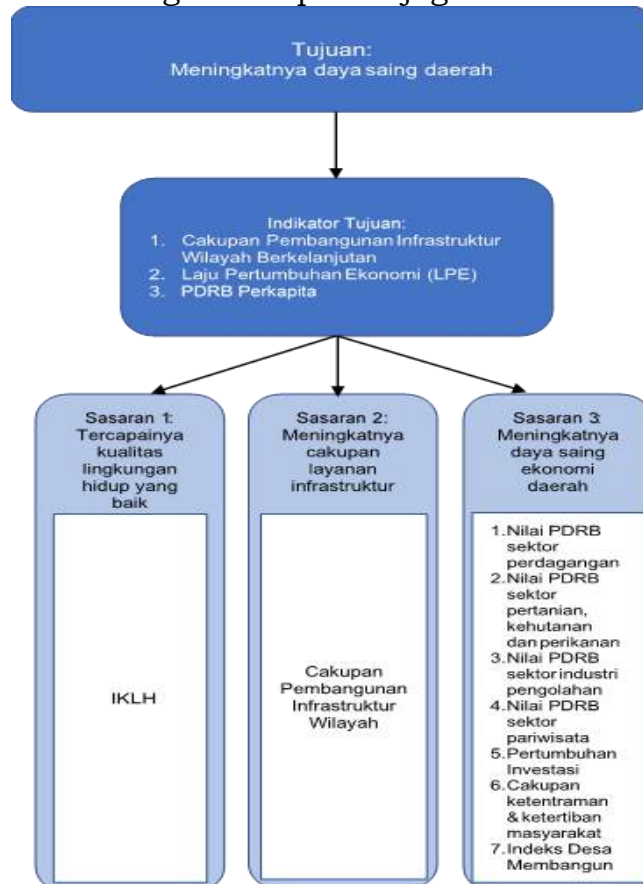
1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga;
 - c. Meningkatnya keberdayaan gender;
 - d. Meningkatnya literasi masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulandaerah dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
 - c. Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar;
 - d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja;
 - e. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang;
 - b. Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak;
 - c. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
 - d. Berkurangnya resiko bencana
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan;
 - b. Meningkatnya kondusifitas wilayah.

Penjabaran 3 (tiga) Misi Kabupaten Magelang terhadap tujuan dan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

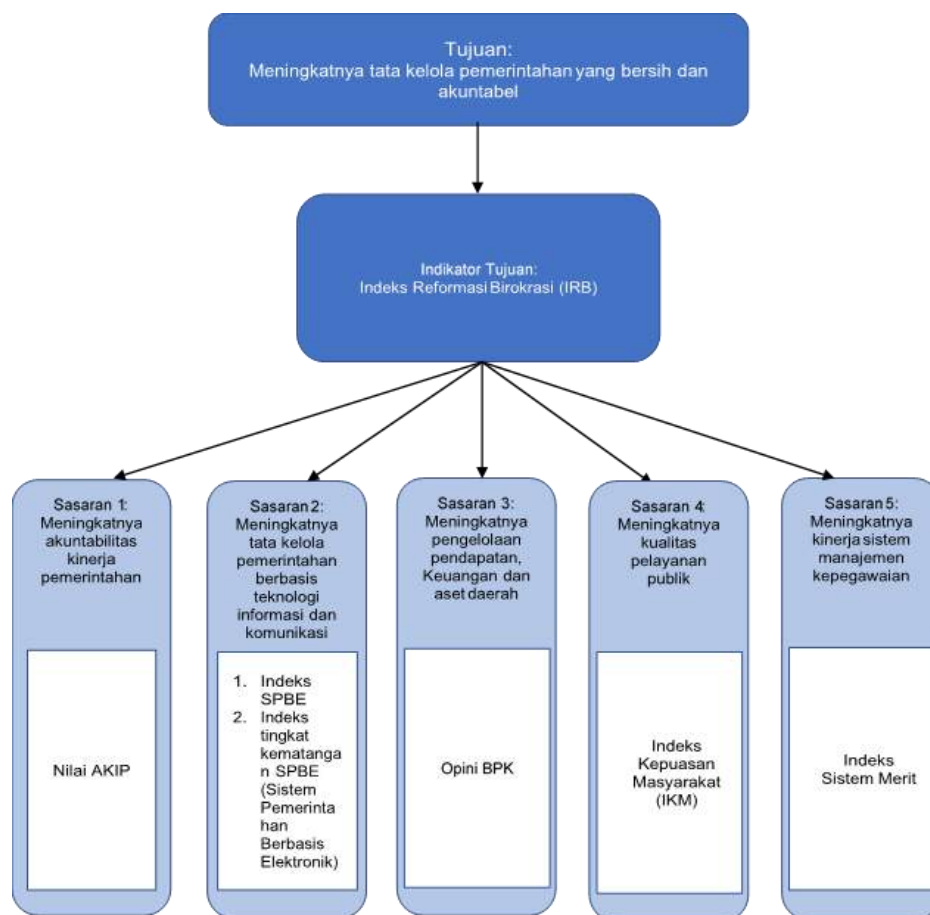
MISI 1: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia



MISI 2: Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup



MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah



3.2. Proses Bisnis Kabupaten Magelang

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/471/KEP/01.08/2023 TENTANG Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magelang memetakan 9 (Sembilan) Proses Utama, 5 (lima) Proses Pendukung. Pengelompokan proses bisnis dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Proses Utama Kabupaten Magelang

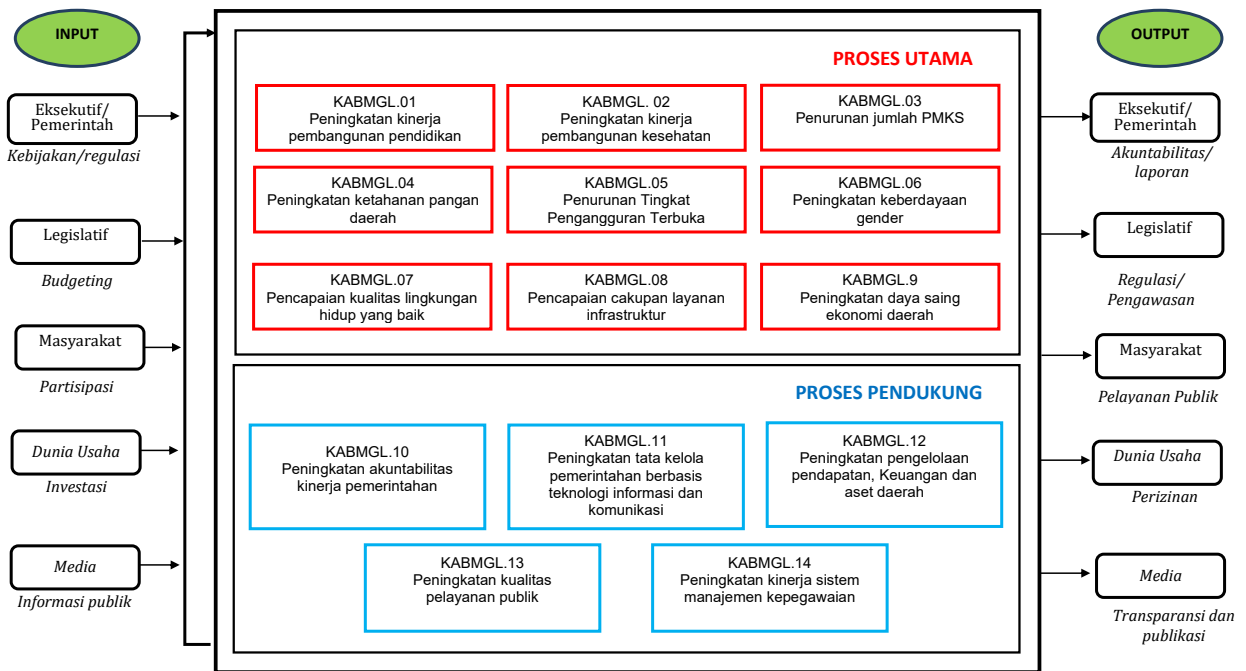
KABMGL.01	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan
KABMGL.02	Peningkatan kinerja pembangunan kesehatan
KABMGL.03	Penurunan jumlah PMKS
KABMGL.04	Peningkatan ketahanan pangan daerah
KABMGL.05	Penurunan tingkat pengangguran terbuka
KABMGL.06	Peningkatan keberdayaan gender
KABMGL.07	Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang baik
KABMGL.08	Pencapaian cakupan layanan infrastruktur
KABMGL.09	Peningkatan daya saing ekonomi daerah

Gambar 2.5. Proses Pendukung Kabupaten Magelang

KABMGL.10	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
KABMGL.11	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis TIK
KABMGL.12	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan & Aset Daerah
KABMGL.13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

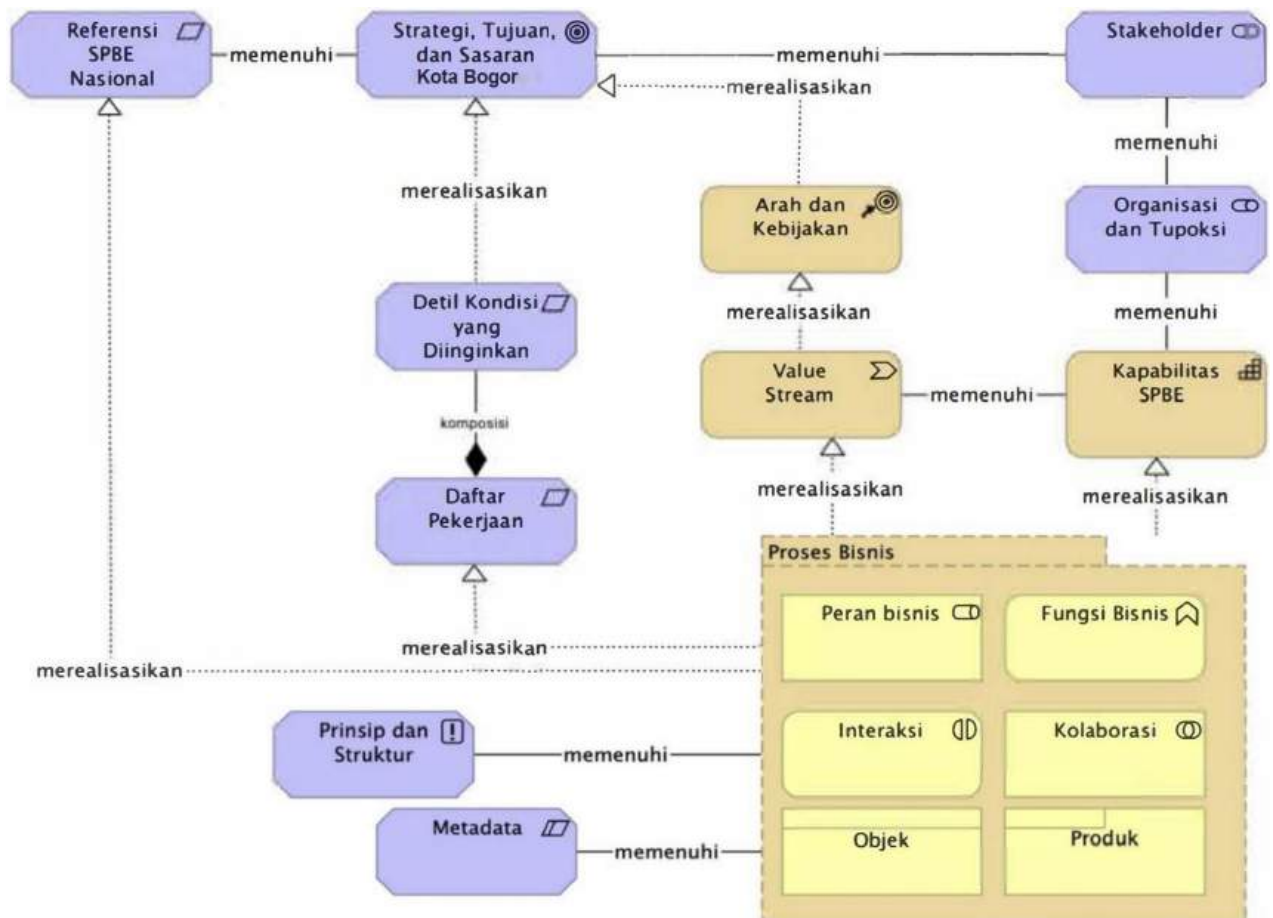
KABMGL.14	Peningkatan Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian
-----------	--

Dari hasil pemetaan yang telah dilakukan maka dapat digambarkan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai berikut:



Gambar 2.6. Peta Proses Bisnis Kabupaten Magelang

4. Kerangka Arsitektur Proses Bisnis Target



Gambar 2.7. Kerangka arsitektur proses bisnis target

Kerangka arsitektur proses bisnis target pada Gambar 19 menunjukkan bahwa Referensi SPBE nasional menjadi acuan utama yang selaras dengan

strategi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya diturunkan ke dalam arah dan kebijakan, dan diturunkan dalam value streams. Selain itu, strategi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Magelang juga menjadi acuan dalam penetapan stakeholders, organisasi, dan tupoksi serta kapabilitas SPBE. Arsitektur proses bisnis meliputi pemetaan peran bisnis, fungsi bisnis, interaksi, kolaborasi, objek dan produk yang berkaitan dengan value streams, kapabilitas, serta tetap mengacu pada referensi SPBE nasional, prinsip dan struktur, serta metadata proses bisnis. Kapabilitas SPBE juga harus dapat menggambarkan keselarasan antara people (peran dan struktur organisasi), process (proses bisnis yang baik sesuai panduan dan pencapaian sasaran organisasi), serta technology (aplikasi dan infrastruktur pendukung).

5. Identifikasi dan Deskripsi Proses Bisnis Kabupaten Magelang

a. Proses Utama

KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
KABMGL.01	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	KABMGL.01.01	Pengelolaan pendidikan	DISDIKBUD, DISPUSPA, DISPARPORA
		KABMGL.01.02	Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	
		KABMGL.01.03	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
		KABMGL.01.04	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	
		KABMGL.01.05	Pengembangan kapasitas kepramukaan	
		KABMGL.01.06	Pengembangan kebudayaan	
		KABMGL.01.07	Pengembangan kesenian tradisional	
		KABMGL.01.08	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
KABMGL.02	Peningkatan kinerja pembangunan kesehatan	KABMGL.02.01	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	DINKES, DINNSOS, PPKB, PPPA

KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
		KABMGL.02.0 2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
		KABMGL.02.0 3	Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	
		KABMGL.02.0 4	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
		KABMGL.02.0 5	Pengendalian penduduk	
		KABMGL.02.0 6	Pembinaan keluarga berencana (KB)	
		KABMGL.02.0 7	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	
KABMGL.0 3	Penurunan jumlah PMKS	KABMGL.03.0 1	Pemberdayaan sosial	DINSOS PPKB PPPA, BPBD
		KABMGL.03.0 2	Penyediaan rehabilitasi sosial	
		KABMGL.03.0 3	Perlindungan dan jaminan sosial	
		KABMGL.03.0 4	Penanganan bencana	
KABMGL.0 4	Peningkatan ketahanan pangan daerah	KABMGL.04.0 1	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	DISTAN DAN PANGAN
		KABMGL.04.0 2	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan	

KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
			pengan masyarakat	
		KABMGL.04.03	Penanganan kerawanan pangan	
		KABMGL.04.04	Pengawasan keamanan pangan	
KABMGL.05	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	KABMGL.05.01	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	DISPERINNAKER
		KABMGL.05.02	Penempatan tenaga kerja	
		KABMGL.05.03	Pelaksanaan hubungan industrial	
		KABMGL.05.04	Pembangunan kawasan transmigrasi	
KABMGL.06	Peningkatan keberdayaan gender	KABMGL.06.01	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	DINSOS PPKB PPPA
		KABMGL.06.02	Perlindungan perempuan	
		KABMGL.06.03	Pemenuhan hak anak (PHA)	
		KABMGL.06.04	Perlindungan kasus anak	
KABMGL.07	Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang baik	KABMGL.07.01	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	DLH
		KABMGL.07.02	Perencanaan lingkungan hidup	
		KABMGL.07.03	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
		KABMGL.07.04	Pengelolaan keanekaragaman hayati	

KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
		KABMGL.07.0 5	Pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	
		KABMGL.07.0 6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
		KABMGL.07.0 7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan loka dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	
		KABMGL.07.0 8	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	
		KABMGL.07.0 9	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	
		KABMGL.07.1 0	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	
		KABMGL.07.1 1	Pengelolaan persampahan	
KABMGL.0 8	Pencapaian cakupan layanan infrastruktur	KABMGL.08.0 1	Pengelolaan sumber daya air	DPUPR, DPRKP, DISHUB
		KABMGL.08.0 2	Pengelolaan dan	

KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
			pengembangan sistem penyediaan air minum	
		KABMGL.08.03	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	
		KABMGL.08.04	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	
		KABMGL.08.05	Pengembangan permukiman	
		KABMGL.08.06	Penataan bangunan Gedung	
		KABMGL.08.07	Penataan bangunan dan lingkungannya	
		KABMGL.08.08	Penyelenggaraan jalan	
		KABMGL.08.09	Pengembangan jasa konstruksi	
		KABMGL.08.10	Penyelenggaraan penataan ruang	
		KABMGL.08.11	Pengembangan perumahan	
		KABMGL.08.12	Pengembangan kawasan permukiman	
		KABMGL.08.13	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	
		KABMGL.08.14	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	

KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
		KABMGL.08.1 5	Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	
		KABMGL.08.1 6	Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	
		KABMGL.08.1 7	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	
KABMGL.0 9	Peningkatan daya saing ekonomi daerah	KABMGL.09.0 1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	DISTAN DAN PANGAN, DISPETERIKAN, DISPERINNAKER, DISDAGKOP DAN UKM, DISPARPORA, DPMPTSP, SATPOL PP, BPBD, KESBANGPOL, DISPERMASDES
		KABMGL.09.0 2	Penanggulangan bencana	
		KABMGL.09.0 3	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
		KABMGL.09.0 4	Penataan desa	
		KABMGL.09.0 5	Peningkatan kerjasama desa	
		KABMGL.09.0 6	Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	
		KABMGL.09.0 7	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan	

KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
			masyarakat hukum adat	
		KABMGL.09.09	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
		KABMGL.09.11	Pendidikan dan latihan perkoperasian	
		KABMGL.09.12	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	
		KABMGL.09.13	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro kecil (UMKM)	
		KABMGL.09.14	Pengembangan UMKM	
		KABMGL.09.15	Pengembangan iklim penanaman modal	
		KABMGL.09.16	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	
		KABMGL.09.17	Pelayanan penanaman modal	
		KABMGL.09.18	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
		KABMGL.09.19	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	
		KABMGL.09.20	Pengelolaan perikanan budi daya	
		KABMGL.09.21	Pengawasan sumberdaya	

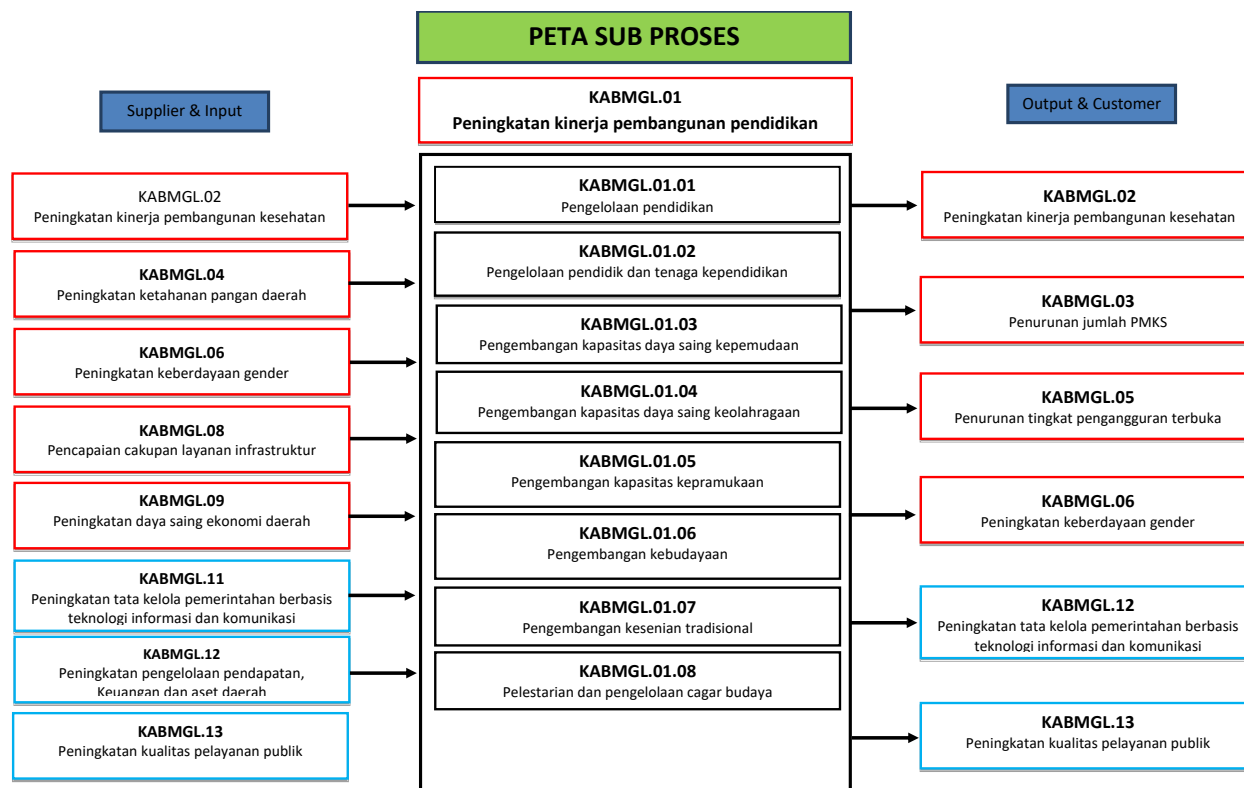
KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
			kelautan dan perikanan	
		KABMGL.09.2 2	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
		KABMGL.09.2 3	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	
		KABMGL.09.2 4	Pemasaran pariwisata	
		KABMGL.09.2 5	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	
		KABMGL.09.2 6	Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	
		KABMGL.09.2 7	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	
		KABMGL.09.2 8	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
		KABMGL.09.2 9	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
		KABMGL.09.3 0	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
		KABMGL.09.3 1	Perizinan usaha pertanian	

KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
		KABMGL.09.3 2	Penyuluhan pertanian	
		KABMGL.09.3 3	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	
		KABMGL.09.3 4	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	
		KABMGL.09.3 5	Pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
		KABMGL.09.3 6	Pengembangan ekspor	
		KABMGL.09.3 7	Pelayanan standarisasi dan perlindungan konsumen	
		KABMGL.09.3 9	Perencanaan dan pembangunan industri	
		KABMGL.09.4 0	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	
		KABMGL.09.4 1	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	
		KABMGL.09.4 2	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	

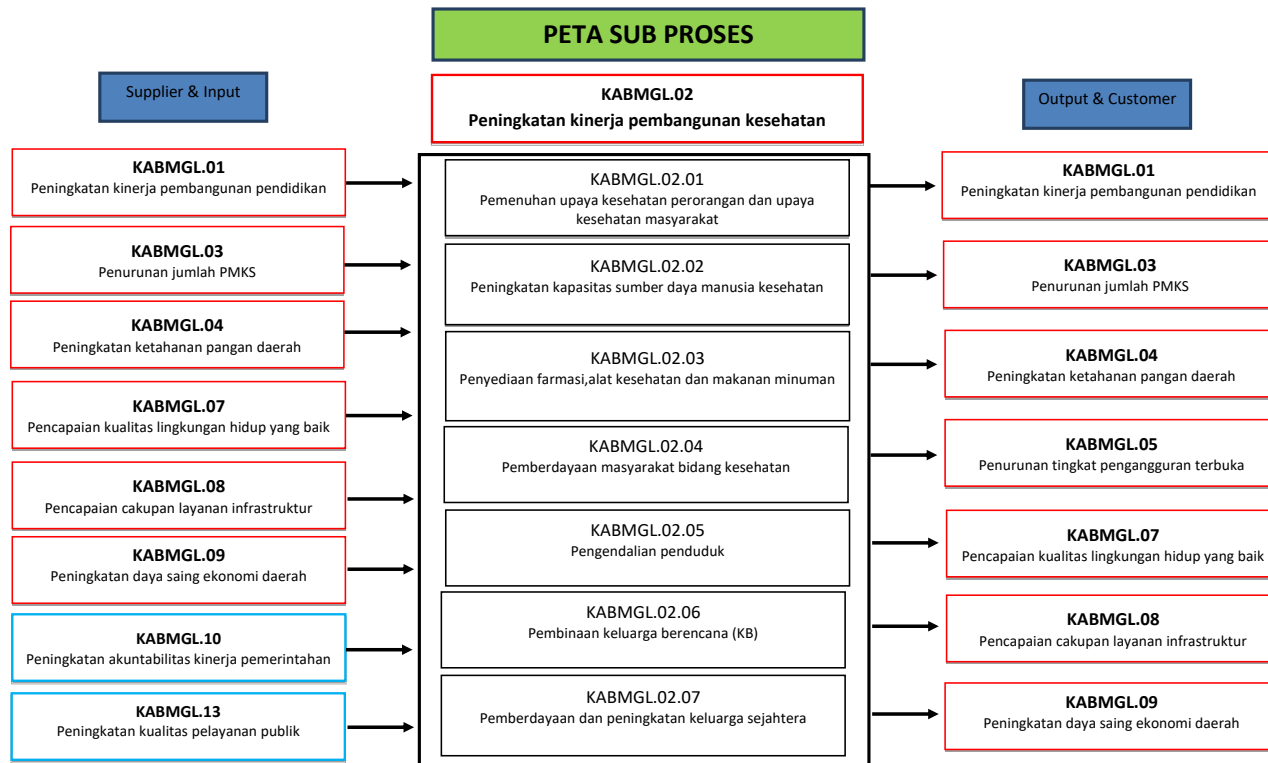
KODE	PROSES UTAMA	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
		KABMGL.09.4 3	Pemberdayaa n dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
		KABMGL.09.4 4	Pembinaan dan pengembang an ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
		KABMGL.09.4 5	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	

Dari hasil identifikasi di atas maka dapat digambarkan Peta Sub Proses Utama Kabupaten Magelang sebagai berikut:

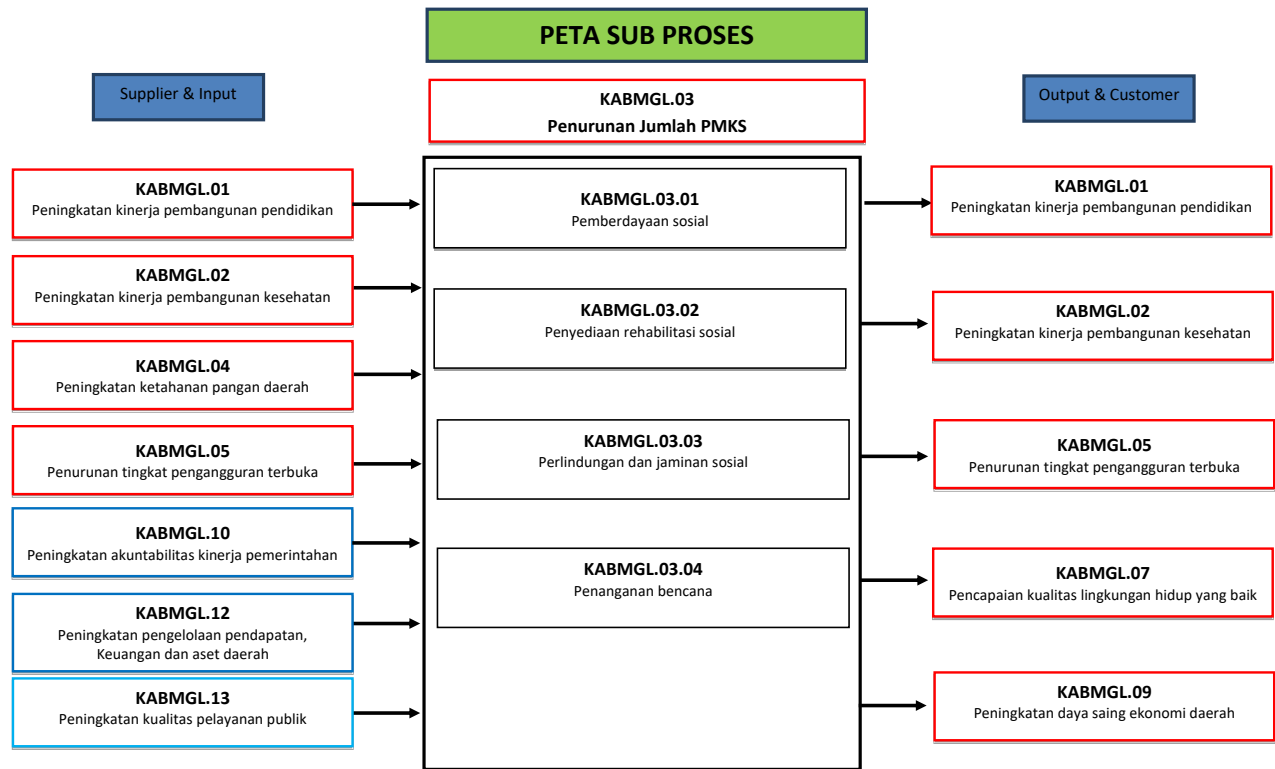
KABMGL.01



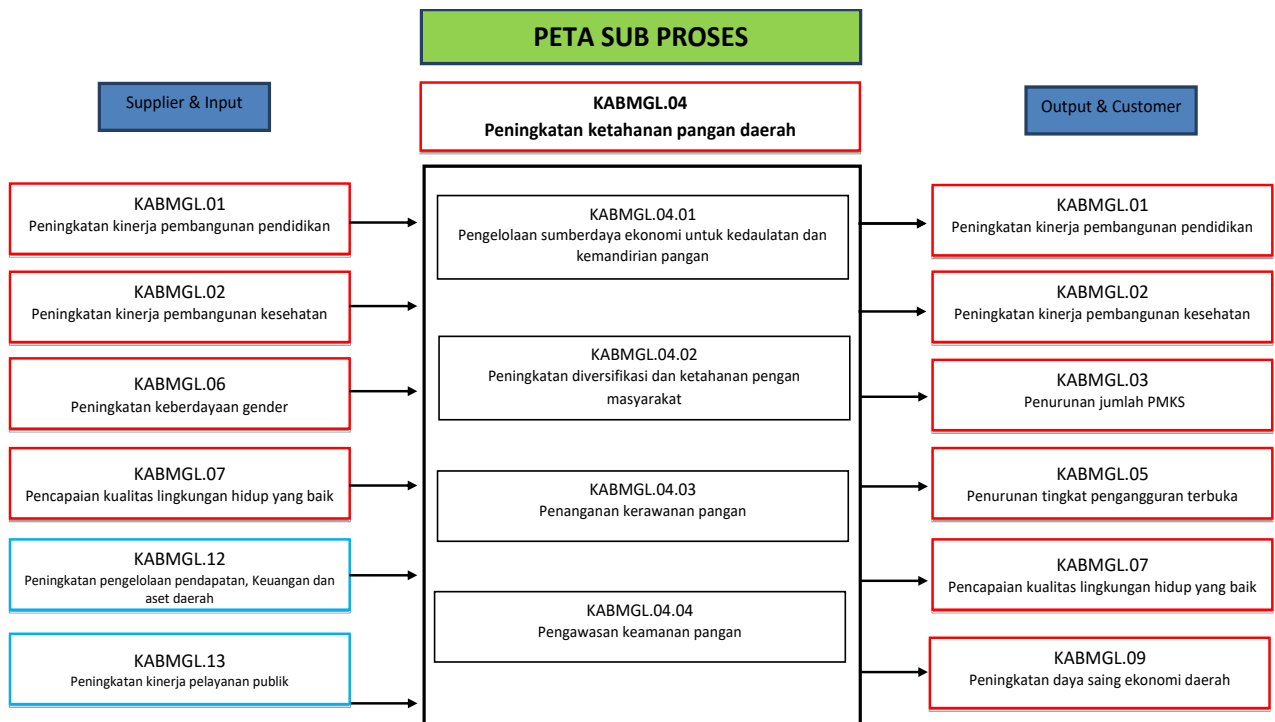
KABMGL.02.



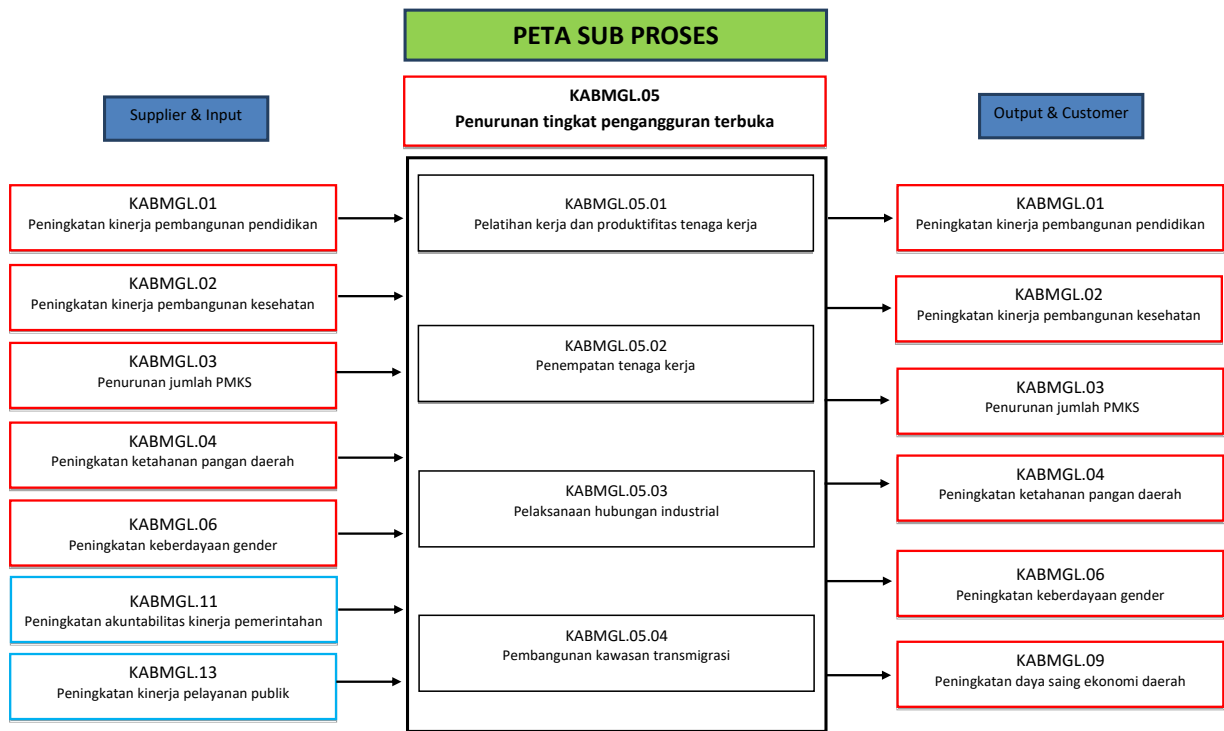
KABMGL.03.



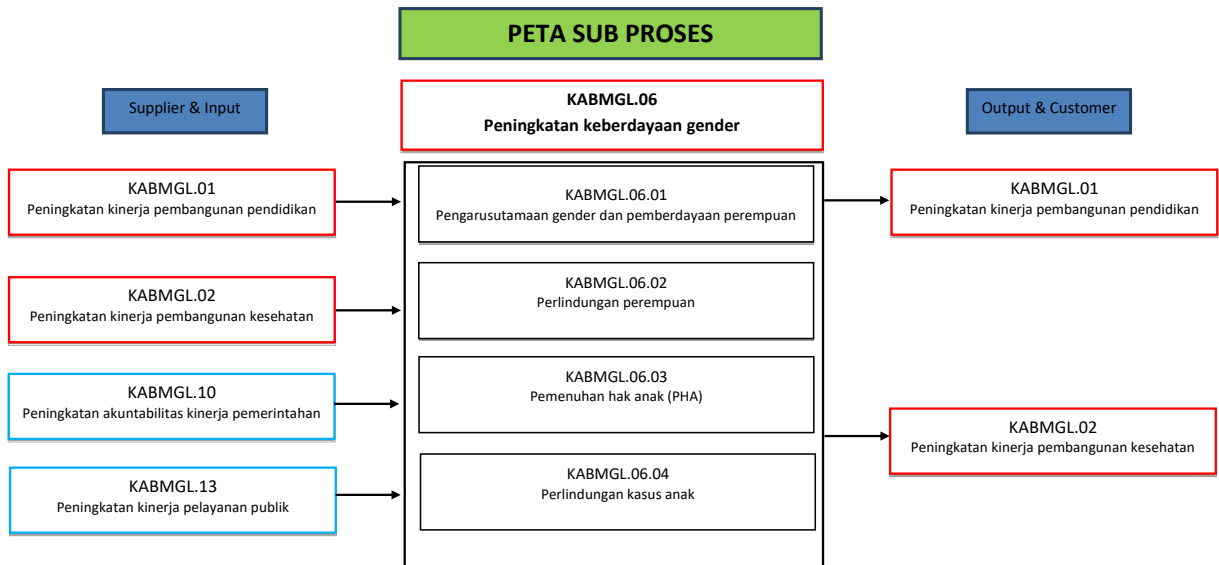
KABMGL.04.



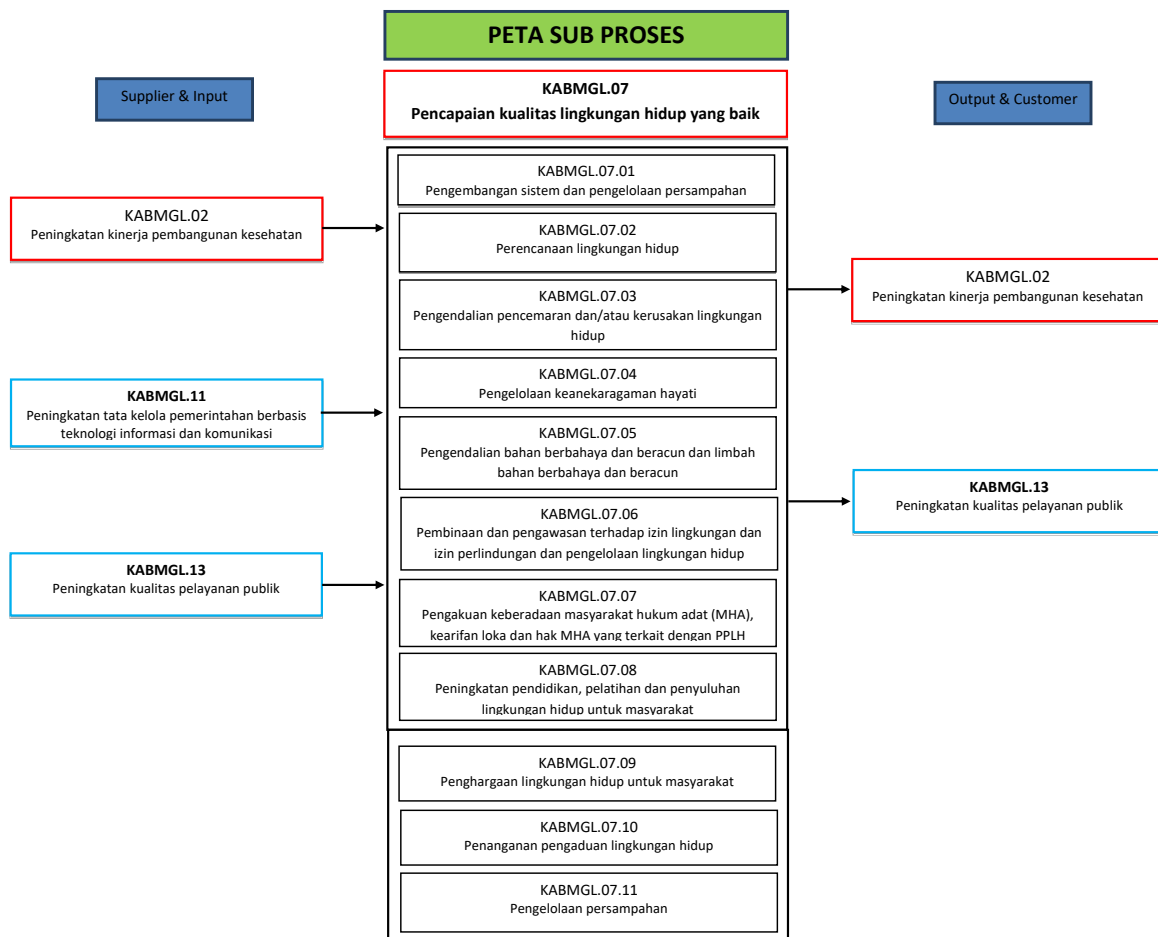
KABMGL.05.



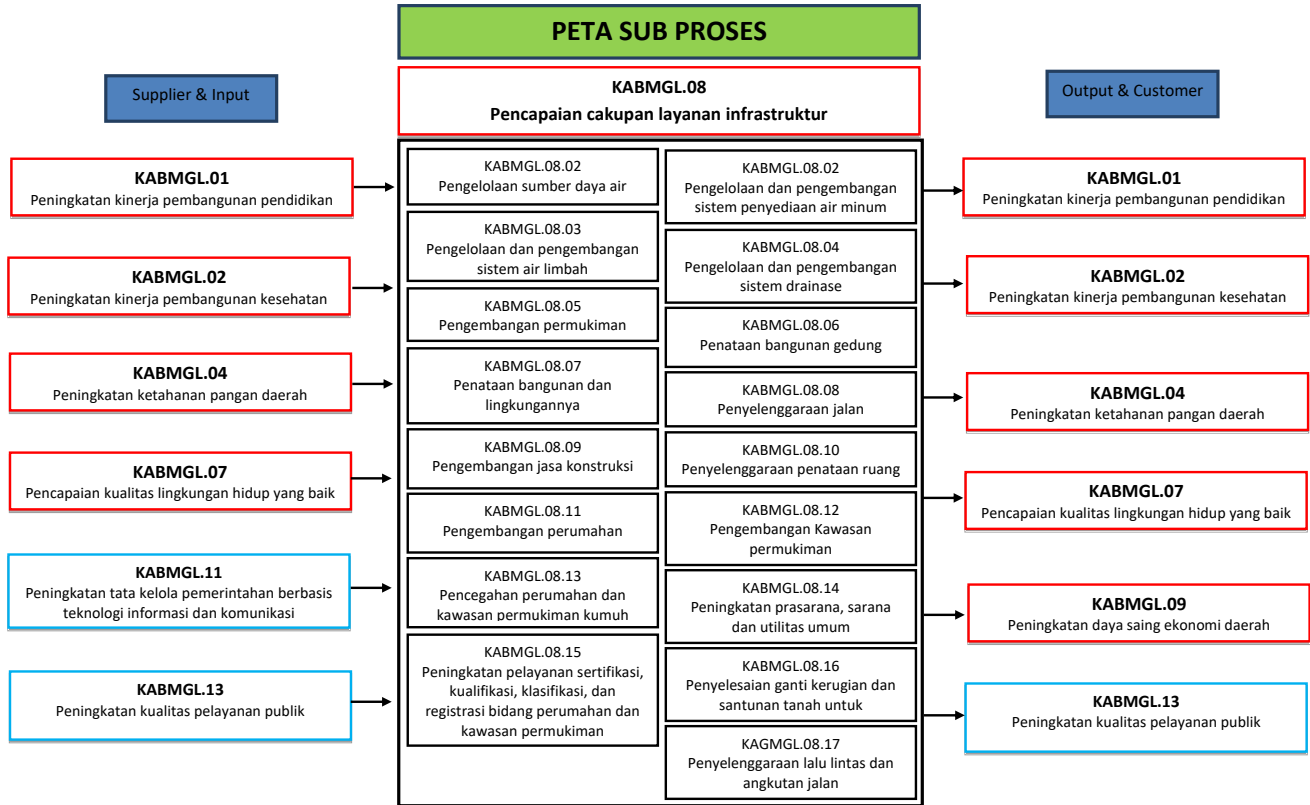
KABMGL.06.



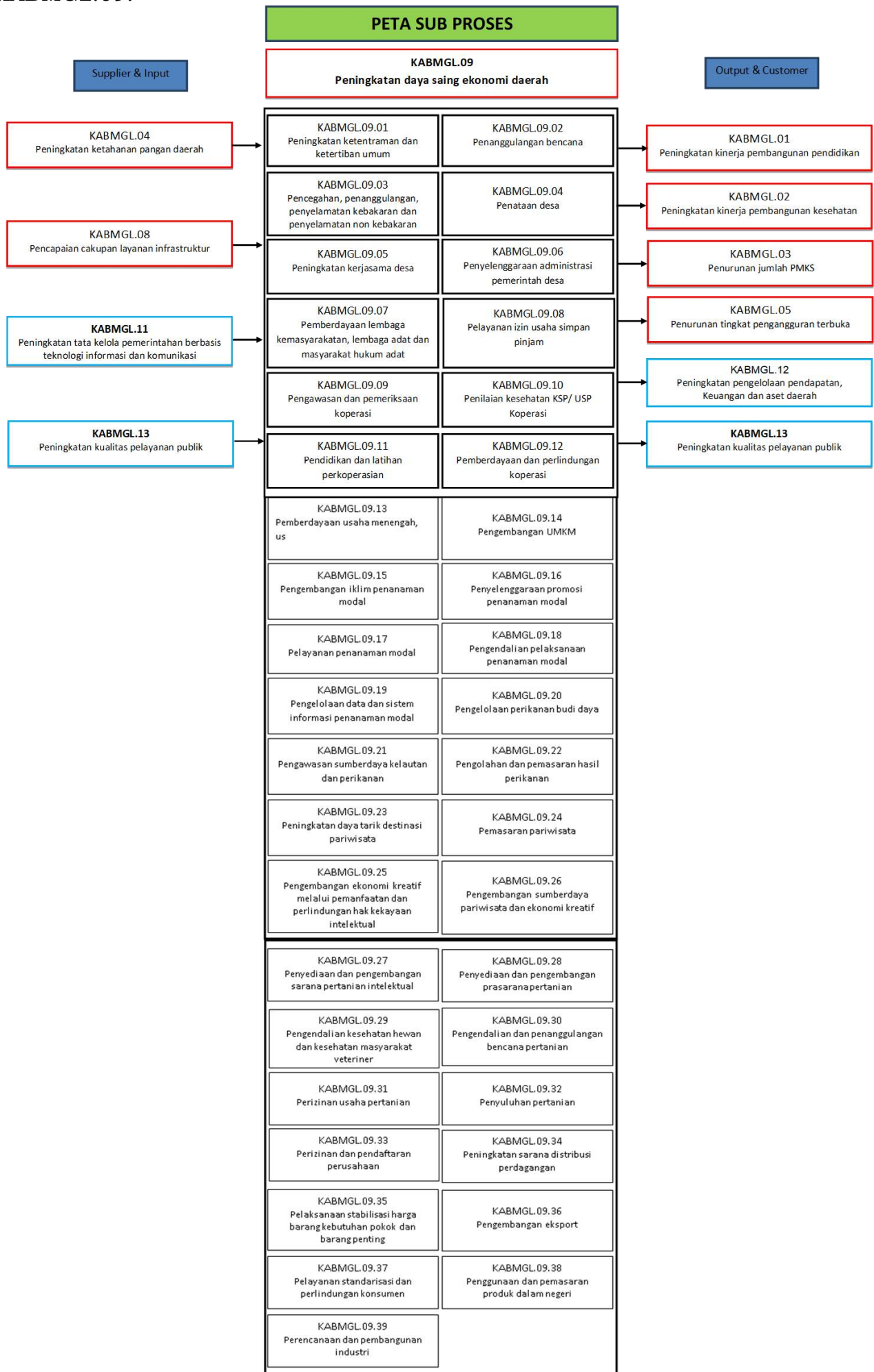
KABMGL.07.



KABMGL.08.



KABMGL.09.



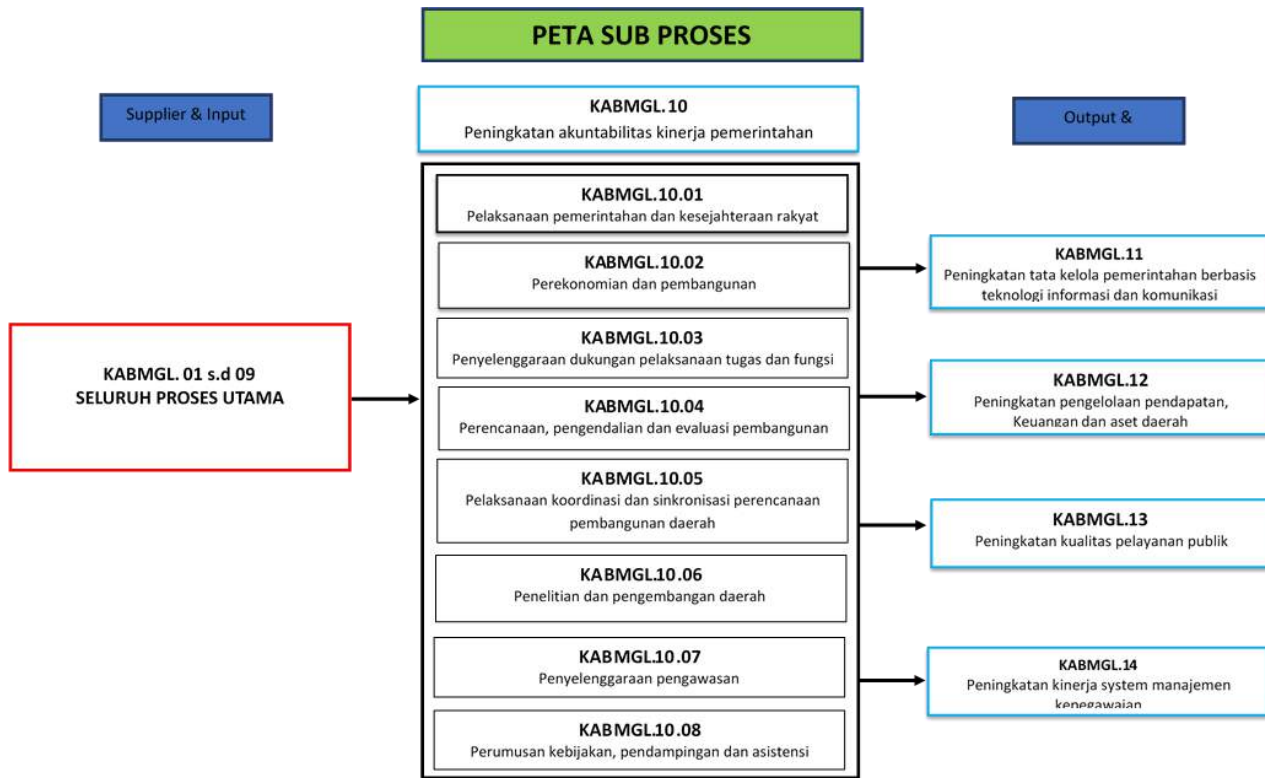
Proses Pendukung

KODE	PROSES PENDUKUN G	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
KABMGL.10	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	KABMGL.10.01	Pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	SETDA, SETWAN, BAPPEDA DAN LITBANGDA, INSPEKTORAT
		KABMGL.10.02	Perekonomian dan pembangunan	
		KABMGL.10.03	Penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
		KABMGL.10.04	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	
		KABMGL.10.05	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	
		KABMGL.10.06	Penelitian dan pengembangan daerah	
		KABMGL.10.07	Penyelenggaraan pengawasan	
		KABMGL.10.08	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	
KABMGL.11	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis TIK	KABMGL.11.01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	DISKOMINFO
		KABMGL.11.02	Pelayanan aplikasi informatika	
		KABMGL.11.03	Penyelenggaraan statistik sektoral	
		KABMGL.11.04	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	
KABMGL.12	Peningkatan pengelolaan pendapatan,	KABMGL.12.01	Pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD

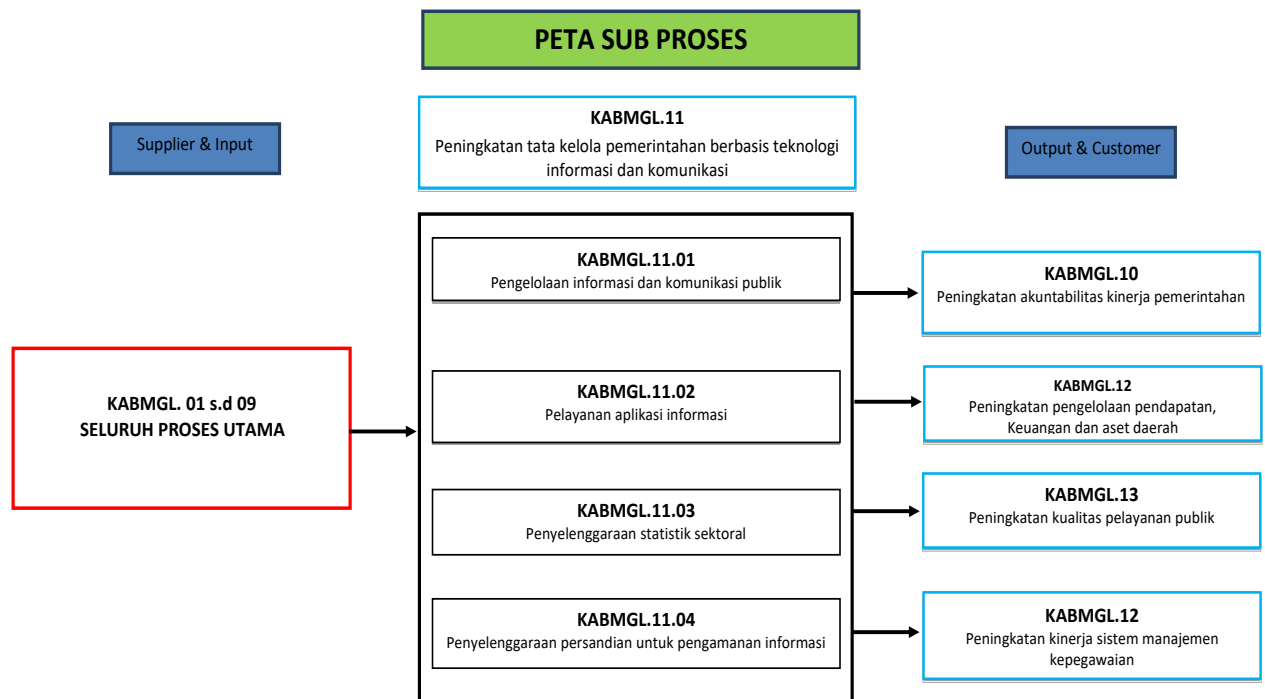
KODE	PROSES PENDUKUN G	KODE	SUB PROSES	Unit Kerja
	Keuangan & aset daerah			
		KABMGL.12.0 2	Pengelolaan barang milik daerah	
		KABMGL.12.0 3	Pengelolaan pendapatan daerah	
KABMGL.1 3	Peningkatan kualitas pelayanan publik	KABMGL.13.0 1	Pendaftaran penduduk	DISDUKCAPIL , DISPUSPA, KECAMATAN
		KABMGL.13.0 2	Pencatatan sipil	
		KABMGL.13.0 3	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
		KABMGL.13.0 4	Pengelolaan profil kependudukan	
		KABMGL.13.0 5	Pengelolaan arsip	
		KABMGL.13.0 6	Perlindungan dan penyelamatan arsip	
		KABMGL.13.0 7	Perizinan penggunaan arsip	
		KABMGL.13.0 8	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
		KABMGL.13.0 9	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
		KABMGL.13.1 0	Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
		KABMGL.13.1 1	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	
KABMGL.1 4	Peningkatan kinerja sistem manajemen kepegawaian	KABMGL.14.0 1	Penyelenggaraan kepegawaian daerah	BKPPD

Dari hasil identifikasi di atas maka dapat digambarkan Peta Sub Proses Utama Kabupaten Magelang sebagai berikut:

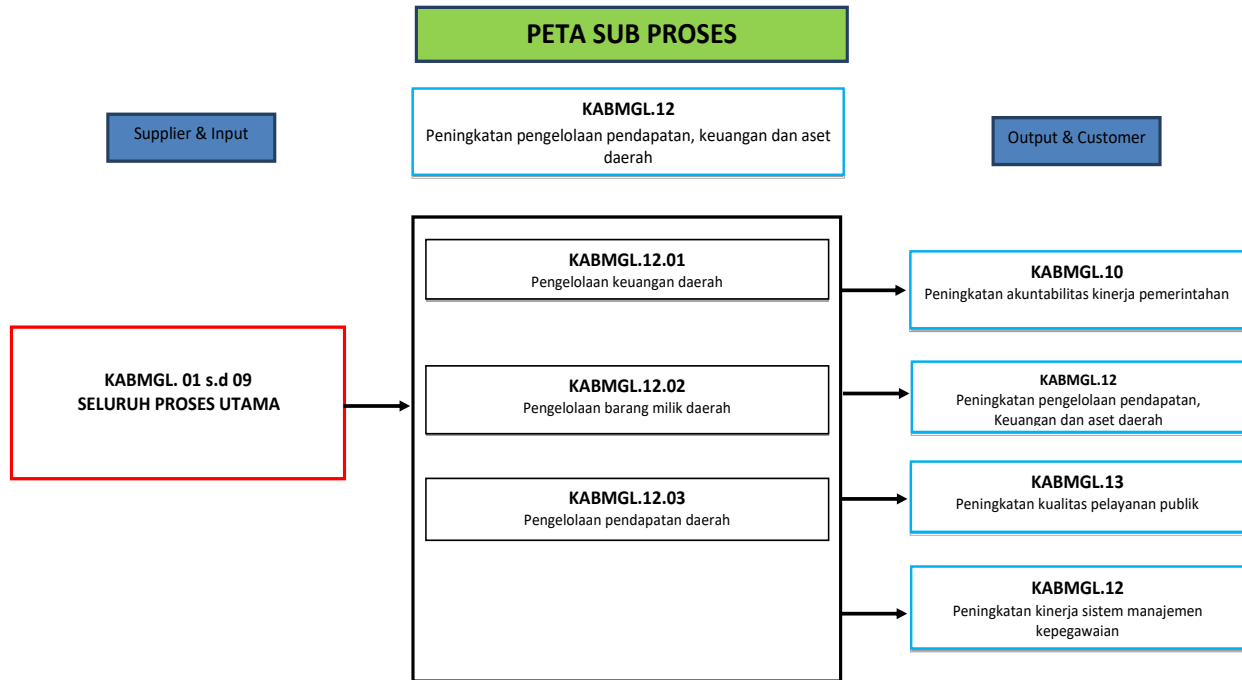
KABMGL.10.



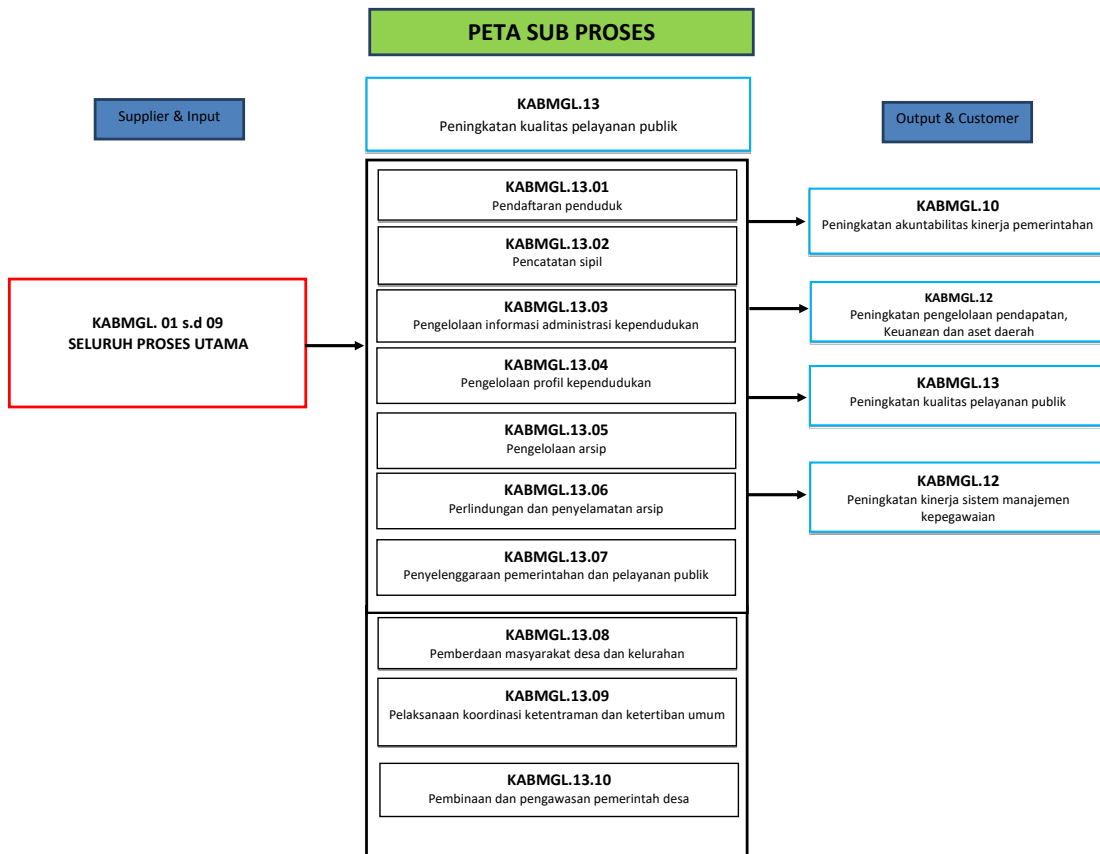
KABMGL.11.



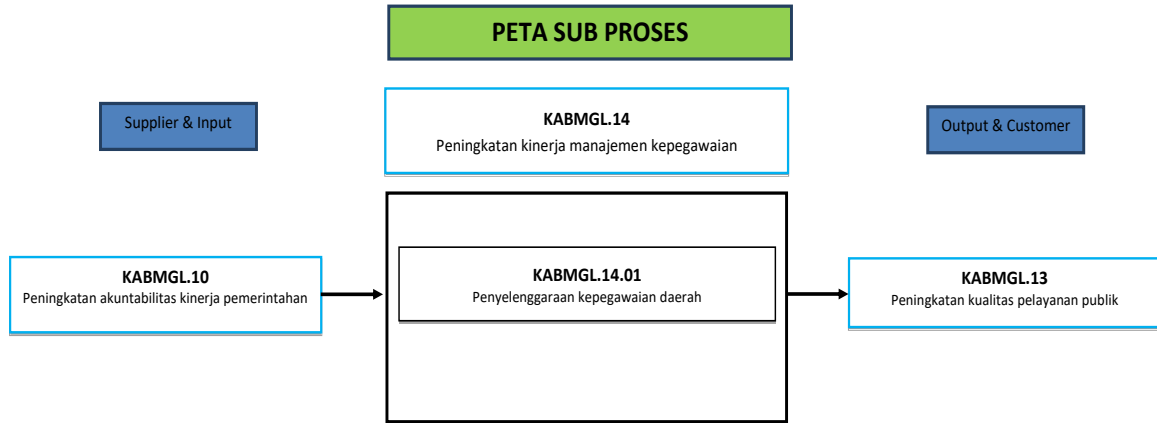
KABMGL.12.



KABMGL.13.



KABMGL.14.



BAB II ARSITEKTUR LAYANAN

Salah satu kemampuan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini, selain terdapat beberapa layanan aplikasi dan dukungan infrastruktur teknologi, Pemerintah Kabupaten Magelang juga telah memiliki standar layanan yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/471/KEP/01.08/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024. Di dalam Keputusan Bupati tersebut terdapat deskripsi terkait layanan yang ada di Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Standar pelayanan merupakan implementasi dari strategi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Magelang yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi birokrasi instansi daerah.

Standar pelayanan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan, sementara penerapan dari setiap kategori pelayanan tersebut melibatkan dan menjadi tanggung jawab dari setiap unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terdapat dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2021 tentang SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi Umum tersebut terdiri dari:

- a. aplikasi perencanaan;
- b. aplikasi penganggaran;
- c. aplikasi pengadaan barang dan jasa;
- d. aplikasi akuntabilitas kinerja;
- e. aplikasi pemantauan dan evaluasi;
- f. aplikasi kearsipan;
- g. aplikasi kepegawaian; dan
- h. aplikasi pengaduan pelayanan publik;

A. Inisiatif Strategis Layanan SPBE

Inisiatif Strategis SPBE adalah pedoman umum terhadap pelaksanaan SPBE dan merupakan uraian lebih rinci dari Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan Kabupaten Magelang untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Nasional. Dalam konteks layanan SPBE, inisiatif strategis dikembangkan untuk mewujudkan sasaran layanan SPBE sebagai turunan dari sasaran SPBE secara menyeluruh, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1.

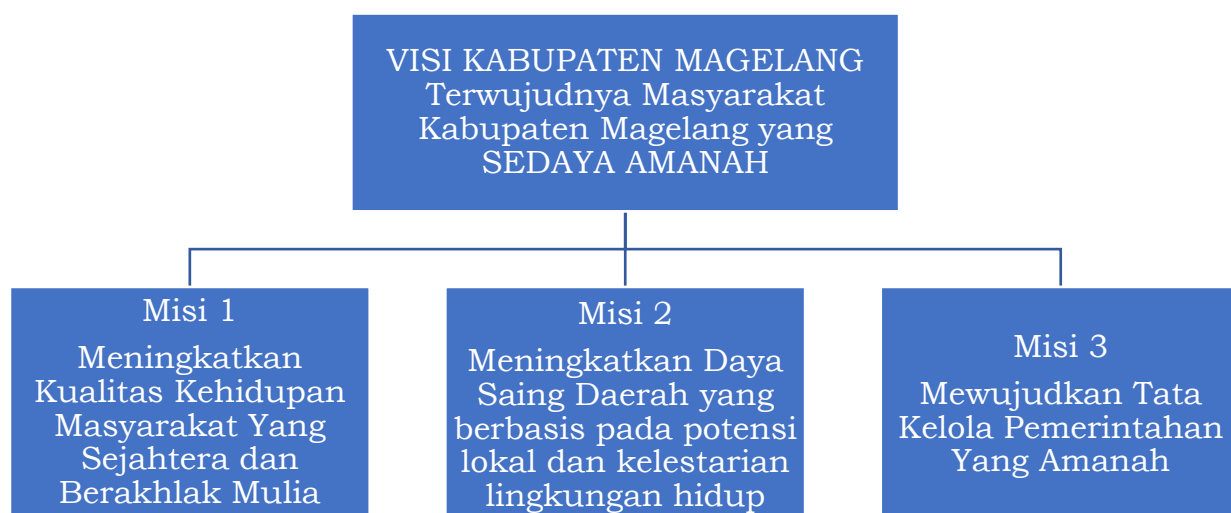


Gambar 1. 1.Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan SDI

Inisiatif sasaran strategis layanan SPBE terdiri dari daftar pekerjaan solusi berupa layanan aplikasi pemerintahan yang pelaksanaannya direalisasikan ke dalam tahapan peta jalan dan terkait dengan kapabilitasnya. Daftar pekerjaan solusi adalah kumpulan kapabilitas yang akan datang, yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE dan dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE. Daftar pekerjaan solusi juga merupakan bagian dari elemen Inisiatif Strategis SPBE, yang mengindikasikan inisiatif strategis bagian dari Layanan Aplikasi Pemerintah. Layanan aplikasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah diterapkan di beberapa proses utama dan pendukungnya, namun untuk menentukan kapabilitas kebutuhan layanan yang akan datang, perlu diidentifikasi secara rinci dengan melakukan pemetaan terhadap atribut Metadata Arsitektur Layanan SPBE.

1. Pemetaan Layanan

Berdasarkan arahan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/471/KEP/01.08/2023 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan pemodelan Visi dan Misi seperti tampak pada Gambar 1. Dan penjelasan Peta Proses Bisnis pada Gambar 2, Pemkab Magelang memetakan 9 (sembilan dan 6 (satu) Sistem Manajerial pada gambar 2, 3 dan 4. Dan gambaran Peta proses bisnis utama Kabupaten Magelang pada gambar 1.2.



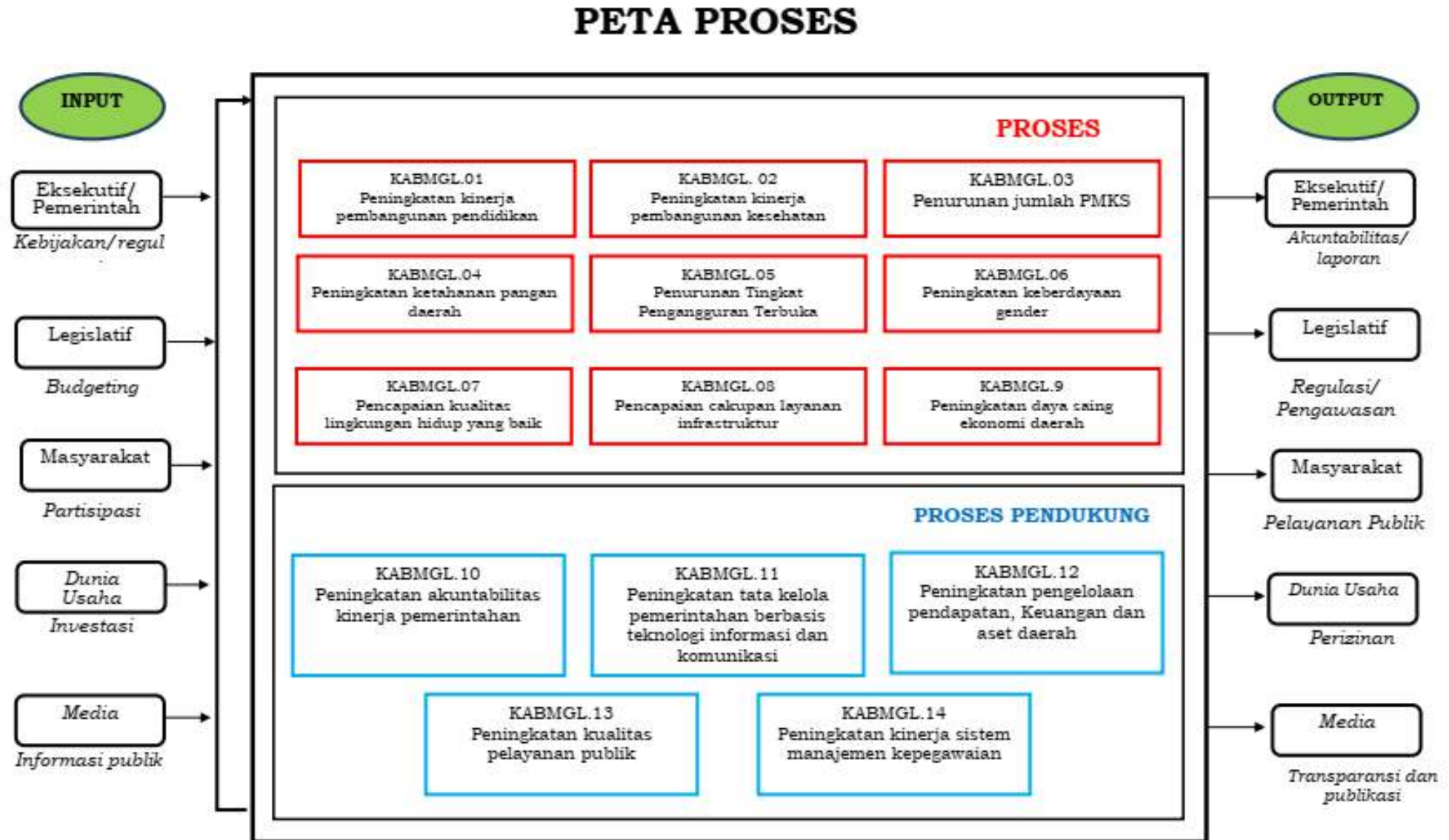
Gambar 1.3. Proses Utama

KABMGL.01	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan
KABMGL.02	Peningkatan kinerja pembangunan kesehatan
KABMGL.03	Penurunan jumlah PMKS
KABMGL.04	Peningkatan ketahanan pangan daerah
KABMGL.05	Penurunan tingkat pengangguran terbuka
KABMGL.06	Peningkatan keberdayaan gender
KABMGL.07	Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang baik
KABMGL.08	Pencapaian cakupan layanan infrastruktur
KABMGL.09	Peningkatan daya saing ekonomi daerah

Gambar 1.4. Proses Pendukung

KABMGL.10	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
KABMGL.11	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis TIK
KABMGL.12	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan aset daerah
KABMGL.13	Peningkatan kualitas pelayanan publik
KABMGL.14	Penurunan kinerja sistem manajemen kepegawaian

Gambar 1.5. Peta Proses Bisnis Utama



Tabel 1.1 Pemetaan Layanan Berdasarkan Proses Bisnis Pemerintahan Kabupaten Magelang

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL.01	KABMGL.01.01		RAL.01	RAL.01.31	Legalisir Ijazah SD, SMP, Kesetaraan	Disdikbud	Publik
Peningkatan kinerja pembangunan	Pengelolaan Pendidikan	Non Elektronik	Layanan Publik	Pendidikan	Pengajuan Rekomendasi Pindah / Mutasi Sekolah	Disdikbud	Publik
					Legalisir Sertifikat Kegiatan Disdikbud	Disdikbud	Publik
					Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/SKHUN SD, SMP, Kesetaraan	Disdikbud	Publik
					Pengajuan Surat Keterangan Ijazah/SKHUN Rusak SD, SMP, Kesetaraan	Disdikbud	Publik
					Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/SKHUN SD, SMP, Kesetaraan Kesetaraan	Disdikbud	Publik
					Izin Operasional Pendirian PAUD	Disdikbud	Publik
				Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP	Disdikbud	Publik	
				Pengajuan NPSN	Disdikbud	Publik	

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengajuan Pengesahan Dokumen Kurikulum PAUD	Disdikbud	Publik
					Pengajuan Pengesahan Dokumen Kurikulum SD	Disdikbud	Publik
					Pengajuan Pengesahan Dokumen Kurikulum SMP	Disdikbud	Publik
	KABMGL.01.02		RAL.01		Pengajuan NUPTK	Disdikbud	Publik
	Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	Non Elektronik	Layanan Publik		Pengajuan SK Kenaikan Pangkat (KP)	Disdikbud	Publik
					Pengajuan Usulan Pensiun	Disdikbud	Publik
					Pengajuan Cuti Pegawai	Disdikbud	Publik
	KABMGL.01.06		RAL.01	RAL.01.31			
	Pengembangan Kebudayaan	Non Elektronik	Layanan Publik	Pendidikan	Surat Rekomendasi Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan	Disdikbud	Publik
		Non Elektronik			Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya	Disdikbud	Publik
	KABMGL.01.07		RAL.01	RAL.01.31			
	Pengembangan kesenian tradisional	Non Elektronik	Layanan Publik	Pendidikan	Surat Keterangan Izin Organisasi Kesenian	Disdikbud	Publik
KABMGL.02	KABMGL.02.01		RAL.01	RAL.01.25			

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Kinerja Pembangunan Kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Non Elektronik	Layanan Publik	Kesehatan	Pelayanan Gawat Darurat	Dinkes	Publik
					Pelayanan penjagaan medis	Dinkes	Publik
					Pelayanan Rujukan	Dinkes	Publik
					Pelatihan (edukasi) P3K bagi masyarakat	Dinkes	Publik
	KABMGL.02.02					Dinkes	Publik
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Non Elektronik			Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik			Pelayanan rekomendasi izin operasional klinik	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi izin operasional puskesmas	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	Dinkes	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Dokter Internsip (SIPDI)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	Dinkes	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi Lingkungan	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Tukang Gigi	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SIPTPKIP)	Dinkes	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Dokter Umum (SIPDU)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Dokter Spesialis	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIPDG)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Elektromedis (SIPE)	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah (SIPTPD)	Dinkes	Publik
	KABMGL.02.03						
	Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Non Elektronik		Kesehatan	Penilaian kesesuaian standar Apotek	Dinkes	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Non Elektronik		Kesehatan	Penilaian kesesuaian standar usaha toko obat	Dinkes	Publik
		Non Elektronik		Kesehatan	Pengawasan Pemenuhan komitmen usaha produksi pangan olahan industri rumah tangga	Dinkes	Publik
		Non Elektronik			Pelayanan rekomendasi Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	Dinkes	Publik
	KABMGL. 02.06						
	Pembinaan Keluarga Berencana	Non Elektronik		Kesehatan	Fasilitasi pelayanan KB & Kesehatan Reproduksi	Dinkes	Publik
	KABMGL. 02.07						
	Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera	Non Elektronik		Kesehatan	Pengaduan Program Bantuan Sosial (KIS, PKH, Sembako, BLT DBHCHT, BLT BBM)	Dinkes	Publik
KABMGL.03	KABMGL. 03.02		RAL.01	RAL.01.26			
Penurunan jumlah PMKS	Penyediaan rehabilitasi sosial	Non Elektronik	Layanan Publik	Sosial	Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial	DinsosPPKBPPPA	Publik
		Non Elektronik	Layanan Publik	Sosial	Asistensi Penyandang Disabilitas	DinsosPPKBPPPA	Publik
	KABMGL. 03.03						

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Non Elektronik	Layanan Publik	Sosial	Asistensi Orang Terlantar	DinsosPPKBPPPA	Publik
		Non Elektronik	Layanan Publik	Sosial	Pengangkatan Anak	DinsosPPKBPPPA	Publik
		Non Elektronik	Layanan Publik	Sosial	Asistensi Lanjut Usia	DinsosPPKBPPPA	Publik
		Non Elektronik	Layanan Publik	Sosial	Surat Keterangan Mobil Layanan Sosial (Ambulance)	DinsosPPKBPPPA	Publik
KABMGL.06	KABMGL.06.02		RAL.01	RAL.01.27			
Peningkatan Keberdayaan Gender	Perlindungan Perempuan	Non Elektronik	Layanan Publik	Pemberdayaan Perempuan	Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	DinsosPPKBPPPA	Publik
	KABMGL.06.04						
	Perlindungan Kasus Anak	Non Elektronik			Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum	DinsosPPKBPPPA	Publik
KABMGL.07	KABMGL.07.-01		RAL.01	RAL.01.40			
Pencapaian Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Non Elektronik	Layanan Publik	Lingkungan Hidup	Pelayanan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga	DLH	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KABMGL.07.-02						
	Perencanaan Lingkungan Hidup	Non Elektronik			Pelayanan Laboratorium Lingkungan	DLH	Publik
					Pelayanan Persetujuan lingkungan	DLH	Publik
					Pelayanan Pemanfaatan Lapangan / Taman Ruang Terbuka Hijau	DLH	Publik
KABMGL.08	KABMGL 08.11						
Pencapaian Cakupan Layanan Infrastruktur	Pengembangan Perumahan	Non Elektronik			Pelayanan Konsultasi Siteplan	DPRKP	Publik
	KABMGL 08.12						
	Pengembangan Kawasan Permukiman	Non Elektronik			Pelayanan Konsultasi Siteplan	DPRKP	Publik
	KABMGL.8.17						
	Penyelenggaraa n Lalu lintas dan angkutan jalan				Pengujian Kendaraan Bermotor	DINAS PERHUBUNGAN	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Non Elektronik			Pelayanan Ijin Trayek	DINAS PERHUBUNGAN	Publik
					Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	DINAS PERHUBUNGAN	Publik
KABMGL.09	KABMGL.09.01						
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Non Elektronik			Layanan Trantibum	SATPOL PP & PK	
	KABMGL.09.02						
	Penanggulangan bencana	Non Elektronik			Layanan Penyediaan air bersih warga terdampak kekeringan	BPBD	Publik
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD	Publik
					Penanganan darurat bencana	BPBD	Publik
	KABMGL.09.03						
	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakarandan penyelamatan non kebakaran	Non Elektronik			Layanan Pemadam Kebakaran	SATPOL PP & PK	

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KABMGL.09.05						
	Peningkatan kerjasama desa	Non Elektronik			Layanan Konsultasi Kerjasama Antar Desa dan Kawasan Perdesaan	Dispermades	
	KABMGL.09.06						
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Non Elektronik			Pemilihan Kepala Desa	Dispermades	Publik
					Tata Cara Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan dan Perangkat Desa	Dispermades	Publik
					Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dispermades	Publik
					Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dispermades	Publik
					Program Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan	Dispermades	Publik
					Program Pengelolaan Pasar Desa	Dispermades	Publik
					Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dispermades	Publik
	KABMGL.09.07						

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat				Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Dispermades	Publik
	KABMGL.09.09						
	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi				Penyuluhan Pendirian Koperasi	Disdagkop UMKM	
					Sertifikasi Nomor induk Koperasi	Disdagkop UMKM	
	KABMGL.09.13						
	Pemberdayaan UMKM				Fasilitasi UMKM	Disdagkop UMKM	
	KABMGL.09.14						
	Pengembangan UMKM				Pendampingan pelatihan dan sosialisasi UMKM	Disdagkop UMKM	
	KABMGL						
	KABMGL.09.17						
	Pelayanan Penanaman Modal				Layanan Giat Rimba (Kegiatan Monitoring Nomor Induk Berusaha))	DPMPSTSP	

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					layanan sikelana (Siap keliling layanan perizinan	DPMPTSP	
	KABMGL.09.20						
	Pengelolaan Perikanan Budi Daya				Pelayanan Penyediaan Benih Ikan	Dispeterikan	Publik
	KABMGL.09.29						
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				Pelayanan pembinaan dan pendampingan teknis dan kelembagaan bidang peternakan dan perikanan	Dispeterikan	Publik
					Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	Dispeterikan	Publik
					Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH)	Dispeterikan	Publik
	KABMGL.09.33						
	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Elektronik			Pelayanan OSS Penerbitan Nomor Induk Berusaha	DPMPTSP	
	KABMGL.09.36						

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Ekspor	Non Elektronik			Surat Keterangan Permohonan Ekspor	Disdagkop UMKM	
	KABMGL.09.37						
	Pelayanan standarisasi dan perlindungan konsumen	Non Elektronik			Layanan Tera, Tera Ulang, UTTP Metrologi	Disdagkop UMKM	
	KABMGL.09.43						
	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Non Elektronik			Sistem Informasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	
KABMGL.10	KABMGL.10.01						
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				Layanan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bag. Pemerintahan	
					Layanan Konsultasi Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan	
					Layanan konsultasi Sengketa Pertanahan	Bagian Pemerintahan	

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Layanan Fasilitas Hibah Daerah	Bagian Pemerintahan	
					JDIH(Pelayanan Web Produk Hukum)	Bagian Hukum	
					OLC(Online legal Consultation)	Bagian Hukum	
					Si Sunan Dukuh (Layanan Penyusunan Produk Hukum)	Bagian Hukum	
	KABMGL.10.02						
	Perekonomian dan Pembangunan				Layanan Fasilitas DBHCHT	Bagian Perekonomian	
					Layanan Pembinaan BUMD	Bagian Perekonomian	
					Layanan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Bagian Perekonomian	
					Fasilitas Lomba Desa Mandiri Energi	Bagian Perekonomian	
					Pelayanan Konsultasi Juklak Kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan	
					Pelayanan Pelaporan realisasi Fisik & Keuangan Pelaksanaan APBD	Bagian Administrasi Pembangunan	

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa	
	KABMGL 10.03						
	Penyelenggaraa n Dukungan Pelaksanaan Tugas & fungsi DPRD				Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja;	DPRD	Publik
					Pelayanan Pemrosesan PAW (Pengganti Antar Waktu)	DPRD	Publik
					Pelayanan Pemrosesan Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD	DPRD	Publik
					Pelayanan Pemrosesan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Magelang	DPRD	Publik
					Pelayanan keprotokolan Sekretariat DPRD	DPRD	Publik
					Pelayanan Fasilitas Penyelenggaraan Rapat- Rapat;	DPRD	Publik
					Pelayanan pelaksanaan Reses Pimpinan/ Anggota DPRD	DPRD	Publik
	KABMGL 10.04						

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				Verifikasi Renja Perangkat Daerah	BAPPEDA	Publik
					Verifikasi Renstra Perangkat Daerah		
	KABMGL.10.05				E-pikir	BAPPEDA	Publik
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah				Verifikasi Renja Perangkat Daerah	BAPPEDA	Publik
					Verifikasi Renstra Perangkat Daerah		
	KABMGL 10.06						
	Penelitian dan Pengembangan Daerah				Pelayanan Klinik Penelitian	BAPPEDA	Publik
					Klinik Kekayaan Intelektual	BAPPEDA	Publik
	KABMGL 10.07						
	Penyelenggaraa n Pengawasan				Layanan Pengaduan Whitle blower	Inspektorat	Publik
					Layanan Konsultasi	Inspektorat	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Layanan Permintaan Data	Inspektorat	Publik
	KABMGL.10.08						
	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi				Layanan Pendampingan	Inspektorat	Publik
KABMGL.11	KABMGL.11.01						
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis TIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	
	KABMGL.11.02						
	Pelayanan Aplikasai Informatika				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	
					Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kab. Magelang	Diskominfo	
	KABMGL 11.03						
	Layanan Penyelenggaraa				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	n Statistik Sektoral						
	KABMGL.11.04						
	Layanan penyelenggaraa n persandian untuk pengamanan informasi				Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi lingkup pemerintahan kabupaten / kota	Diskominfo	
KABMGL.12	KABMGL.12.01						
Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah				Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Perbandaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD	
	KABMGL.12.02						
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				Pelayanan Pemakaian Aset Daerah	BPPKAD	Publik
					Penyelenggaraan Keuangan Daerah	BPPKAD	Publik
					Penyelenggaraan Perbandaharaan Daerah	BPPKAD	Publik
	KABMGL 12.03						

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Pendapatan Daerah				Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD	Publik
KABMGL.13	KABMGL.13.01						
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pendaftaran Penduduk				Permohonanan Pencatatan Biodata Penduduk	Disdukcapil	Publik
					Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Disdukcapil	Publik
					Pelayanan Kartu Keluarga (KK)	Disdukcapil	Publik
					Surat Keterangan Batal Pindah Warga Negara Indonesia	Disdukcapil	Publik
					Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Negeri (SKPLN)	Disdukcapil	Publik
					Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Disdukcapil	Publik
					Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Disdukcapil	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Disdukcapil	Publik
					Pelayanan Aktivisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Disdukcapil	Publik
	KABMGL.13.02						
	Pencatatan Sipil				Pencatatan Kelahiran	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Perkawinan	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Pengangkatan Anak	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Pengakuan Anak	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Pengesahan Anak	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Perceraian	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Kematian	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Perubahan Nama	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA Menjadi WNI	Disdukcapil	Publik
					Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI Menjadi WNA	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau WNA	Disdukcapil	Publik
					Pencatatan Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran, yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan	Disdukcapil	Publik
					Pelayanan Integrasi Akta Kelahiran	Disdukcapil	Publik
					Pelayanan Integrasi Akta Kematian	Disdukcapil	Publik
					Pelayanan Integrasi Akta Perkawinan	Disdukcapil	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pelayanan Integrasi Akta Perceraian	Disdukcapil	Publik
	KABMGL.13.03						
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Pelayanan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan		
					Pelayanan Informasi dan Aduan Masyarakat		
					Pelayanan Penghapusan Data Biometrik		
					Pelayanan Data Bermasalah		
	KABMGL.13.04						
	Penyusunan Profil Kependudukan				Pelayanan Data Agregat		
	KABMGL.13.05						
	Pengelolaan Arsip				Layanan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis Pemerintah Daerah dan BUMD		
					Layanan Pembinaan dan pengawasan kearsipan		
					Layanan Peminjaman Arsip		

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Layanan Penataan Arsip		
					Jasa Perbantuan tenaga kersipan		
					Jasa Penyusunan Pedoaman kearsipan		
	KABMGL.13.06						
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				Layanan Pemusnahan Arsip		
					Layanan jasa alih media		
	KABMGL.13.09						
	Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	KABMGL.13.10						
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				Layanan konsultasi Kades, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
					Layanan Konsultasi Profil Desa dan Kelurahan, Evaluasi		

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perkembangan Desa dan Sistem Keuangan Desa		
KABMGL.14	KABMGL.14.01						
Peningkatan Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian	Penyelenggaraan Kepegawaian Daerah				Pembuatan Kartu Pegawai	BKPPD	Publik
					Pelayanan Kartu Isteri atau Kartu Suami	BKPPD	Publik
					Pengusulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	BKPPD	Publik
					Pengajuan Surat Rekomendasi Ijin Belajar/Tugas Belajar	BKPPD	Publik
					Pengajuan Surat Keputusan Tugas Belajar	BKPPD	Publik
					Surat Keterangan Ijin Belajar	BKPPD	Publik
					Surat Keterangan Belajar	BKPPD	Publik
					Surat Keterangan Memiliki Ijazah	BKPPD	Publik
					Surat Ijin Penggunaan Gelar Akademik	BKPPD	Publik
					Persyaratan Peserta Ujian Dinas	BKPPD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori	Unit Pelaksana	Target Layanan
					Layanan	Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Fasilitas Pengusulan Kenaikan Pangkat	BKPPD	Publik
					Fasilitasi Usul SK Pensiun	BKPPD	Publik
					Fasilitasi Layanan Pencetakan Daftar Gaji Pegawai	BKPPD	Publik
					Persyaratan Perceraian	BKPPD	Publik
					Mutasi Pegawai Negeri	BKPPD	Publik

2. Analisis Kesenjangan

Berdasarkan hasil pemetaan layanan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap kebutuhan Metadata Arsitektur SPBE, diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa sebagian proses bisnis pada telah menggunakan sistem berbasis elektronik, namun masih terdapat beberapa proses bisnis perlu peningkatan optimalisasi dukungan menggunakan aplikasi terintegrasi.

Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan untuk penyelarasan dengan kebutuhan pengembangan Arsitektur Layanan SPBE. Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki sistem pendukung berupa kelompok aplikasi yang difungsikan secara terpisah. Sistem dan aplikasi-aplikasi tersebut dikembangkan oleh lebih dari satu pengembang, yang meliputi internal maupun oleh pengembang pihak ketiga. Aktivitas pengembangannya dibuat atas dasar kebutuhan atau permintaan masing-masing unit kerja, sehingga dampak yang terjadi sistem dan aplikasi tersebut dibuat dalam berbagai platform, dan belum memiliki sistem penghubung layanan yang berfungsi untuk komunikasi dan interaksi antar aplikasi baik dalam pertukaran data maupun layanan. Keadaan ini menjadikan berbagai sistem tersebut berdiri sendiri (*stovepipe*), sehingga layanan yang diberikan untuk fungsionalitas setiap unit kerja belum sepenuhnya terintegrasi. Pengguna layanan harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan prosedur dan validasi yang harus dilakukan beberapa kali.

Selain itu, dari data layanan yang ada saat ini, diperlukan pengelompokan yang berupa kodefikasi layanan berdasarkan kategori, tujuan dan fungsinya menjadi sub kategori untuk kebutuhan metadata layanan Pemerintah Kabupaten Magelang. Sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 4 IPPD perlu didefinisikan dengan cara mengurai unsur kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 IPPD secara lebih rinci. Pendefinisian sub kategori layanan ini dapat dilakukan dengan menetapkan dukungan kinerjanya dan penurunan hambatannya (*utility*), serta pendefinisian komponen asetnya (*service assets*). Kebutuhan ini dapat diwujudkan melalui pengklasifikasian layanan untuk menetapkan metadata dan tipe layanan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dapat memenuhi seluruh fungsi yang ada di organisasi secara terintegrasi.

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang telah teridentifikasi, maka dapat disimpulkan pekerjaan solusi sebagai kumpulan kapabilitas ke depan yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE, serta dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE di Pemerintah Kabupaten Magelang adalah:

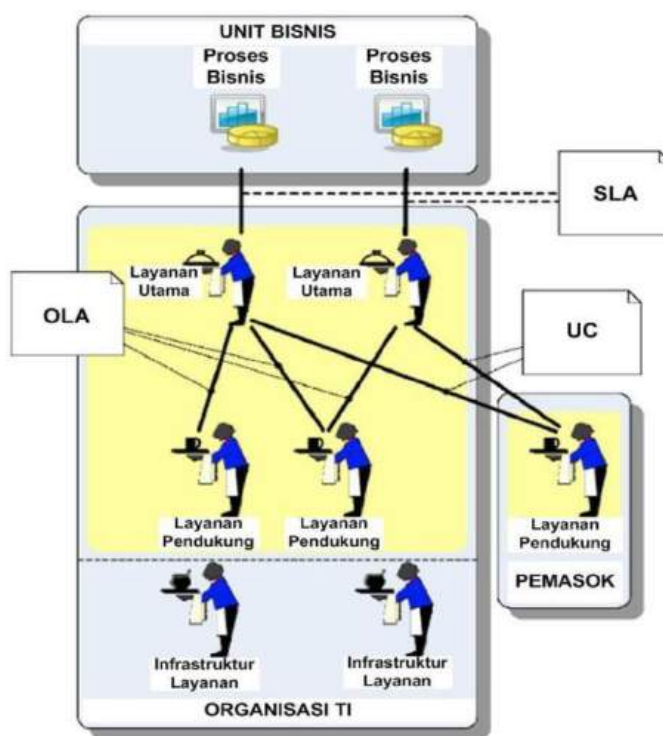
1. Perlu dirancang penyediaan layanan untuk perumusan kebijakan sebagai area layanan dukungan operasional organisasi dan area layanan lainnya yang relevan.
2. Pemerintah Kabupaten Magelang sebaiknya membuka layanan helpdesk yang bertugas untuk memberi penjelasan dan menjawab pertanyaan dari seluruh instansi yang sedang melaksanakan kegiatan.
3. Pemenuhan kategori dan sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 dan 4 referensi arsitektur SPBE tingkat IPPD, dapat diidentifikasi melalui penetapan dukungan kinerja dan penurunan hambatan (*utility*), serta pengelolaan tingkat layanan (*warranty*), termasuk kebutuhan komponen asetnya (*service assets*).
4. Setiap ragam layanan yang ada pada proses utama dan pendukung, perlu dilakukan pengelompokan atau klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses evaluasi terhadap layanan Kabupaten Magelang yang didukung oleh sistem secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE. Selain itu, juga dapat menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi berdasarkan domain

proses bisnisnya masing-masing, serta perlunya ketersediaan sistem perbaikan versi layanan untuk kebutuhan layanan masa depan.

3. Metadata dan Tipe Layanan

Kapabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, seperti organisasi, orang, ataupun sistem yang ada di lingkungan Kabupaten Magelang untuk keberhasilan realisasi Layanan SPBE secara digital. Kapabilitas layanan diwujudkan dengan cara pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan. Bentuk konkritnya berupa klasifikasi dan identifikasi layanan berdasarkan proses utama dan pendukung di Kabupaten Magelang untuk mendefinisikan hasil berupa kebutuhan aplikasi, fungsi aplikasi dan komponen aplikasi atau dukungan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Target dari hasil akumulasi setiap elemen dalam tahapan peta jalan adalah dapat terealisasinya Visi, Misi SPBE, arah kebijakan SPBE, tujuan SPBE, dan sasaran SPBE sebagai acuan kapabilitas serta mempengaruhi inisiatif strategis, yang berujung pada (a) Layanan Publik dan (b) Layanan Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Cetak Biru (Blue Print) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kapabilitas layanan SPBE memerlukan kombinasi organisasi dan aset yang berbeda, seperti SDM, proses, dan teknologi untuk dicapai, sehingga dapat mewujudkan tujuannya. Kapabilitas SPBE yang masih abstrak kemudian direalisasikan oleh komponen teknis yang bersifat lebih konkret. Dalam konteks penyediaan layanan di Kabupaten Magelang, kebutuhan ini dapat didefinisikan melalui pemetaan unsur organisasi dan asetnya secara rinci dan menyeluruh dalam Daftar Pekerjaan Solusi sebagai Inisiatif Strategis Layanan SPBE. Berdasarkan pemetaan unsur organisasi secara rinci dan menyeluruh, fungsi dan proses bisnis Kabupaten Magelang diklasifikasikan seperti terlihat pada Gambar 3. Proses klasifikasi ini tujuannya adalah untuk menetapkan utility bagi penyediaan layanan, serta dukungan terhadap customer assets dan penyebaran *service assets*.



Gambar 1.6. Klasifikasi Layanan Kabupaten Magelang

Berdasarkan proses klasifikasi tersebut, dapat teridentifikasi layanan yang harus disediakan untuk setiap proses bisnis di dalam setiap unit bisnis Kabupaten Magelang. Metode klasifikasi ini juga digunakan untuk penetapan service level agreements (SLA), operational level agreements (OLA) dan underpinning contract (UC) untuk pengelolaan tingkat layanan (warranty). Setiap layanan yang teridentifikasi ditetapkan dukungan kinerjanya atau penurunan hambatannya (utility) melalui penetapan kategori dan sub kategori layanan, serta komponen lainnya (service assets). Setiap service assets berupa aplikasi, data, infrastruktur, keamanan, beserta rincian setiap komponennya akan dibahas pada Bab selanjutnya laporan ini. Penetapan metadata dan tipe layanan di lingkungan Kabupaten Magelang didefinisikan berdasarkan klasifikasi dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari empat Tingkat.

Domain Layanan, mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional. Area Layanan, menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Kategori Layanan menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD (Kabupaten Magelang) sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga).

Sub Kategori Layanan menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD (Kabupaten Magelang) pada tingkatan struktur ini dapat menyusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibuat kodifikasi yang disesuaikan dengan proses bisnisnya dan referensi arsitektur layanan SPBE Nasional. Rekomendasi kodifikasi layanan Kabupaten Magelang sebagai penamaan konfigurasi layanan SPBE adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Metadata Layanan Kabupaten Magelang

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL 01.01. CFM.01	Pengelolaan Pendidikan SD	Disdikbud	Pendidikan	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL 01.01. CFM.02	Pengelolaan Pendidikan SMP	Disdikbud	Pendidikan	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 01.01. CFM.03	Pengelolaan pendidikan anak Usia Dini	Disdikbud	Pendidikan	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 01.01. CFM.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Disdikbud	Pendidikan	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 01.02. CFM.01	Pemerataan kuantitas dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Disdikbud	Pendidikan	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL . 01.03. CFM.01	Penyadaran Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda & Kepemudaan	Disdikbud	Pendidikan	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.01.06. CFM.01	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota	Disdikbud	Pendidikan	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.01.06. CFM.02	Pelestarian Kesenian Tradisioanl yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota	Disdikbud	Pendidikan	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 01.08. CFM.01	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	DISDIKBUD	Pendidikan	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan pendidikan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.02.01. CFM.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL.02.01.CFM.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.02.01.CFM.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.02.01.CFM.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.02.02.CFM.01	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/ kota	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.02.02.CFM.02	Pengendalian perizinan praktik tenaga Kesehatan	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL.02.03. CFM.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.02.03. CFM.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.02.06. CFM.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL.02.06. CFM.02	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.02.06. CFM.03	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DINKES	KESEHATAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan kinerja pembangunan Kesehatan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.03.02 CFM.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINSOS PPKB PPPA	SOSIAL	Publik	Non elektronik	Penurunan Jumlah PMKS	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL. 03.03. CFM.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	DINSOS PPKB PPPA	SOSIAL	Publik	Non elektronik	Penurunan Jumlah PMKS	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 03.03. CFM.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS PPKB PPPA	SOSIAL	Publik	Non elektronik	Penurunan Jumlah PMKS	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 03.04. CFM.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DINSOS PPKB PPPA	SOSIAL	Publik	Non elektronik	Penurunan Jumlah PMKS	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 04.03. CFM.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PERTANIAN	Publik	Non elektronik	Peningkatan Ketahananana Pangan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 05.01. CFM.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	KETENAGAKERJAAN	Publik	Non Elektronik	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 05.02. CFM.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	KETENAGAKERJAAN	Publik	Non Elektronik	Penempatan tenaga kerja	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL. 05.02. CFM.03	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	KETENAGAKERJAAN	Publik	Non Elektronik	Penempatan tenaga kerja	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 05.04. CFM.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	KETENAGAKERJAAN	Publik	Non Elektronik	Pembangunan kawasan transmigrasi	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.06.02 CFM.01	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten / Kota	DINSOS PPKB PPPA	SOSIAL	Publik	Non elektronik	Penurunan Jumlah PMKS	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.06.04 CFM.01	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS PPKB PPPA	SOSIAL	Publik	Non elektronik	Penurunan Jumlah PMKS	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL.07.01 CFM.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Publik	Non elektronik	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.07.02 CFM.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Publik	Non elektronik	Perencanaan lingkungan hidup	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 07.05. CFM.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Publik	Non elektronik	Pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 07.05. CFM.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Publik	Non elektronik	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 07.10. CFM.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Publik	Non elektronik	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						
KABMGL. 07.11. CFM.01	Pengelolaan Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Publik	Non elektronik	Pengembangan persampahan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.08.12 CFM.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	DPRKP	LAYANAN INFRASTRUKTUR	Publik	Non elektronik	Pengembangan Kawasan Permukiman	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 09.04. CFM.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	DISPERMAD ES	DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Publik	Non elektronik	Penataan Desa	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.09.06. CFM 01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DISPERMAD ES	DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 09.09. CFM.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	DISDAGKOP UKM	DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Publik	Non elektronik	Koperasi	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
KABMGL. 09.11. CFM.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	DISDAGKOP UKM	DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Publik	Non elektronik	Koperasi	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 09.14. CFM.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	DISDAGKOP UKM	DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Publik	Non elektronik	Usaha Kecil dan Menengah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 09.17. CFM.01	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	DPMPTSP	DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Publik	Non elektronik	Investasi	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.09.20 CFM.02	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	DISPETERIKAN	DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Publik	Non elektronik	Pengelola Perikanan Budidaya	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL.10.01.CFM.01	Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.10.01.CFM.02	Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.10.02.CFM.04	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.10.03.CFM.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	DPRD	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.10.03.CFM.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	DPRD	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL.10.03. CFM.07	Fasilitasi Tugas DPRD	DPRD	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 10.06. CFM.04	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	BAPPEDA & LITBANGDA	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 10.04. CFM.01	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BAPPEDA & LITBANGDA	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 11.01. CFM.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis TIK	Publik	Non elektronik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 11.02. CFM.02	Pengelolaan e government di lingkup pemerintahan kabupaten / kota	DISKOMINFO	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis TIK	Publik	elektronik	Pelayanan aplikasi informatika	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL. 11.03. CFM.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis TIK	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan statistik sektoral	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KAB.MGL.11.04. CFM.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	DISKOMINFO	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis TIK	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 12.01. CFM.01	Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Publik	Non elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 12.01. CFM.02	Penyelenggaraan Koordinasi dan Perbendaharaan Rencana Anggaran Daerah	BPPKAD	PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Publik	Non elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL. 12.01. CFM.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
KABMGL.12.02 CFM.01	Pengelolaan BMD	BPPKAD	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.12.03 CFM.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	Publik	Non elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.13.01. CFM.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Publik	Non elektronik	Pendaftaran Penduduka	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.13.02. CFM.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Publik	Non elektronik	Pencatatan Sipil	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.13.03. CFM.01	Pengumpulann Data Kependudukan dan pemanfaatan an Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapil	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Publik	Non elektronik	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.13.04. CFM.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapil	PENINGKATAN KUALITAS	Publik	Non elektronik	Pengelolaan Profil Kependudukan	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

KODE	NAMA LAYANAN	UNIT PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN (RAB LEVEL 2)	TARGET LAYANAN	METODE LAYANAN	PROSES	RAL LEVEL 1
1	2	3	4	5	6	7	8
			PELAYANAN PUBLIK				
KABMGL.14.01 CFM.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPPD	PENINGKATAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan Kepegawaian Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.14.01 CFM.02	Pelaksanaan Mntasi dan Promosi ASN	BKPPD	PENINGKATAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan Kepegawaian Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.14.01 CFM.03	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPPD	PENINGKATAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan Kepegawaian Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK
KABMGL.14.01 CFM.04	Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	PENINGKATAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	Publik	Non elektronik	Penyelenggaraan Kepegawaian Daerah	RAL 01. LAYANAN PUBLIK

Pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE salah satunya dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, penerapan manajemen layanan, serta teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran. Semuanya merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan di Kabupaten Magelang. Pembahasan kebutuhan ini akan diuraikan secara rinci pada bagian kondisi yang diinginkan dalam laporan ini.

B. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi layanan yang diinginkan di Kabupaten Magelang didefinisikan untuk mewujudkan inisiatif strategis SPBE, yaitu direalisasikan melalui daftar pekerjaan berupa produk rilis aplikasi untuk mendukung layanan SPBE. Targetnya adalah tercapainya keterpaduan dan keterhubungan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga terbentuk satu kesatuan pemerintahan yang terintegrasi serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dalam konteks layanan, requirement untuk mewakili persyaratan dalam mewujudkan sebuah tujuan kondisi yang diinginkan untuk SPBE adalah:

"Kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah".

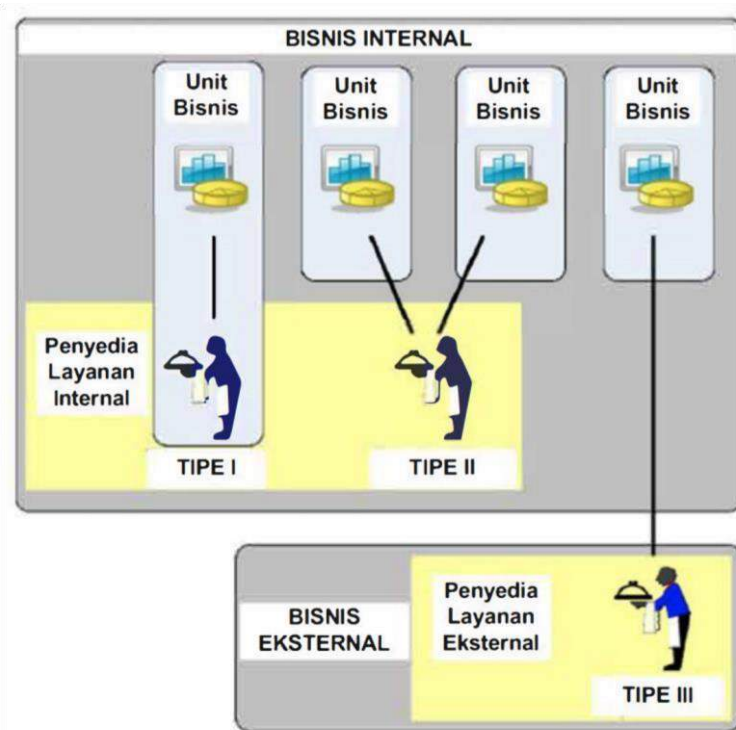
1. Penyedia Layanan

Berdasarkan Perpres Nomor 95 tahun 2018, layanan SPBE terdiri dari dua layanan, yaitu Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan. Layanan ini merupakan perwujudan aplikasi yang didefinisikan secara eksplisit serta merepresentasikan fungsionalitas komponen terhadap lingkungannya. Fungsionalitas ini dapat diakses melalui satu atau lebih antarmuka layanan yang disediakan oleh penyedia layanan dan diatur dalam pengelolaan tingkat layanan. Model pengelolaan tingkat layanan dapat meliputi kebijakan *service level management* (SLM) yang berhubungan dengan proses perencanaan, koordinasi, penyusunan, persetujuan, pemantauan, dan pelaporan, terdiri dari:

- a. Pengelolaan *service level agreements* (SLA), yaitu perjanjian tertulis diantara penyedia layanan dan pelanggan, yaitu mendefinisikan target layanan utama dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. SLM berfungsi untuk memastikan semua target dan tindakan yang telah disepakati dalam SLA dengan bisnis yang didukung oleh *operational level agreements* (OLA).
- b. Pengelolaan OLA, yaitu perjanjian antara penyedia layanan dan bagian lainnya dalam organisasi yang sama, tujuannya membantu penyediaan persyaratan layanan. OLA berisi target yang mendasari SLA, memastikan target tidak dilanggar oleh kegagalan aktifitas pendukung.
- c. Pengelolaan *underpinning contract* (UC), merupakan sebuah perjanjian dengan penyedia layanan eksternal dalam tingkatan tertentu.

Pengelolaan SLA, OLA dan UC diimplementasikan sebagai suatu proses pengelolaan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan tingkat layanan di Kabupaten Magelang. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi tipe penyedia layanan untuk penetapan SLA, OLA dan UC, dengan cara melakukan pengelompokan penyedia layanan kedalam 3 (tiga) tipe penyedia layanan, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Ketiga tipe penyedia layanan tersebut, adalah:

1. tipe I, adalah penyedia layanan internal Kabupaten Magelang;
2. tipe II, adalah layanan Kabupaten Magelang yang digunakan secara Bersama; dan
3. tipe III, adalah penyedia layanan eksternal yang terkait dengan layanan Kabupaten Magelang, yaitu Kominfo (Infrastruktur dan Aplikasi), PPN/Bappenas (Data), Badan Siber dan Sandi Negara/ BSSN (Keamanan).



Gambar 1.8. Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan

Berdasarkan hasil klasifikasi tipe layanan, pengelompokan penyedia layanan untuk kebutuhan pengelolaan tingkat layanan di Kabupaten Magelang seperti dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan Kabupaten Magelang

KODE LAYANAN	NAMA LAYANAN	TYPE PENYEDIA LAYANAN
1	2	3
KABMGL.01.01.CFM.01	Pengelolaan Pedidikan SD	Type I/Type II
KABMGL.01.01.CFM.02	Pengelolaan Pendidikan SMP	Type I/Type II
KABMGL.01.01.CFM.03	Pengelolaan pendidikan anak Usia Dini	Type I/Type II
KABMGL.01.01.CFM.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Type I/Type II
KABMGL.01.02.CFM.01	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga Kependidikan satuan pendidikan dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Type I/Type II
KABMGL.01.03.CFM.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan	Type I/Type II

KODE LAYANAN	NAMA LAYANAN	TYPE PENYEDIA LAYANAN
1	2	3
	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	
KABMGL.01.06.CFM.01	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota	Type I/Type II
KABMGL.01.06.CFM.02	Pelestarian Kesenian Tradisioanl yang masyarakatpelakunya dalamdaerah Kab/Kota	Type I/Type II
KABMGL.02.01.CFM.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Type I/Type II
KABMGL.02.01.CFM.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Type I/Type II
KABMGL.02.01.CFM.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Type I/Type II
KABMGL.02.01.CFM.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Type I/Type II
KABMGL.02.02.CFM.01	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/ kota	Type I/Type II
KABMGL.02.02.CFM.02	Pengendalian perizinan praktik tenaga Kesehatan	Type I/Type II
KABMGL.02.03.CFM.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Type I/Type II
KABMGL.02.03.CFM.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Type I/Type II

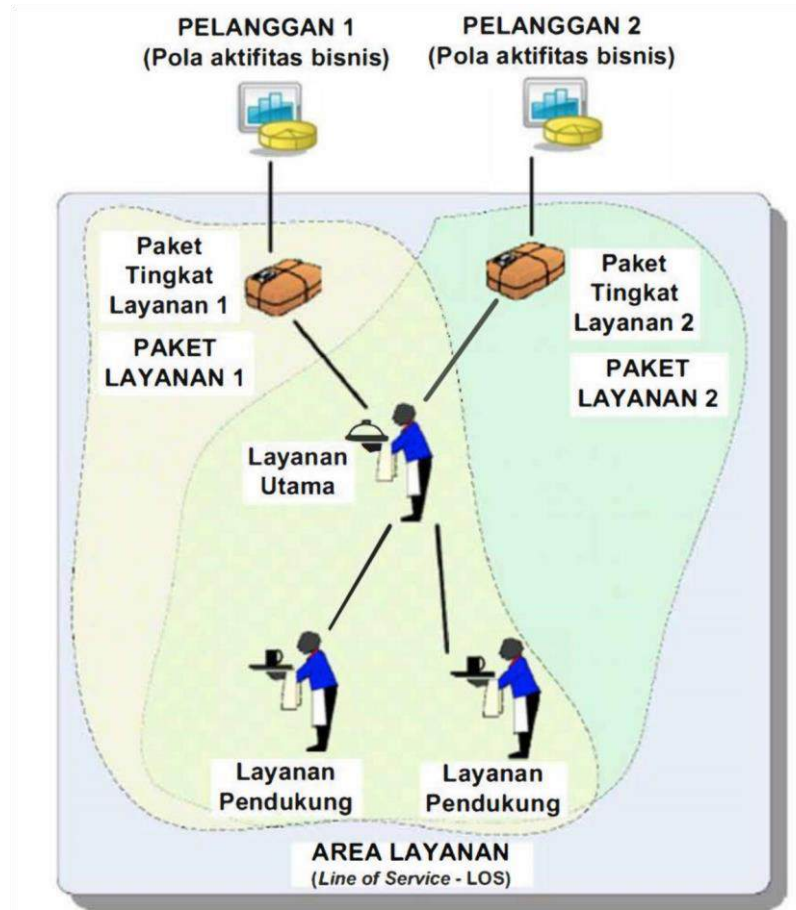
KODE LAYANAN	NAMA LAYANAN	TYPE PENYEDIA LAYANAN
1	2	3
KABMGL.02.06.CFM.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Type I/Type II
KABMGL.02.06.CFM.02	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Type I/Type II
KABMGL.02.06.CFM.03	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Type I/Type II
KABMGL.03.02.CFM.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Type I/Type II
KABMGL.06.02.CFM.01	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten / Kota	Type I/Type II
KABMGL.06.04.CFM.01	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Type I/Type II
KABMGL.07.01.CFM.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Type I/Type II
KABMGL.08.12.CFM.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Type I/Type II
KABMGL.09.04.CFM.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Type I/Type II

KODE LAYANAN	NAMA LAYANAN	TYPE PENYEDIA LAYANAN
1	2	3
KABMGL.09.06.CFM 01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Type I/Type II
KABMGL.09.20.CFM.02	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Type I/Type II
KABMGL.10.02.CFM.04	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Type I/Type II
KABMGL.10.03.CFM.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Type I/Type II
KABMGL.10.03.CFM.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Type I/Type II
KABMGL.10.03.CFM.07	Fasilitasi Tugas DPRD	Type I/Type II
KABMGL.10.06.CFM.04	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Type I/Type II
KABMGL.10.04.CFM.01	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Type I/Type II
KABMGL.11.01.CFM.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Type I/Type II
KABMGL.11.02.CFM.02	Pengelolaan e government di lingkup pemerintahan kabupaten / kota	Type I/Type II
KABMGL.11.03.CFM.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Type I/Type II
KAB.MGL.11.04.CFM.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Type I/Type II
KABMGL.12.01.CFM.01	Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Type I/Type II
KABMGL.12.01.CFM.02	Penyelenggaraan Koordinasi dan Perbendaharaan Rencana Anggaran Daerah	Type I/Type II

KODE LAYANAN	NAMA LAYANAN	TYPE PENYEDIA LAYANAN
1	2	3
KABMGL.12.01.CFM.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Type I/Type II
KABMGL.12.02.CFM.01	Pengelolaan BMD	Type I/Type II
KABMGL.12.03.CFM.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Type I/Type II
KABMGL.13.01.CFM.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Type I/Type II
KABMGL.13.02.CFM.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Type I/Type II
KABMGL.13.03.CFM.01	Pengumpulann Data Kependudukan dan pemanfaatan an Penyajian Database Kependudukan	Type I/Type II
KABMGL.13.04.CFM.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Type I/Type II
KABMGL.14.01.CFM.01	Pengadaaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Type I/Type II
KABMGL.14.01.CFM.02	Pelaksanaan Mntasi dan Promosi ASN	Type I/Type II
KABMGL.14.01.CFM.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Type I/Type II
KABMGL.14.01.CFM.04	Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	Type I/Type II

2. Paket Layanan

Mendefinisikan paket layanan tujuannya adalah untuk menetapkan pola layanan sebagai sebuah paket layanan. Hal ini dilakukan sebagai dukungan aktivitas dan jaminan keberlangsungan layanan (*warranty*) melalui pendefinisian paket tingkat layanan. Konsep dari pemaketan layanan di lingkungan Kabupaten Magelang seperti disajikan pada Gambar 1.9.



Gambar 1.9. Pemaketan Layanan Kabupaten Magelang

Berdasarkan hasil klasifikasi layanan dan tipe penyedia layanan, maka dilakukan pemaketan untuk menetapkan sub kategori layanan pendukung yang melekat ke dalam kategori layanan, atau menetapkan konsolidasi layanan yang dapat digunakan secara bersama melalui paket tingkat layanan yang berbeda, sesuai dengan pola aktivitas bisnis masing-masing pengguna seperti dapat dilihat pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8. Paket Layanan Kabupaten Magelang

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	2	3	4
1	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	KABMGL.01.01
		Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	KABMGL.01.02
		Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	KABMGL.01.03
		Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	KABMGL.01.04
		Pengembangan kapasitas kepramukaan	KABMGL.01.05
		Pengembangan kebudayaan	KABMGL.01.06
		Pengembangan kesenian tradisional	KABMGL.01.07
		Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	KABMGL.01.08

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	2	3	4
2	Kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	KABMGL.02.01
		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	KABMGL.02.02
		Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	KABMGL.02.03
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KABMGL.02.04
		Pengendalian penduduk	KABMGL.02.05
		Pembinaan keluarga berencana (KB)	KABMGL.02.06
		Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	KABMGL.02.07
3	Sosial	Pemberdayaan sosial	KABMGL.03.01
		Penyediaan rehabilitasi sosial	KABMGL.03.02
		Perlindungan dan jaminan sosial	KABMGL.03.03
		Penanganan bencana	KABMGL.03.04
4	Pertanian	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	KABMGL.04.01
		Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	KABMGL.04.02
		Penanganan kerawanan pangan	KABMGL.04.03
		Pengawasan keamanan pangan	KABMGL.04.04
5	Ketenagakerjaan	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	KABMGL.05.01
		Penempatan tenaga kerja	KABMGL.05.02
		Pelaksanaan hubungan industrial	KABMGL.05.03
		Pembangunan kawasan transmigrasi	KABMGL.05.04
6	Peningkatan keberdayaan gender	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	KABMGL.06.01

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	2	3	4
		Perlindungan perempuan	KABMGL.06.02
		Pemenuhan hak anak (PHA)	KABMGL.06.03
		Perlindungan kasus anak	KABMGL.06.04
7	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	KABMGL.07.01
		Perencanaan lingkungan hidup	KABMGL.07.02
		Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	KABMGL.07.03
		Pengelolaan keanekaragaman hayati	KABMGL.07.04
		Pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	KABMGL.07.05
		Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	KABMGL.07.06
		Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan loka dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	KABMGL.07.07
		Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	KABMGL.07.08
		Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	KABMGL.07.09
		Penanganan pengaduan lingkungan hidup	KABMGL.07.10
		Pengelolaan persampahan	KABMGL.07.11
8	Layanan Infrastruktur'	Pengelolaan sumber daya air	KABMGL.08.01
		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	KABMGL.08.02
		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	KABMGL.08.03

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	2	3	4
		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	KABMGL.08.04
		Pengembangan permukiman	KABMGL.08.05
		Penataan bangunan Gedung	KABMGL.08.06
		Penataan bangunan dan lingkungannya	KABMGL.08.07
		Penyelenggaraan jalan	KABMGL.08.08
		Pengembangan jasa konstruksi	KABMGL.08.09
		Penyelenggaraan penataan ruang	KABMGL.08.10
		Pengembangan perumahan	KABMGL.08.11
		Pengembangan kawasan permukiman	KABMGL.08.12
		Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	KABMGL.08.13
		Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	KABMGL.08.14
		Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	KABMGL.08.15
		Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	KABMGL.08.16
		Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	KABMGL.08.17
9	Daya Saiung Ekonomi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	KABMGL.09.01
		Penanggulangan bencana	KABMGL.09.02
		Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakarandan penyelamatan non kebakaran	KABMGL.09.03
		Penataan desa	KABMGL.09.04
		Peningkatan kerjasama desa	KABMGL.09.05
		Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	KABMGL.09.06
		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	KABMGL.09.07

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	2	3	4
		Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	KABMGL.09.08
		Pendidikan dan latihan perkoperasian	KABMGL.09.09
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	KABMGL.09.11
		Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro kecil (UMKM)	KABMGL.09.12
		Pengembangan UMKM	KABMGL.09.13
		Pengembangan iklim penanaman modal	KABMGL.09.14
		Penyelenggaraan promosi penanaman modal	KABMGL.09.15
		Pelayanan penanaman modal	KABMGL.09.16
		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	KABMGL.09.17
		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	KABMGL.09.18
		Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	KABMGL.09.19
		Pengelolaan perikanan budi daya	KABMGL.09.20
		Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	KABMGL.09.21
		Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	KABMGL.09.22
		Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	KABMGL.09.23
		Pemasaran pariwisata	KABMGL.09.24
		Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	KABMGL.09.25
		Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	KABMGL.09.26
		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	KABMGL.09.27
		Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	KABMGL.09.28

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	2	3	4
		Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	KABMGL.09.29
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	KABMGL.09.30
		Perizinan usaha pertanian	KABMGL.09.31
		Penyuluhan pertanian	KABMGL.09.32
		Perizinan dan pendaftaran perusahaan	KABMGL.09.33
		Peningkatan sarana distribusi perdagangan	KABMGL.09.34
		Pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	KABMGL.09.35
		Pengembangan ekspor	KABMGL.09.36
		Pelayanan standarisasi dan perlindungan konsumen	KABMGL.09.37
		Perencanaan dan pembangunan industri	KABMGL.09.39
		Pengelolaan sistem informasi industri nasional	KABMGL.09.40
		Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	KABMGL.09.41
		Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	KABMGL.09.42
		Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	KABMGL.09.43
		Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	KABMGL.09.44
10	Kinerja Pemerintahan	Pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	KABMGL.10.01
		Perekonomian dan pembangunan	KABMGL.10.02
		Penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	KABMGL.10.03

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	2	3	4
		Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	KABMGL.10.04
		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	KABMGL.10.05
		Penelitian dan pengembangan daerah	KABMGL.10.06
		Penyelenggaraan pengawasan	KABMGL.10.07
		Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	KABMGL.10.08
11	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis TIK	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	KABMGL.11.01
		Pelayanan aplikasi informatika	KABMGL.11.02
		Penyelenggaraan statistik sektoral	KABMGL.11.03
		Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	KABMGL.11.04
12	Peningkatan pengelolaan pendapatan, Keuangan & aset daerah	Pengelolaan keuangan daerah	KABMGL.12.01
		Pengelolaan barang milik daerah	KABMGL.12.02
		Pengelolaan pendapatan daerah	KABMGL.12.03
13	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pendaftaran penduduk	KABMGL.13.01
		Pencatatan sipil	KABMGL.13.02
		Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	KABMGL.13.03
		Pengelolaan profil kependudukan	KABMGL.13.04
		Pengelolaan arsip	KABMGL.13.05
		Perlindungan dan penyelamatan arsip	KABMGL.13.06
		Perizinan penggunaan arsip	KABMGL.13.07

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	2	3	4
		Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	KABMGL.13.08
		Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	KABMGL.13.09
		Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KABMGL.13.10
		Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	KABMGL.13.11
14	Peningkatan kinerja sistem manajemen kepegawaian	Penyelenggaraan kepegawaian daerah	KABMGL.14.01

BAB III ARSITEKTUR APLIKASI

A. Pendahuluan

Arsitektur aplikasi merupakan salah satu komponen utama dalam arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur aplikasi menerjemahkan serangkaian proses bisnis dalam suatu layanan yang didukung oleh aplikasi. Di Pemerintah Kabupaten Magelang, aplikasi yang dibangun hendaknya memperhatikan prinsip keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi dan optimasi layanan. Selain itu, penyusunan arsitektur aplikasi disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan layanan. Dalam hal penyusunan arsitektur aplikasi juga harus memperhatikan standarisasi aplikasi yang terdiri dari teknologi yang digunakan, lisensi, kode sumber terbuka dan delivery/ prosesnya.

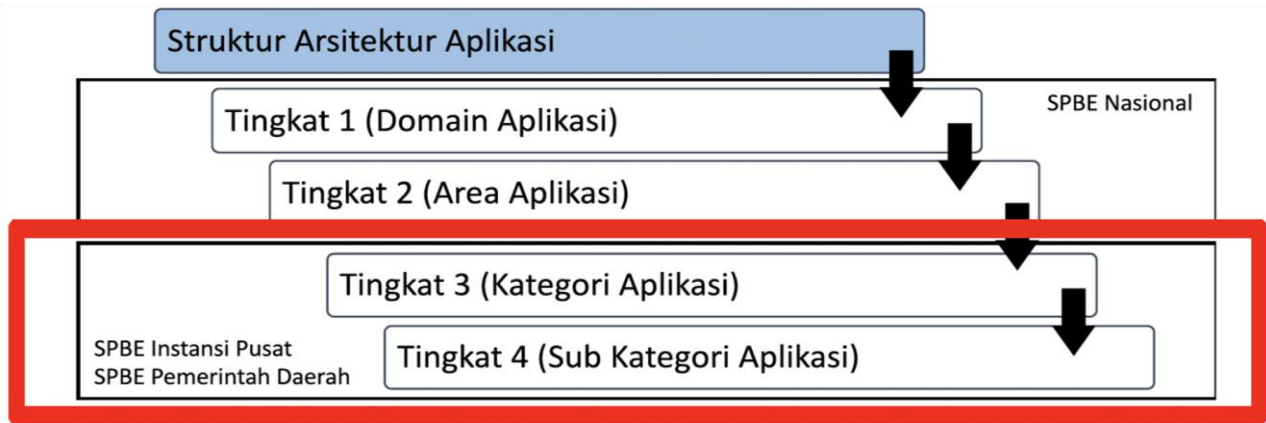
Arsitektur aplikasi menggambarkan kondisi arsitektur aplikasi di Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini, arsitektur aplikasi target, hasil analisis gap, rekomendasi serta roadmap penyusunan aplikasi itu sendiri. Dalam menyusun Arsitektur aplikasi terdapat beberapa dokumen yang dijadikan acuan diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 471 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Berdasarkan dokumen-dokumen di atas, terdapat beberapa aturan mengenai penyusunan Arsitektur SPBE sebagai berikut.

1. Struktur dan Referensi Arsitektur Aplikasi

Berdasarkan dokumen Rencana Perpres Arsitektur SPBE Nasional, domain arsitektur aplikasi SPBE diklasifikasikan kedalam tingkatan struktur domain arsitektur menjadi 4 (empat) tingkat yang dapat lihat pada Gambar 3.1.



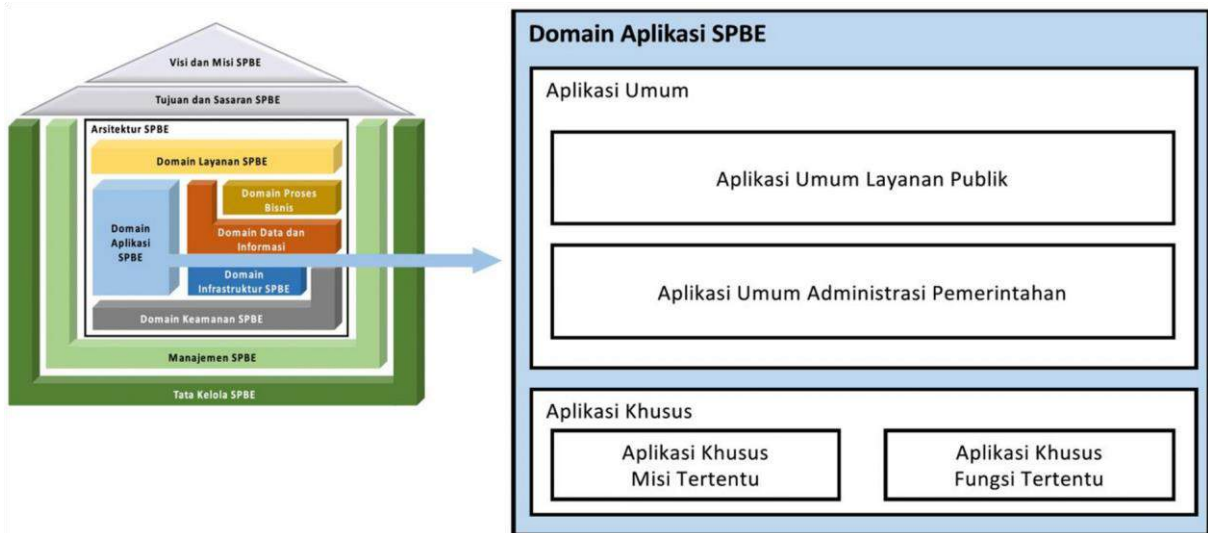
Gambar 3.1 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Berdasarkan gambar III.1.1, dapat dilihat bahwa arsitektur aplikasi Pemerintah Kabupaten Magelang ada pada tingkat 3 dan tingkat 4 dengan mengacu pada SPBE Nasional di tingkat 1 dan tingkat 2 yang akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Penjelasan untuk setiap tingkatan struktur domain aplikasi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Meta Data untuk Data Khusus yang Ada di Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang

No	Tingkatan Struktur Domain	Deskripsi Aplikasi
1	Domain Aplikasi	Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, yang menjadi struktur di tingkat nasional.
2	Area Aplikasi	Aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan yang menjadi struktur di tingkat nasional.
3	Kategori Aplikasi	Aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional.
4	Sub Kategori Aplikasi	Aplikasi yang disusun oleh IPPD sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Domain arsitektur aplikasi SPBE memiliki beberapa komponen di dalamnya. Pembagian komponen dalam referensi aplikasi SPBE dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Secara umum aplikasi pada arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi dua bagian yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Aplikasi umum memiliki dua jenis aplikasi yaitu aplikasi umum layanan publik dan aplikasi umum administrasi pemerintahan. Sedangkan aplikasi khusus juga memiliki dua jenis aplikasi yaitu aplikasi khusus misi tertentu dan fungsi tertentu. Penjelasan untuk setiap referensi arsitektur dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

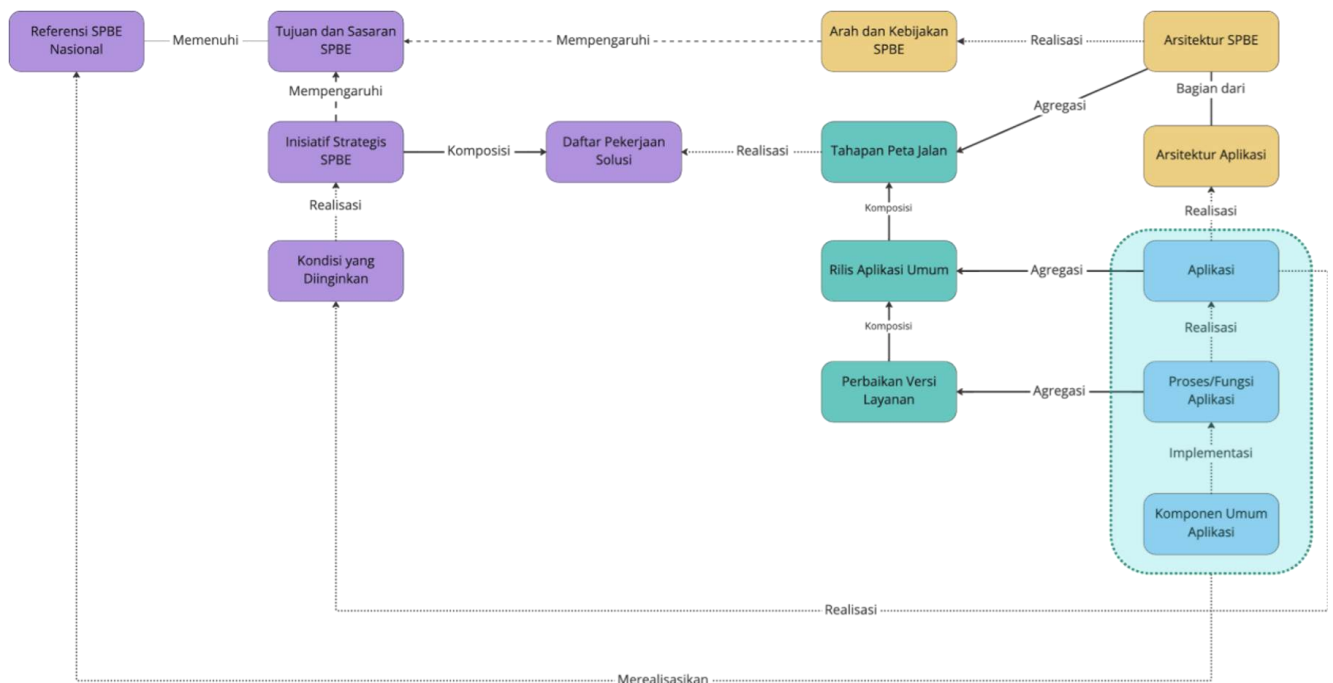
Tabel 3.2 Referensi Aplikasi SPBE (RA) Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
	Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah baik aplikasi layanan publik maupun instansi untuk kebutuhan misi-misi tertentu.
		Aplikasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan oleh pemerintah pusat maupun

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	daerah baik aplikasi layanan publik maupun instansi untuk kebutuhan misi-misi tertentu

2. Posisi Arsitektur Aplikasi dan Keterkaitan Antar Domain

Penyusunan arsitektur aplikasi bukan semata-mata melihat kebutuhan aplikasi yang ada saja, tetapi juga perlu memperhatikan keselarasan antara aplikasi yang dibangun dengan tujuan dan sasaran SPBE. Keterkaitan antara domain arsitektur aplikasi dengan tujuan dan sasaran SPBE dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut.

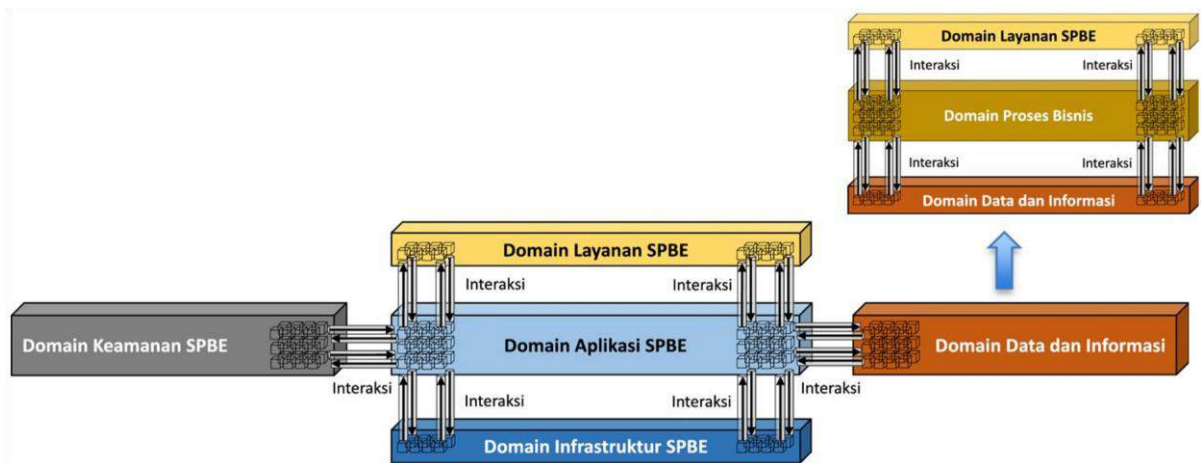


Gambar 3.3 Keselarasan antara aplikasi dan domain lainnya.

Dapat dilihat bahwa Tujuan dan Sasaran SPBE harus memenuhi Referensi SPBE Nasional dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dan Sasaran SPBE selanjutnya diturunkan menjadi Arah dan Kebijakan SPBE yang direalisasikan dalam bentuk arsitektur SPBE. Pada Arsitektur SPBE terdapat enam domain yang disusun, salah satunya adalah arsitektur Aplikasi SPBE. Keluaran dari Arsitektur Aplikasi SPBE salah satunya adalah rincian data aplikasi, proses/ fungsi dari aplikasi dan komponen umum aplikasi. Keluaran ini merupakan bagian dari daftar aplikasi umum yang di dalamnya juga terdapat perbaikan detail layanan. Daftar aplikasi ini sebaiknya disajikan dalam bentuk peta jalan untuk periode tertentu sehingga dapat dijadikan target dan acuan untuk pengembangan aplikasi yang akan dijalankan. Selain itu daftar aplikasi juga harus diselaraskan dengan kondisi yang diharapkan oleh pengguna sehingga dapat mendukung Inisiatif Strategi SPBE dan secara tidak langsung menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran SPBE.

Aplikasi dalam Arsitektur SPBE dapat berupa sebuah aplikasi atau pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Untuk mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintah secara nasional, maka pembangunan aplikasi wajib mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE yang terintegrasi secara lintas sektoral.

Arsitektur Aplikasi tidak dapat dirancang hanya untuk fokus pada data aplikasinya saja, tetapi harus dapat berkolaborasi dan bersesuaian dengan domain arsitektur yang lain. Secara langsung Arsitektur Aplikasi berinteraksi dengan arsitektur data dan informasi dalam penyampaian sistem informasi yang efektif. Secara tidak langsung, domain data dan informasi berinteraksi dengan domain proses bisnis, yang akan diselaraskan dengan domain aplikasi. Arsitektur aplikasi juga berinteraksi dengan domain infrastruktur dan keamanan tentang penggunaannya pada aplikasi. Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Sehingga domain aplikasi harus berinteraksi dengan domain layanan. Keterkaitan domain aplikasi dengan domain lainnya dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Keterkaitan Domain Aplikasi dengan Domain Lainnya

Selain berinteraksi dengan domain yang lain, Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE juga dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- Disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
- Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- berbasis kode sumber terbuka (*open source*).

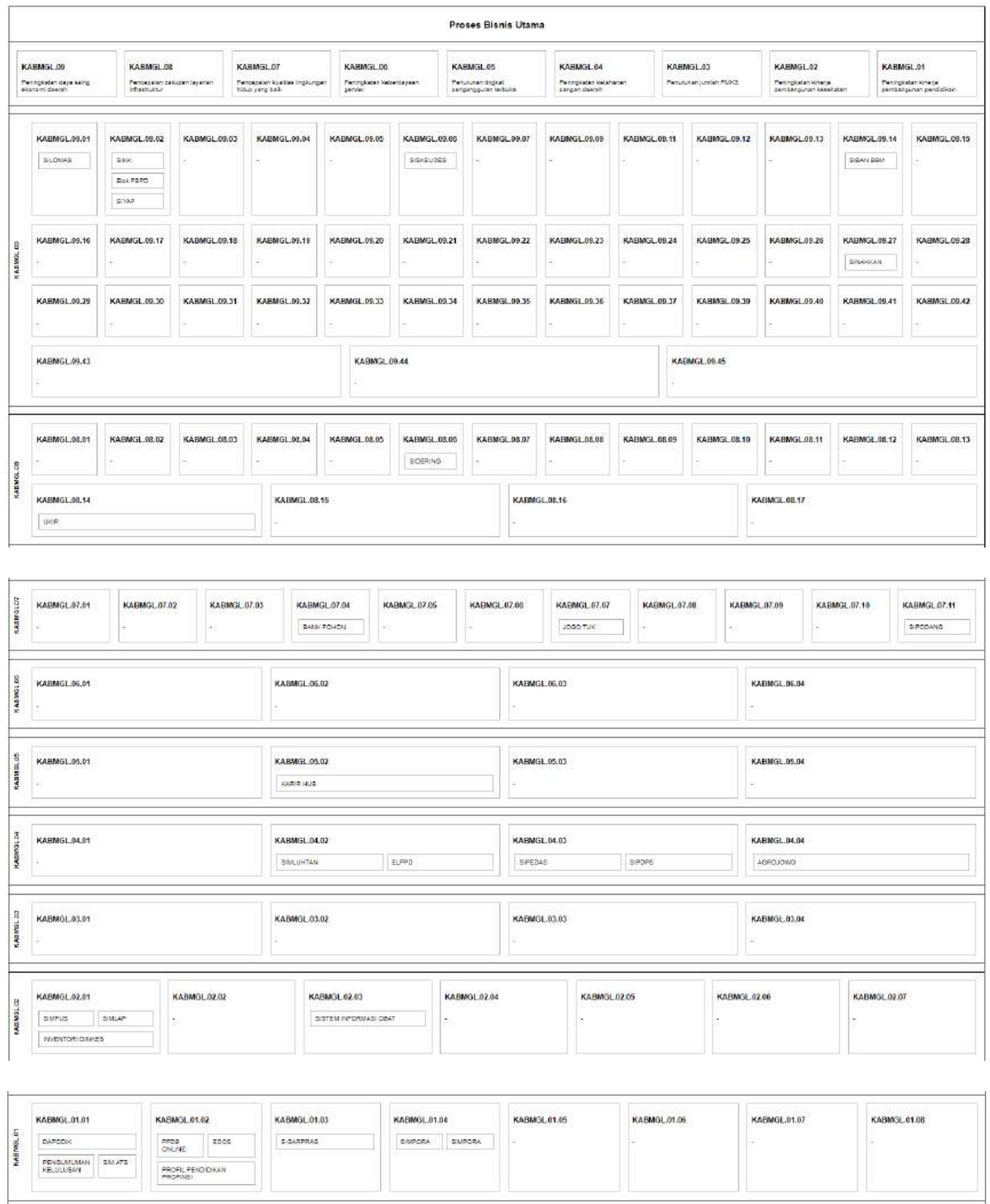
3. Metadata Aplikasi SPBE

Dalam proses inventarisasi aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang akan disesuaikan dengan format Metadata Aplikasi SPBE yang tercantum pada dokumen rencana Perpres tentang SPBE Nasional. Atribut pada metadata bukan hanya berfokus pada nama dan fungsi aplikasi, tetapi juga harus mewadahi platform, data yang digunakan, serta hal-hal teknis lainnya terkait aplikasi. Atribut metadata Aplikasi SPBE dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 3.3 berikut:

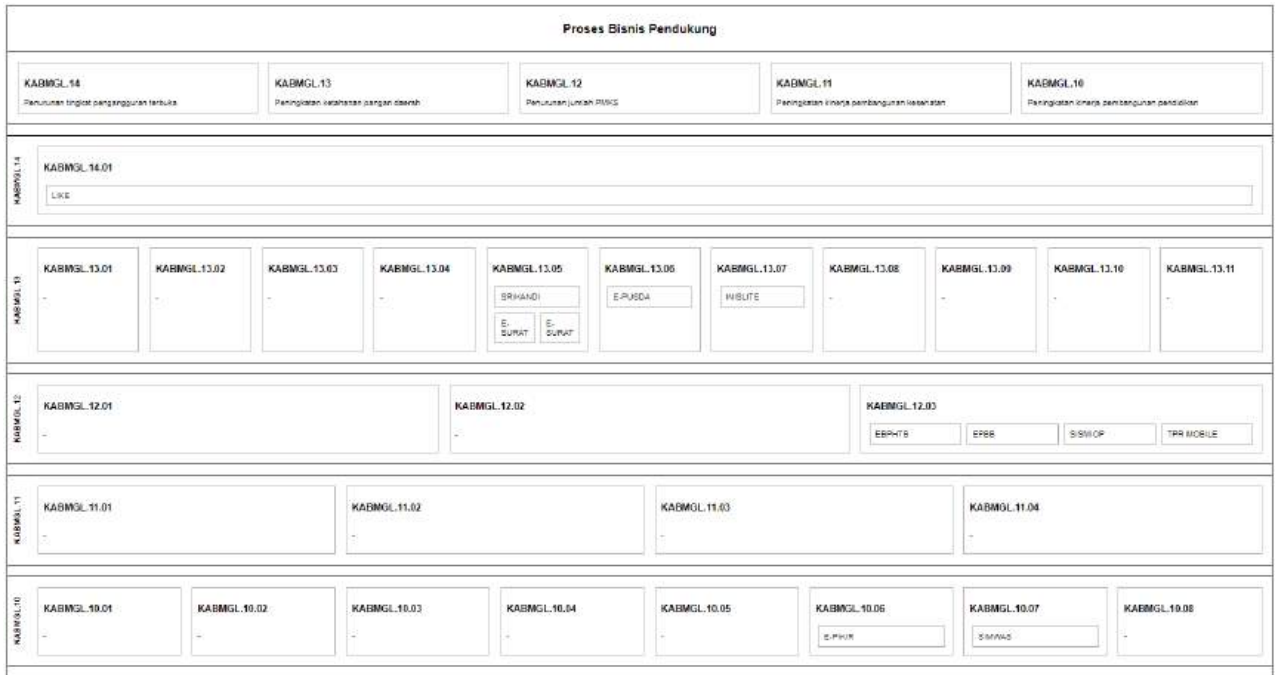
Tabel 3.3 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi.
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata arsitektur layanan SPBE.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata arsitektur data dan informasi.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinput)
10	Supplier Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	Customer Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau Mobile).
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/Proprietary)
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau framework yang digunakan oleh aplikasi.
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan.
21	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata Arsitektur SPBE terkait

Pemetaan secara detail untuk setiap proses bisnis disajikan pada Gambar 3.6-3.8 sebagai berikut:



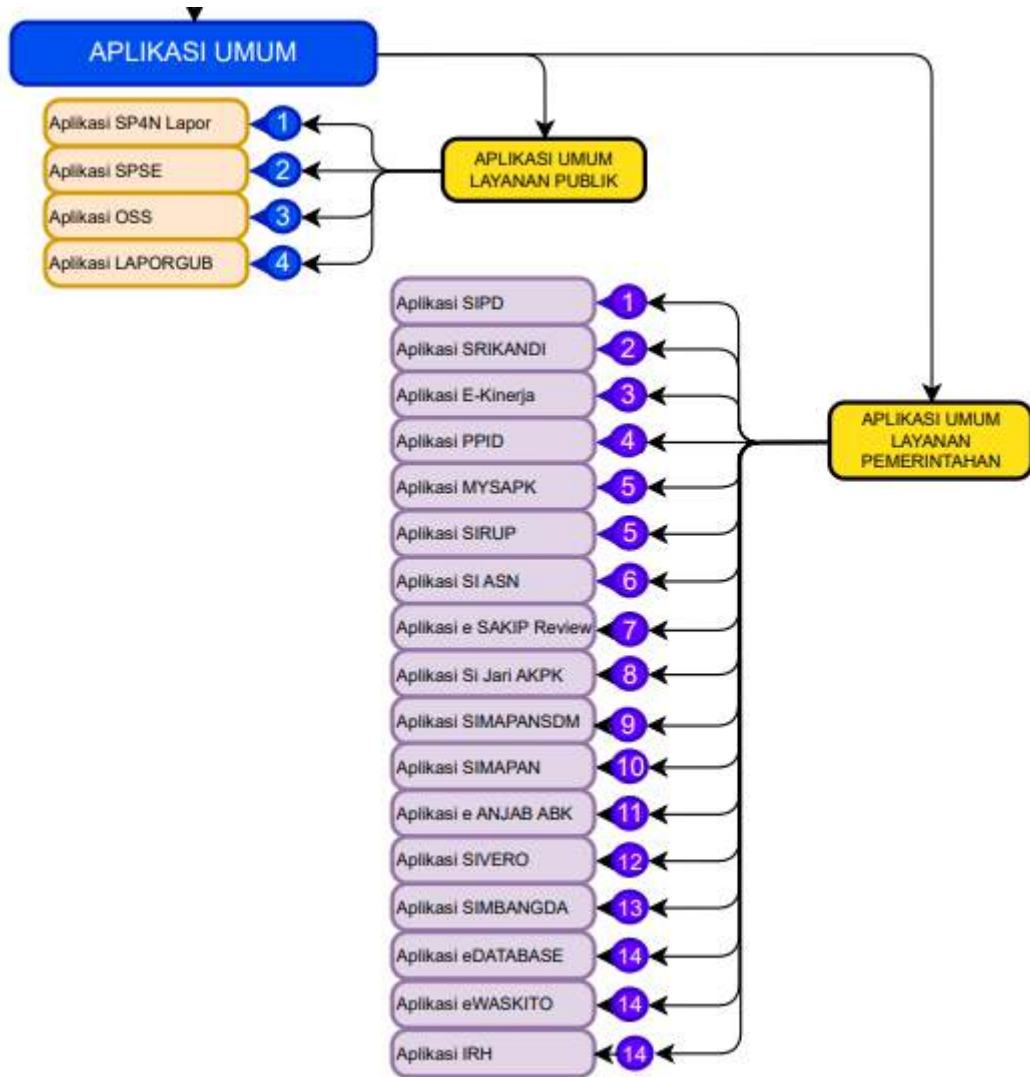
Gambar 3.6 Pemetaan Aplikasi pada Proses Bisnis Utama



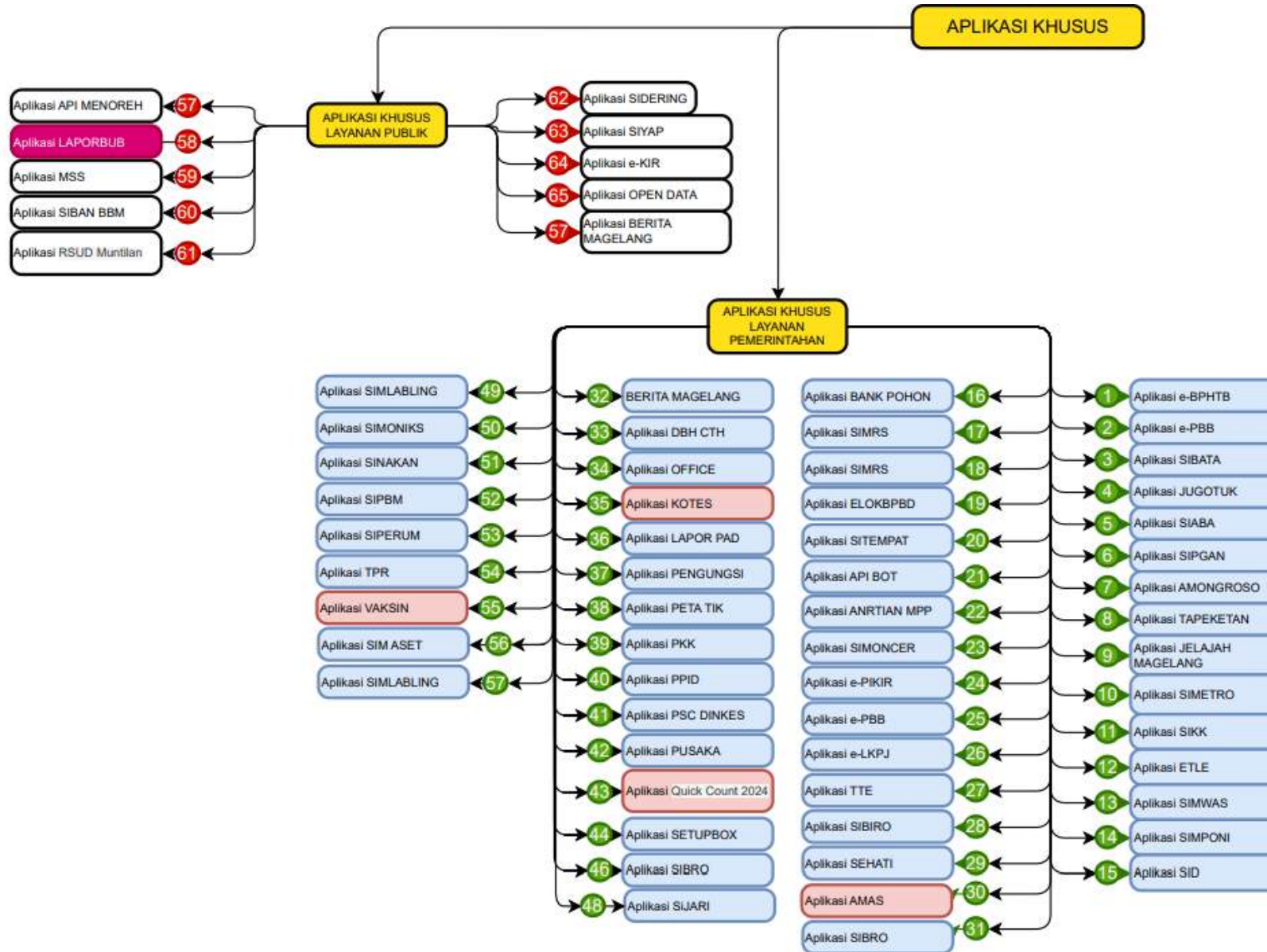
Gambar 3.7 Pemetaan Aplikasi pada Proses Bisnis Pendukung

2. Pemetaan aplikasi disesuaikan dengan taksonomi aplikasi

Sesuai dengan pembagian jenis aplikasi pada dokumen Rencana Perpres tentang SPBE Nasional, maka aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang harus diidentifikasi jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemetaan aplikasi umum dapat dilihat pada Gambar 3.9 dan Gambar 3.10.



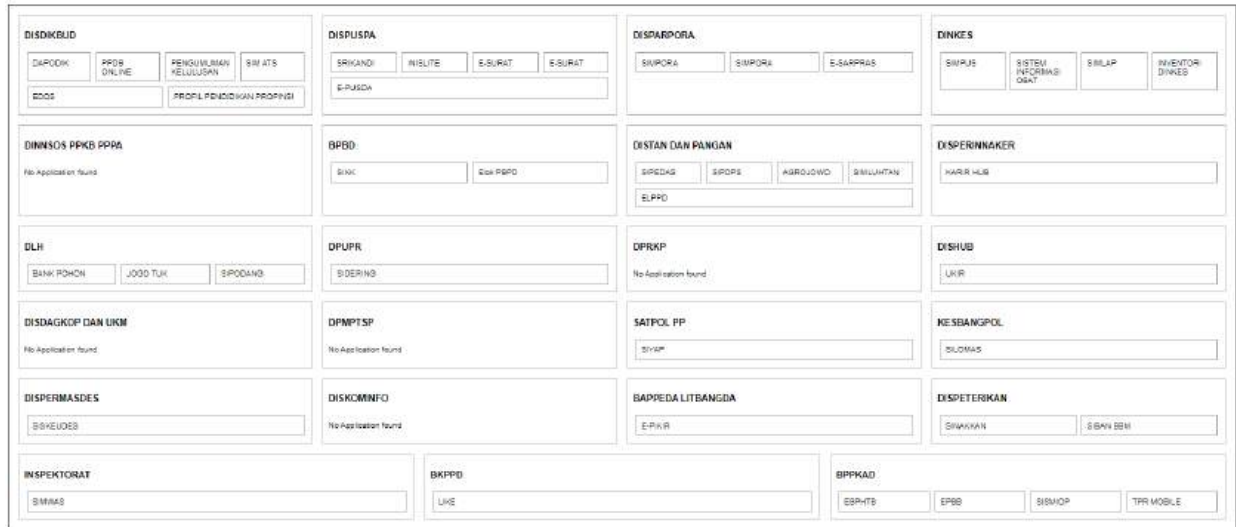
Gambar 3.9 Pemetaan Aplikasi Umum



Gambar 3.10 Pemetaan Aplikasi Khusus

3. Pemetaan aplikasi berdasarkan unit kerja

Berdasarkan dokumen kebijakan dan peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Rencana Induk Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Laporan Analisis dan Pemetaan Model Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Proses Bisnis dan Domain Layanan Pada Kabupaten Magelang Tahun 2023, setiap aplikasi memiliki unit pengelola atau product owner-nya. Berikut ini akan disajikan pemetaan aplikasi berdasarkan product owner-nya yang disesuaikan dengan unit kerja/organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang. Pemetaan aplikasi terhadap unit kerja secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 3.11 sebagai berikut.



Gambar 3.11 Pemetaan Aplikasi di tingkat Dinas Daerah

C. Arsitektur Aplikasi Target

1. Rekomendasi

Berdasarkan analisis pada kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang belum semua menggunakan IT untuk menunjang strategi yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal ini dilihat dari beberapa permasalahan diantaranya:

a. Peranan TI

Paradigma yang belum tepat dalam memposisikan TI, dengan mengartikannya hanya sebagai instrumen percepatan proses dan alat bantu penyelesaian tugas. TI belum sepenuhnya untuk kepentingan analisis dan bahkan belum digunakan untuk menunjang strategi organisasi, misalnya transparansi kinerja pemerintahan.

b. Organisasi Internal

Fungsi perencanaan dan pengembangan TI secara alih daya ada di masing-masing Unit Kerja diluar Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo). Meski demikian, pada kenyataannya pengembangan dan operasional TI secara keseluruhan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo), yang menyebabkan pengelolaan TI menjadi kompleks dan tidak terintegrasi karena tidak adanya standar dari unit yang mengelola TI secara menyeluruh dari perencanaan hingga operasional (belum ada bagian yang bertanggung jawab terhadap TI secara menyeluruh).

c. Aplikasi

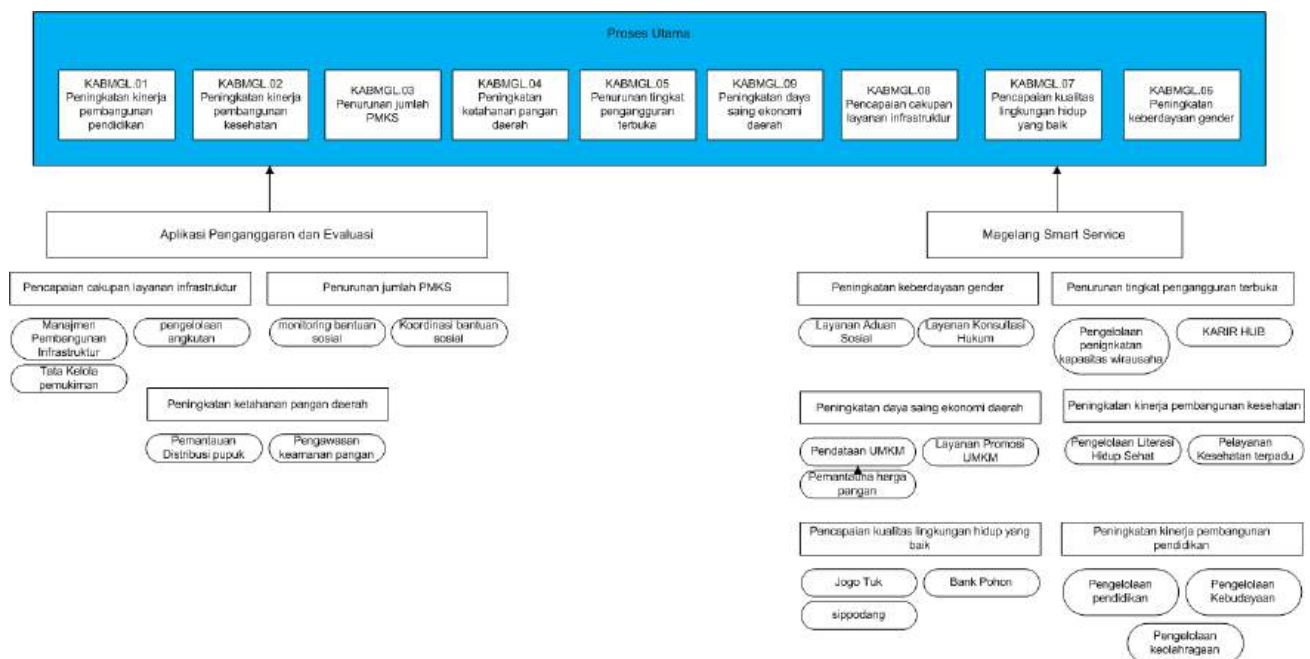
Berdasarkan kondisi organisasi internal di atas, diketahui aplikasi yang ada saat ini belum semua terintegrasi dengan adanya pulau-pulau aplikasi. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi data dan penggunaan sumber daya infrastruktur TI yang tidak efisien. Perencanaan pengembangan aplikasi belum ada sehingga aplikasi internal dan aplikasi eksternal yang dikembangkan secara inhouse maupun alih daya tidak tersentralisasi dan tidak terintegrasi dalam mendukung aktivitas utama Pemerintah Kabupaten Magelang. Aplikasi dikembangkan secara terpisah, hanya berdasarkan kebutuhan yang ada pada saat itu dan dikembangkan secara *ad hoc*. Terdapat beberapa aplikasi internal dan aplikasi eksternal yang pengembangannya berbeda dengan standar pengembangan aplikasi yang dilakukan secara *inhouse*.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka disusun rekomendasi untuk arsitektur aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Perlu dirancang Sistem Informasi yang menangani proses bisnis utama Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu mulai dari perumusan kebijakan, koordinasi dan implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Sistem Informasi ini harus terintegrasi di setiap prosesnya sehingga tidak ada silo-silo aplikasi.
2. Beberapa aplikasi umum seharusnya memiliki fungsi yang general dan standar sehingga dapat menerapkan prinsip berbagi pakai, integrasi, efisiensi dan optimasi layanan.
3. Aplikasi yang ada saat ini sebaiknya diintegrasikan sesuai dengan domainnya masing-masing, sehingga tidak terlalu banyak dari segi jumlah tetapi dapat mewadahi seluruh operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

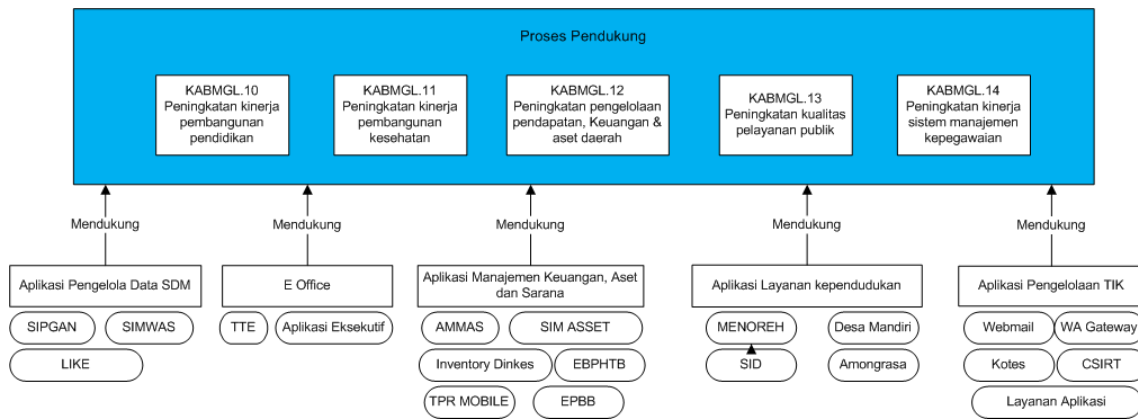
D. Arsitektur Aplikasi Usulan

Berdasarkan rekomendasi yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, maka dibuat arsitektur aplikasi usulan untuk Pemerintah Kabupaten Magelang. Arsitektur aplikasi usulan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu untuk proses utama (KABMGL.01 - KABMGL.09) dan untuk proses pendukung (KABMGL.10 - KABMGL.14). Arsitektur aplikasi untuk proses utama dapat dilihat pada Gambar 3.14.

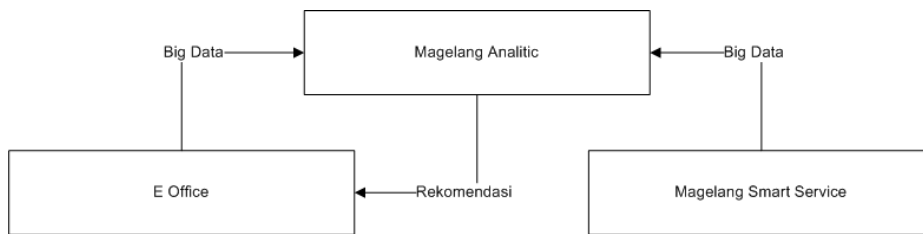


Gambar 3.14 Arsitektur Aplikasi Target untuk Proses Utama

Selain itu, disusun juga Arsitektur Aplikasi Target untuk proses pendukung yang didasarkan pada pengelompokan dan integrasi aplikasi yang sudah ada saat ini, Arsitektur aplikasi target untuk proses pendukung dapat dilihat pada Gambar 3.15.

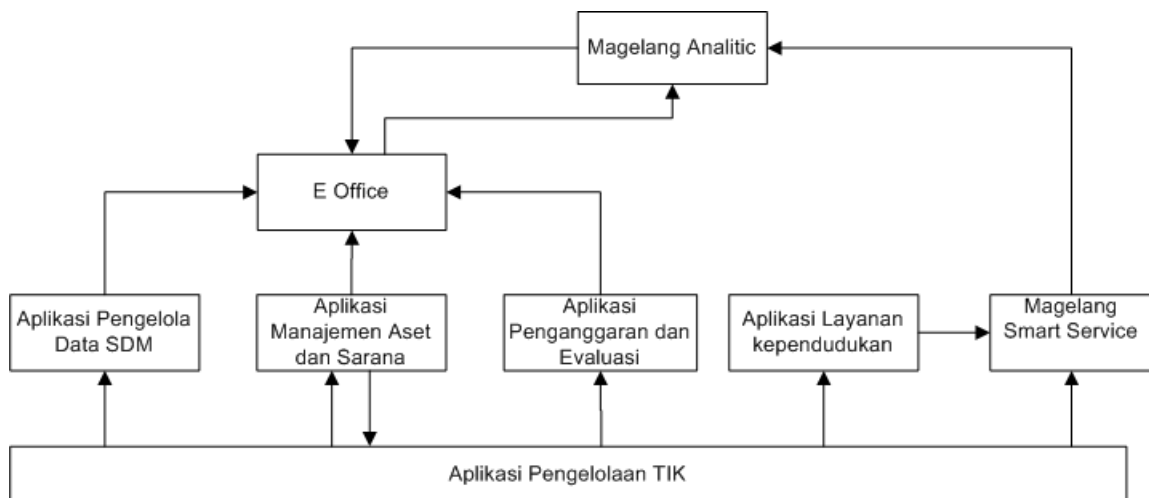


Gambar 3.15 Arsitektur Aplikasi Target untuk proses pendukung



Gambar 3.16 Analisa data dari aplikasi proses pendukung dan proses utama

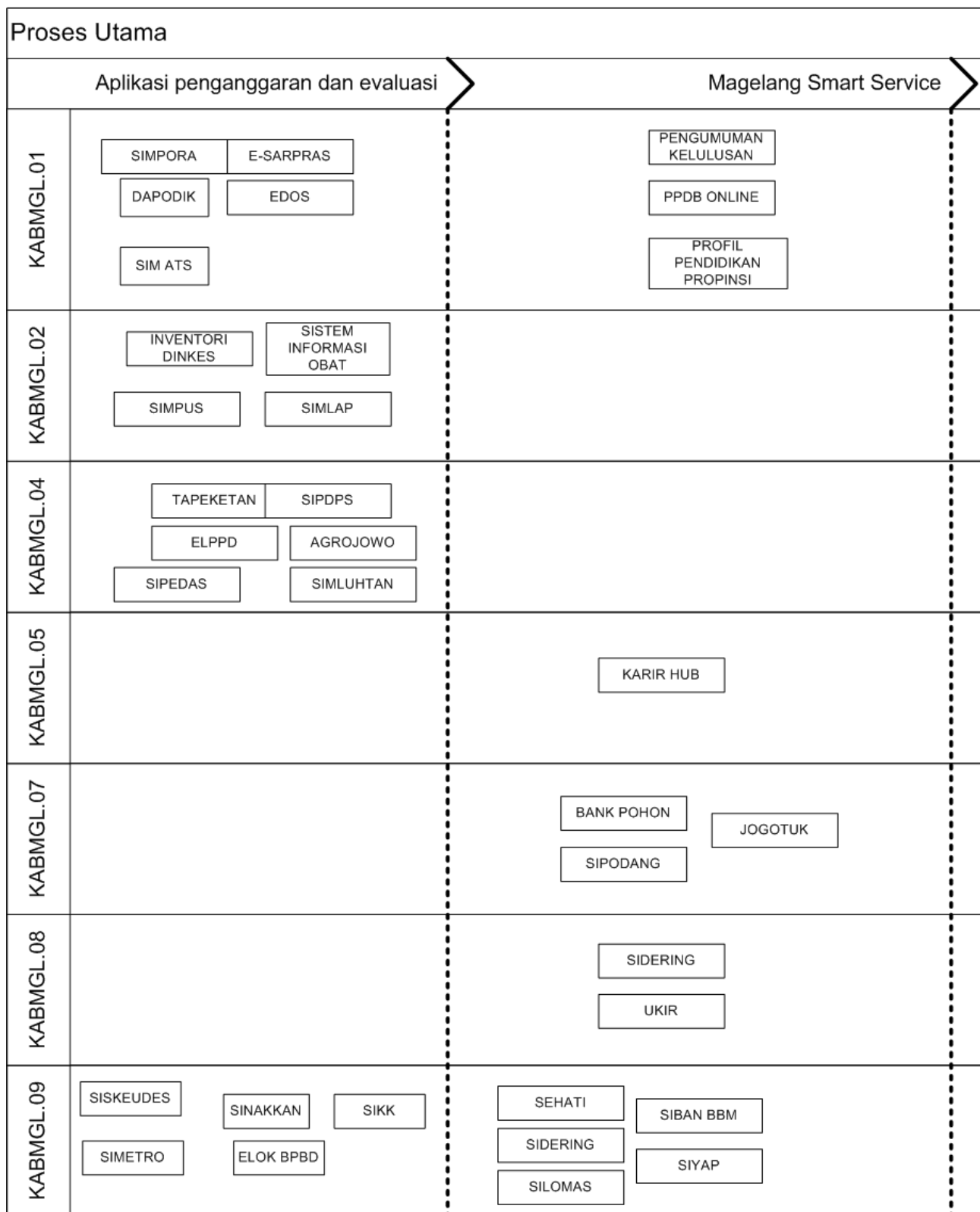
Selain memenuhi prinsip berbagi pakai dan integrasi, aplikasi-aplikasi yang dibangun juga harus terkait satu sama lain sehingga dapat menggunakan sumber data yang sama. Pada gambar 3.17 ini diilustrasikan rencana integrasi antara satu kelompok aplikasi dengan kelompok aplikasi lainnya.



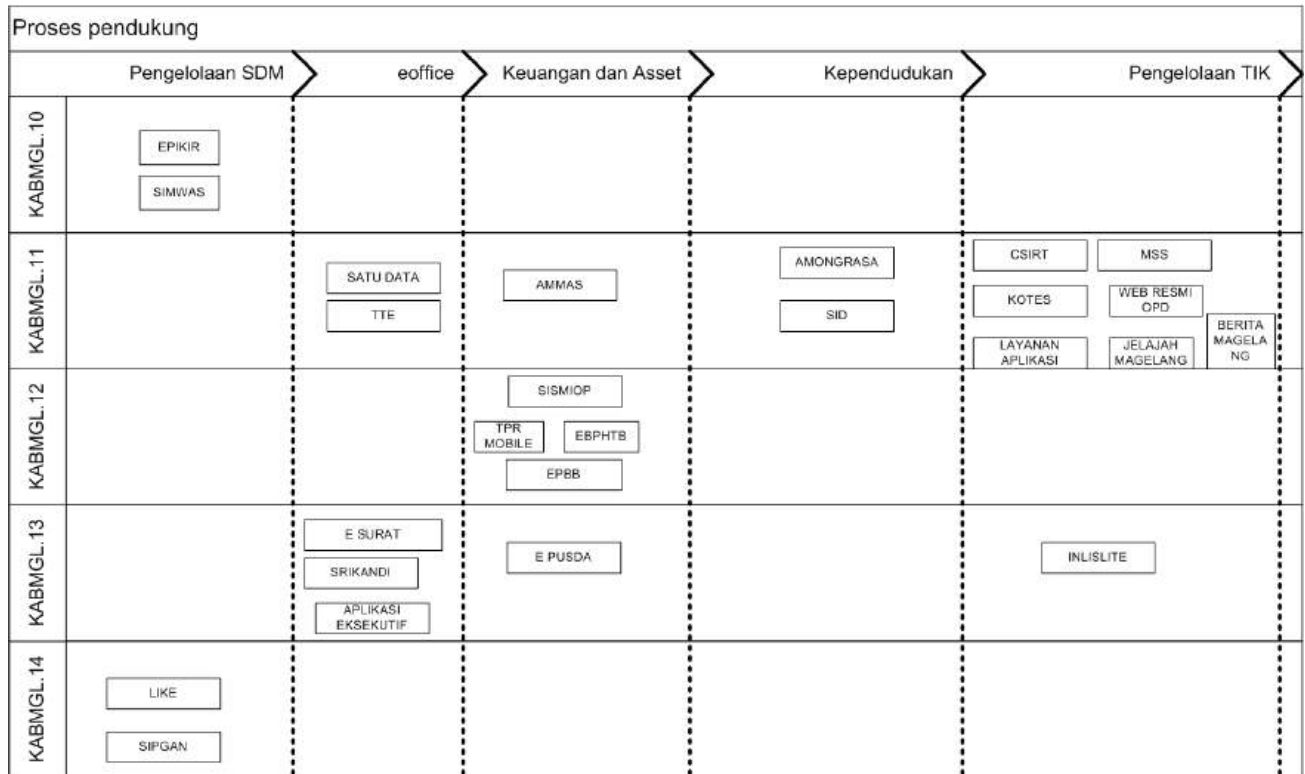
Gambar 3.17 Rencana Integrasi Antar Aplikasi

E. Analisis Gap

Berdasarkan Arsitektur Aplikasi Saat Ini dan Arsitektur Aplikasi Target, maka perlu dilakukan gap analisis untuk menyusun rencana dan peta jalan agar arsitektur aplikasi target dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Gap analysis yang terjadi dapat dilihat pada Gambar 3.18.



Gambar 3.18 Gap Analysis Arsitektur Aplikasi Proses Utama



Gambar 3.19 Gap Analysis Arsitektur Aplikasi Proses Pendukung

F. Metadata Aplikasi

Sesuai dengan yang tercantum pada rencana Peraturan Presiden tentang SPBE, maka aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang harus memiliki Metadata Aplikasi dengan atribut yang telah ditentukan. Metadata untuk Aplikasi dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Metadata Aplikasi

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
KABMGL-RAA.02.02.01	SIABA	Aplikasi SIABA Merupakan Kontrol Kedisiplinan ASN Kabupaten Magelang Berbasis Smart Phone (android, Mac OS Masih dalam Pengembangan)	Proprietary	JAVA		PostgreSQL	Diskominfo	Dinas Kominfo Kabupaten Magelang
KABMGL-RAA.02.02.02	SIYAP	Aplikasi SIYAP Merupakan Aplikasi Siap Tanggap Darurat Unuk Kebencanaan Dan Layanan Masyarakat	Proprietary	JAVA		MySQL	Diskominfo	Dinas Kominfo Kabupaten Magelang
KABMGL-RAA.02.02.03	JOGOTUK	Jogotuk adalah Aplikasi dari DLH yang berfungsi untuk mendata semua mata-air yang ada di Kabupaten Magelang	Proprietary	PHP		MySQL	Diskominfo	Dinas Kominfo Kabupaten Magelang
KABMGL-RAA.02.02.04	BANK POHON	Bank Pohon Merupakan Aplikasi dari DLH yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada msasyarakat yang membutuhkan berbagai jenis phon tanpaharus datang langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Proprietary	PHP		MySQL	Diskominfo	DLH
KABMGL-RAA.02.02.05	EPBB (Pajak Bumi dan Bangunan)	Aplikasi yang digunakan untuk pemberitahuan pajak terutang objek pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.	Proprietary	PHP		MySQL	BPPKAD	BPPKAD

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
KABMGL-RAA.02.02.06	EBPHTB	Aplikasi BPHTB merupakan Aplikasi yang digunakan untuk melaporkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat diakses secara elektronik menggunakan smartphone atau perangkat komputer.	Proprietary	PHP		MySQL	BPPKAD	BPPKAD
KABMGL-RAA.02.02.07	ESPTPD	Sistem Informasi Pajak Online berupa Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) untuk melakukan pelaporan omzet wajib pajak dan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak	Proprietary	PHP		MySQL	BPPKAD	BPPKAD
KABMGL-RAA.02.02.08	SIBATA Online (Bank Data Keuangan)	Sistem Informasi Manajemen (SIM) berupa Bankdata yang berguna untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktifitas kinerja organisasi.	Proprietary	PHP		MySQL	BPPKAD	BPPKAD
KABMGL-RAA.02.02.09	UKIR	e KIR Adalah Aplikasi untuk pendaftaran uji kendaraan secara online	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISHUB

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
KABMGL-RAA.02.02.10	TAPEKETAN	TAPEKETAN Merupakan Aplikasi pendataan penggunaa kartu tani dan pengecer pupuk bersubsidi berdasarkar sebaran wilayah per kelurahan	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISTAN PANGAN
KABMGL-RAA.02.02.11	PPID	PPID Merupakana Aplikasi informasi terkait Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	BAG.HUKIM
KABMGL-RAA.02.02.12	JELAJAH MAGELANG	Jelajah Magelah adalah Aplikasi yang di buangun oleh pemerintah kabupaten magelang guna memudahkan para pengunjung atau wisatawan dalam menemukan atau menentukan tempat tempat wisata dan pusat perbelanjaan di kabupaten magelang	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISKOMINFO
KABMGL-RAA.02.02.13	BERITAMAGELANG	Berita Magelang merupakan media online resmi milik Pemerintah Daerah yang menyuguhkan berita seputar Kabupaten Magelang	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISKOMINFO

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
KABMGL-RAA.02.02.14	PUSAKA GEMILANG	TAPEKETAN Merupakan Aplikasi pendataan penggunaa kartu tani dan pengecer pupuk bersubsidi berdasarkar sebaran wilayan per kelurahan	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISKOMINFO
KABMGL-RAA.02.02.15	OPEN DATA	Open data adalah Aplikasi terkait dengan dengan penggunaan data yang bisa diakses dan di sebarakan secara berulang ulang oleh siapa saja.	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISKOMINFO
KABMGL-RAA.02.02.16	e PIKIR	Bappeda & Litbangda sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dan untuk memudahkan hal tersebut Bappeda & Litbangda menerbitkan Aplikasi e PIKIR	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	BAPPEDA
KABMGL-RAA.02.02.17	SIPGAN	Apliiikasi SIPGAN merupakan apalikasi yang di bangun sebagai media informasi terkait dengan kepegawaian dikabupaten Magelang	Proprietary	PHP		MySQL	BPPKAD	BPPKAD

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
KABMGL-RAA.02.02.18	SIMETRO	Meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya(uttp)	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISPERINDAG
KABMGL-RAA.02.02.19	SIMDIS		Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	BPPKAD
KABMGL-RAA.02.02.20	APIMENOREH	Aplikasi API MENOREH merupakan sebuah inovasi berupa aplikasi pelayanan administrasi kependudukan yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka membantu warga masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan secara online	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISDUKCAPIL
KABMGL-RAA.02.02.21	AMONGRASA	Apliiikasi Monografi Kelurahan dan Desa Pemerintah Kabupaten Magelang	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISKOMINFO
KABMGL-RAA.02.02.22	JDIH	JDIH Kabupaten Magelang adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	BAG.HUKUM

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
		berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.						
KABMGL-RAA.02.02.23	SIKK	Apliiikasi pantauan bencana yang dibangun untuk dapat digunakan sebagai media pengelolaan dan respon bencana di wilayah Kabupaten Magelang dengan menggunakan Geographic Information System berbasis website sehingga dapat diakses dimana saja dengan koneksi internet	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	BPBD
KABMGL-RAA.02.02.24	SIMPONI	SIMPONI Adalah aplikasi layanan pendaftaran pasien secara online	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	RSUD.MUNTILAN
KABMGL-RAA.02.02.25	SIMWAS ONLINE	Aplikasi pengawasan Inspektorat	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	INSPEKTORAT
KABMGL-RAA.02.02.26	SEHATI	Aplikasi terkait dengan informasi harga komoditi dikabupaten magelang	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISPERINDAGKOP
KABMGL-RAA.02.02.27	ETLE	ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik	Proprietary	PHP		MySQL	DISHUB	DISHUB

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
		berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis						
KABMGL-RAA.02.02.28	SIPODANG	aplikasi sistem informasi pembayaran retribusi sampah online	Proprietary	PHP		MySQL	PIHAK KE 3	DLH
KABMGL-RAA.02.02.29	SI SUNAN DUKUH	Si Sunan Dukuh ini merupakan upaya untuk mempercepat penyusunan produk hukum daerah; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	BAG.HUKUM
KABMGL-RAA.02.02.30	SIMPUS	SIMPUS merupakan suatu Aplikasi Manajemen Puskesmas dimana fungsi utamanya adalah memmanage data pasien mulai dari pendaftaran, registrasi, pemeriksaan (diagnosis) serta pengobatan pasien.	Proprietary	PHP		MySQL	PIHAK KE 3	DINKES
KABMGL-RAA.02.02.31	SISTEM INFORMASI OBAT	Aplikasi tentang system informasi penggunaan obat di dinas kesehatan kabupaten magelang.	Proprietary	PHP		MySQL	PIHAK KE 3	DINKES

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
KABMGL- RAA.02.02.32	SIMLAP						PIHAK KE 3	DINKES
KABMGL- RAA.02.02.33	SISMIOP	Aplikasi ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak. Sebuah sistem yang dipakai oleh pengelola perpajakan di daerah yang tanggung jawabnya dipegang oleh dinas pendapatan daerah.	Proprietary	PHP		MySQL	PIHAK KE 3	BPPKAD
KABMGL- RAA.02.02.34	TPR MOBILE	Aplikasi pengelolaan retribusi galian c kabupaten magelang	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	BPPKAD
KABMGL- RAA.02.02.35	DAPODIK	Aplikasi Dapodik Aplikasi Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian .					KEMENPENDI DIKAN	DISDIKBUD

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
KABMGL-RAA.02.02.36	PPDB ONLINE	PPDB Online merupakan sebuah sistem layanan inovatif terpadu yang dirancang untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan proses seleksi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Proprietary				PIHAK KE 3	DISDIKBUD
KABMGL-RAA.02.02.37	PENGUMUMAN KELULUSAN	Aplikasi informasi kelulusan peserta didik pada tahun ajaran baru	Proprietary				PIHAK KE 3	DISDIKBUD
KABMGL-RAA.02.02.38	SITEMPAT	Aplikasi yang menyediakan berbagai macam layanan yang bisa didownload dan diakses menggunakan handphone	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISDIKBUD
KABMGL-RAA.02.02.39	MPP	Merupakan aplikasi antrian layanan pada Mal Pelayan Publik Kabupaten Magelang	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISDIKBUD
KABMGL-RAA.02.02.40	WEB SITE MAGELANGKAB	Aplikasi media penyampaian informasi tentang Kabupaten Magelang kepada publik	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISKOMINFO
KABMGL-RAA.02.02.41	SIBAN BBM	Layanan bantuan BBM di Kabupaten Magelang ke dalam satu aplikasi mobile sehingga mempercepat dan mempermudah	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISPETERIKAN

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
		masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang ada						
KABMGL-RAA.02.02.42	QUANTUM GIS	Aplikasi Open Souce yang digunakan oleh Distanpangan untuk memetakan wilayah yang memiliki sumber daya pangan dan ketersediaan lumbung pangan	Proprietary				OPEN SOURCE	DISTAN PANGAN
KABMGL-RAA.02.02.43	SIKOTES	Aplikasi permohonan layanan terkait dengan Teknologi Informasi	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISKOMINFO
KABMGL-RAA.02.02.44	PUSAT DATA	Pusaka Gemilang adalah Pusat Informasi dan Komunikasi Magelang Gemilang yang merupakan Portal Layanan Data Kabupaten Magelang. Pusaka Gemilang saat ini telah memuat data statistik sektoral Kabupaten Magelang yang bersumber dari semua Organisasi Perangkat Daerah	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISKOMINFO

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
KABMGL-RAA.02.02.45	OPEN DATA	Open data adalah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang untuk mempulikasikan data yang sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DISKOMINFO
KABMGL-RAA.02.02.46	SIDERING	Aplikasi layanan perizinan online yang disediakan oleh DPMPPTSP Kabupaten Magelang untuk mengajukan permohonan izin baru atau perpanjangan oleh pemohon secara mandiri	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	DPMPPTSP
KABMGL-RAA.02.02.47	LIKE	LiKE (Layanan Informasi Kepegawaian) Kenaikan Gaji Berkala Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Pegawai Penggajian Kenaikan Pangkat Pemberhentian Pegawai	Proprietary	PHP		MySQL	BKPPD	BKPPD
KABMGL-RAA.02.02.48	SIPERUM	Siperum adalah sistem informasi yang memuat daftar perumahan berijin secara detail di Kabupaten Magelang sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan rumah, atau organisasi/instansi yang membutuhkan	Proprietary	PHP		MySQL	DISKOMINFO	BKPPD

ID	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	TIPE LISENSI APLIKASI	BAHASA PEMROGRAMAN	KERANGKA PENGEMBANGAN	BA BASIS DATA	UNIT PENGEMBANG	UNIT ORGANISASI
		informasi tentang perumahan berizin.						

G. Integrasi Aplikasi

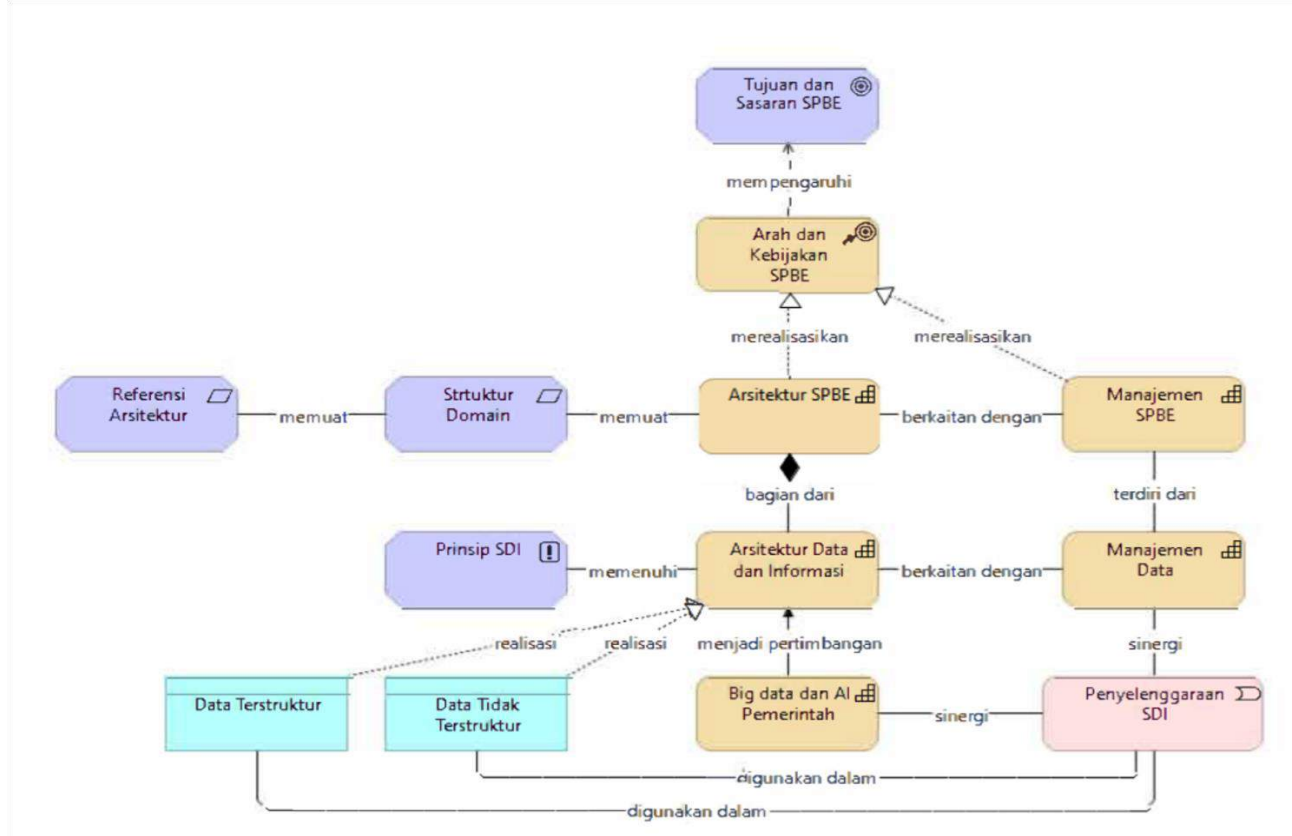
Untuk memenuhi prinsip berbagi pakai, efektif dan efisien maka aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang sebaiknya diintegrasikan sesuai fungsi atau domain masing-masing. Di bawah ini merupakan pembagian untuk integrasi aplikasi yang disarankan:

1. Magelang Smart Service mengintegrasikan layanan publik dari Pemerintah Kabupaten Magelang, diantaranya:
 - a. SIDERING;
 - b. MPP;
 - c. Pengumuman Kelulusan;
 - d. PPDB Online;
 - e. Karir Hub;
 - f. Bank Pohon;
 - g. Jogo Tuk;
 - h. Sipodang;
 - i. UKIR;
 - j. Sehati;
 - k. SIBAN BBM;
 - l. Siyap; dan
 - m. Silomas.
2. Magelang e-Office, menangani semua urusan perkantoran dan manajemen pemerintahan, diantaranya:
 - a. TTE;
 - b. Satu data; dan
 - c. E-Surat.
3. Aplikasi Penganggaran dan Evaluasi
 - a. E Sarpras;
 - b. Tape Ketan;
 - c. Sistem Informasi Obat;
 - d. Sinakkan; dan
 - e. Siskeudes.
4. Aplikasi Pengelolaan data SDM
 - a. LIKE;
 - b. SIPGAN; dan
 - c. SIMWAS.
5. Aplikasi Manajemen Aset dan Keuangan
 - a. AMMAS;
 - b. EPBB; dan
 - c. TPR Mobile.
6. Aplikasi Pengelolaan TIK (Aksesibilitas dan Utilitas)
 - a. Website Kabupaten Magelang Terintegrasi;
 - b. Webmail;
 - c. Media Elektronik/Digital;
 - d. Manajemen Layanan;
 - e. CSIRT; dan
 - f. SLO.

BAB IV ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelarasan rancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE Nasional, Instansi Pusat melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pengelola Satu Data Indonesia. Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan satu data Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan SDI

1. Arsitektur Data dan Informasi As-Is

Secara umum arsitektur data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dilihat berdasarkan proses bisnis yang berjalan, dalam implementasi sebuah proses bisnis akan terbagi menjadi beberapa layanan yang dimana layanan ini secara umum akan menggunakan aplikasi sebagai salah satu perangkat utama, dalam menjalankan aplikasi sendiri tentunya akan menggunakan data maupun informasi. Arsitektur data dapat menggambarkan relasi dukungan layanan dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Magelang dengan instansi yang menjadi stakeholder (K/L/D), atau yang disebut layanan eksternal. Arsitektur data ini nantinya akan menjadi komponen satu data lingkup Pemerintahan Kabupaten Magelang. Tujuan dari arsitektur data eksternal ini adalah terintegrasinya data dari layanan aplikasi kepada K/L/Pemda sebagai mitra dari Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga terwujud data yang unik untuk semua aplikasi yang saling terkait. Namun demikian data yang dikelola dalam aplikasi yang saat ini digunakan di Pemerintahan Kabupaten Magelang belum semua dikelompokkan ke dalam arsitektur data dan informasi sehingga perlu dilakukan pemetaan untuk kondisi arsitektur data dan informasi yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Magela

Tabel 4.1. Identifikasi Data Berdasarkan Aplikasi

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
KABMGL-RAA.02.01.01	Website resmi Kabupaten Magelang	Website resmi dari Kabupaten Magelang yang berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Kabupaten Magelang
KABMGL-RAA.02.01.02	Website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Sekretariat Kabupaten Magelang
KABMGL-RAA.02.01.03	Website resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Sekretariat DPRD
KABMGL-RAA.02.01.04	Website resmi Inspektorat Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Inspektorat
KABMGL-RAA.02.01.05	Website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABMGL-RAA.02.01.06	Website resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Kesehatan
KABMGL-RAA.02.01.07	Website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
KABMGL- RAA.02.01.08	Website resmi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
KABMGL- RAA.02.01.09	Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
KABMGL- RAA.02.01.10	Website resmi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang
KABMGL- RAA.02.01.11	Website resmi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
KABMGL- RAA.02.01.12	Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Lingkungan Hidup
KABMGL- RAA.02.01.13	Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
KABMGL- RAA.02.01.14	Website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang
KABMGL- RAA.02.01.15	Website resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Perhubungan
KABMGL- RAA.02.01.16	Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
KABMGL- RAA.02.01.17	Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABMGL- RAA.02.01.18	Website resmi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
KABMGL- RAA.02.01.19	Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KABMGL- RAA.02.01.20	Website resmi Dinas Pertanian dan Pangan	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Dinas Pertanian dan Pangan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
	Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang		
KABMGL-RAA.02.01.21	Website resmi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KABMGL-RAA.02.01.22	Website resmi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
KABMGL-RAA.02.01.23	Website resmi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KABMGL-RAA.02.01.24	Website resmi Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah
KABMGL-RAA.02.01.25	Website resmi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KABMGL-RAA.02.01.26	Website resmi Badan Penanggulangan	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
	Bencana Daerah Kabupaten Magelang	ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang		
KABMGL-RAA.02.01.27	Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KABMGL-RAA.02.01.28	Website resmi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
KABMGL-RAA.02.01.29	Website resmi RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang
KABMGL-RAA.01.01.01	eKatalog	E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan PengaRAAn Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas baik nasional maupun lokal yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.	RAD.09.03.03.06 Informasi Pembangunan Kewilayahan	Bagian PBJ Setda
KABMGL-RAA.01.02.01	SP4LAPOR	Aplikasi SP4N LAPOR memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait pelayanan publik atau isu-isu yang mereka alami	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika
KABMGL-RAA.01.02.02	SIPD	Sistem yang dirancang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih Adaptif,	RAD.09.03.03.06 Informasi	Bappeda Litbangda

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
		responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel.	Pembangunan Kewilayahan	
KABMGL-RAA.01.02.03	SPSE	SPSE Merupakan aplikasi Pemerintah Pusat yang digunakan untuk sistem Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Bagian PBJ Sekretariat Daerah
KABMGL-RAA.02.02.01	SIABA	Aplikasi SIABA Merupakan Kontrol Kedisiplinan ASN Kabupaten Magelang Berbasis Smart Phone (android, Mac OS Masih dalam Pengembangan)	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
KABMGL-RAA.02.02.02	SIYAP	Aplikasi SIYAP Merupakan aplikasi Siap Tanggap Darurat Untuk Kebencanaan Dan Layanan Masyarakat	RAD.09.03.03.03 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
KABMGL-RAA.02.02.03	JUGOTUK	Jogotuk adalah aplikasi dari DLH yang berfungsi untuk mendata semua mata-air yang ada di Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.04 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup
KABMGL-RAA.02.02.04	BANK POHON	Bank Pohon Merupakan aplikasi dari DLH yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai jenis phon tanpaharus datang langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup	RAD.09.03.03.04 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup
KABMGL-RAA.02.02.05	EPBB (Pajak Bumi dan Bangunan)	Aplikasi ini sebagai sarana masyarakat dalam membayar PBB	RAD.09.03.03.05 Informasi Ekonomi dan Industri	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
KABMGL- RAA.02.02.06	EBPHTB	Aplikasi ini sebagai sarana masyarakat dalam membayar BPHTB	RAD.09.03.03.05 Informasi Ekonomi dan Industri	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KABMGL- RAA.02.02.07	ESPTPD	Aplikasi untuk layanan menerbitkan nota tagihan pajak daerah (khususnya pajak catering)	RAD.09.03.03.05 Informasi Ekonomi dan Industri	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KABMGL- RAA.02.02.08	SIBATA Online (Bank Data Keuangan)	Apikasi berupa website sebagai pusat data dan informasi dari BPPKAD	RAD.09.03.03.05 Informasi Ekonomi dan Industri	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KABMGL- RAA.02.0.09	UKIR	e KIR adalah aplikasi untuk pendaftaran uji kendaraan secara online	RAD.09.03.03.05 Informasi Ekonomi dan Industri	Dinas Perhubungan
KABMGL- RAA.02.0.10	TAPEKETAN	TAPEKETAN Merupakan aplikasi pendataan penggunaa kartu tani dan pengecer pupuk bersubsidi berdasarkan sebaran wilayah per kelurahan	RAD.09.03.03.07 Data pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
KABMGL- RAA.02.02.11	PPID	PPID Merupakan aplikasi informasi terkait Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika
KABMGL- RAA.02.02.12	JELAJAH MAGELANG	Jelajah Magelah adalah aplikasi yang di bangun oleh pemerintah kabupaten magelang guna memudahkan para pengunjung atau wisatawan dalam menemukan atau menentukan tempat tempat wisata dan pusat perbelanjaan di kabupaten magelang	RAD.09.03.0304 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
KABMGL- RAA.02.02.13	BERITAMAGELANG	Berita Magelang merupakan media online resmi milik Pemerintah Daerah yang menyuguhkan berita seputar Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
KABMGL- RAA.02.02.14	PUSAKA GEMILANG	Pusaka Gemilang merupakan aplikasi layanan dan Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten Magelang Gemilang yang merupakan Portal Layanan Data Kabupaten Magelang.	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
KABMGL- RAA.02.02.15	OPEN DATA	Open data adalah aplikasi terkait dengan dengan penggunaan data yang bisa diakses dan di sebarakan secara berulang ulang oleh siapa saja.	RAD.09.03.03.01 Data Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
KABMGL- RAA.02.02.16	e-PIKIR	Bappeda & Litbangda sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dan untuk memudahkan hal tersebut Bappeda & Litbangda menerbitkan aplikasi e PIKIR	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Bappeda Litbangda
KABMGL- RAA.02.02.17	SIPGAN (Pelayanan Kepegawaian)	Aplikasi SIPGAN merupakan apalikasi yang di bangun sebagai media informasi terkait dengan kepegawian dikabupaten Magelang	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Derah
KABMGL- RAA.02.02.18	SIMETRO	Aplikasi untuk sarana masyarakat dalam mendaftarkan untuk pelaksanaan tera ulang timbangan	RAD.09.03.03.05 Informasi Ekonomi dan Industri	Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Magelang

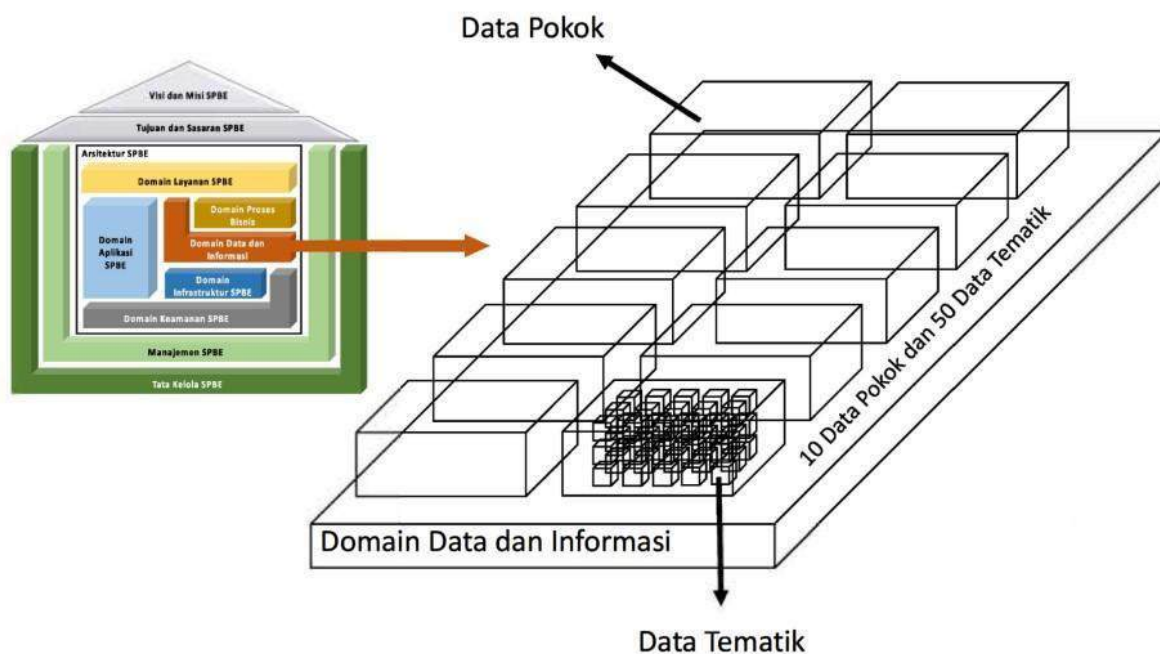
ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
KABMGL- RAA.02.02.19	SIMDIS (Sistem Infomasi Distribusi Kebutuhan Pokok)	Aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan dalam distribusi kebutuhan pokok	RAD.09.03.03.05 Informasi Ekonomi dan Industri	Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Magelang
KABMGL- RAA.02.02.20	APIMENOREH	Aplikasi pelayanan dokumen kependudukan	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KABMGL- RAA.02.02.21	AMONGRASA	Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa Pemerintah Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KABMGL- RAA.02.02.22	JDIH	JDIH Kabupaten Magelang adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Bagian Hukum Setda
KABMGL- RAA.02.02.23	SIKK (Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten) Magelang	Aplikasi pantauan bencana yang dibangun untuk dapat digunakan sebagai media pengelolaan dan respon bencana di wilayah Kabupaten Magelang dengan menggunakan Geographic Information System berbasis website sehingga dapat diakses dimana saja dengan koneksi internet	RAD.09.03.03.03 Informasi Pemerintahan Ketertiban Umum dan Keselamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KABMGL- RAA.02.02.24	SIMPONI	SOMPONI Adalah aplikasi layanan pendaftaran pasien secara online	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	RSUD Muntilan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
KABMGL- RAA.02.02.25	SIMWAS ONLINE	Aplikasi pengawasan Inspektorat	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Inspektorat
KABMGL- RAA.02.02.26	Sehati	Aplikasi terkait dengan informasi harga komoditi dikabupaten magelang	RAD.09.03.03.05 Informasi Ekonomi dan Industri	Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Magelang
KABMGL- RAA.02.02..27	ETLE	ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Kepolisian
KABMGL- RAA.02.02.28	SI SUNAN DUKUH	Si Sunan Dukuh ini merupakan upaya untuk mempercepat penyusunan produk hukum daerah; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Bagian Hukum Setda
KABMGL- RAA.02.02.29	SIMPUS	SIMPUS merupakan suatu Aplikasi Manajemen Puskesmas dimana fungsi utamanya adalah memanage data pasien mulai dari pendaftaran, registrasi, pemeriksaan (diagnosis) serta pengobatan pasien	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Kesehatan
KABMGL- RAA.02.02.30	SISTEM INFORMASI OBAT	Aplikasi tentang system informasi penggunaan obat di dinas kesehatan kabupaten magelang.	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Kesehatan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
KABMGL- RAA.02.02.31	SIMLAP		RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Kesehatan
KABMGL- RAA.02.02.32	SISMIOP	Aplikasi ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak. Sebuah sistem yang dipakai oleh pengelola perpajakan di daerah yang tanggung jawabnya dipegang oleh dinas pendapatan daerah.	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KABMGL- RAA.02.02.33	TPR MOBILE	Aplikasi pengelolaan retribusi galian c kabupaten magelang	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KABMGL- RAA.02.02.34	PPDB ONLINE	PPDB Online merupakan sebuah sistem layanan inovatif terpadu yang dirancang untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan proses seleksi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABMGL- RAA.02.02.35	PENGUMUMAN KELULUSAN	Aplikasi informasi kelulusan peser didik pada tahun ajaran baru	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABMGL- RAA.02.02.36	SITEMPAT	Aplikasi yang menyediakan berbagai macam layanan yang bisa didownload dan diakses menggunakan handphone	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika
KABMGL- RAA.02.02.37	MPP	Merupakan aplikasi antrian layanan pada Mal Pelayan Publik Kabupaten Magelang	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
KABMGL- RAA.02.02.37	DAPODIK	Aplikasi Dapodik Aplikasi Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian.	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABMGL- RAA.02.02.39	SIBAN BBM	Layanan bantuan BBM di Kabupaten Magelang kedalam satu aplikasi mobile sehingga mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang ada	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABMGL- RAA.02.02.40	QUANTUM GIS	Aplikasi Open Source yang digunakan oleh Distrik untuk memetakan wilayah yang memiliki sumber daya pangan dan ketersediaan lubang pangan	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Pertanian dan Pangan
KABMGL- RAA.02.02.41	SIKOTES	Aplikasi permohonan layanan terkait dengan Teknologi Informasi	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika
KABMGL- RAA.02.01.42	SIPODANG	Aplikasi pembayaran retribusi sampah online	RAD.09.03.03.02 Informasi Pemerintahan Umum	Dinas Lingkungan Hidup

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan keterhubungan antara domain data dan informasi dengan proses bisnis. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa penyusunan proses bisnis dan memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta mendukung penerapan Aplikasi SPBE.



Gambar 4.2 Struktur Referensi Data dan Informasi Tingkat Nasional

Berdasarkan karakteristik dari data yang ada, data yang dikelola di Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori data pokok kode 02 (Informasi Ekonomi dan Industri), kode 03 (Informasi Pembangunan Kewilayahan), kode 04 (Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan), kode 05 (Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan), kode 06 (Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja), kode 07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam), kode 09 (Informasi Pemerintahan Umum)

Adapun Referensi Data dan Informasi (RD) Tingkat Nasional dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. 2. Referensi Data dan Informasi (RD) Tingkat Nasional

Kode	Referensi	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Ekonomi dan Industri (2)		
RAD.02.01	Data Perindustrian	Data yang merepresentasikan bidang perindustrian
RAD.02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan
RAD.02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian
RAD.02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan
RAD.02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan
RAD.02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang investasi
RAD.02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang koperasi

Kode	Referensi	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang usaha kecil dan menengah
RAD.02.11	Data Pariwisata	Data yang merepresentasikan bidang pariwisata
Informasi Pembangunan Kewilayahan (3)		
RAD.03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum
RAD.03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi
RAD.03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi
RAD.03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan
RAD.03.06	Data Pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan
RAD.03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (4)		
RAD.04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan
RAD.04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial
RAD.04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (5)		
RAD.05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (6)		
RAD.06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan
RAD.06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan
RAD.06.03	Data Ilmu Pengetahuan	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan
RAD.06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemuda
RAD.06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang olahraga
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (7)		
RAD.07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup
Informasi Budaya dan Agama (8)		
RAD.08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan
Informasi Pemerintahan Umum (9)		
RAD.09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri

Kode	Referensi	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara
RAD.09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi
RAD.09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan
RAD.09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
RAD.09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara

Berdasarkan kategori rancangan arsitektur data, maka dipetakan data yang dikelola dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Magelang, dimana pemetaan dilakukan hingga sub topik dari rancangan arsitektur data yang nantinya menjadi data utama dalam domain arsitektur data, pemetaan data berdasarkan rancangan arsitektur data dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3 Pemetaan Data Pokok, Data Tematik, Data Topik, dan Data Sub Topik

Data Tematik	Data Topik	Data Sub Topik
Informasi Ekonomi dan Industri		
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 Data Perindustrian	RAD. 02.01.01 Peningkatan daya saing dan kemandirian industri
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 Data Perindustrian	RAD. 02.01.07 Pengelolaan Industri Kreatif
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD. 02.02.01 Penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.07 Pengembangan kualitas SDM pertanian
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.12 Pengelolaan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan tanaman pangan dan hortikultura
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.16 Pengelolaan alat dan mesin pertanian
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.18 Pengelolaan layanan perizinan berusaha bidang pertanian dan perlindungan varietas tanaman
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.19 Ketersediaan Pangan
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	RAD.02.05.04 Pengelolaan kesehatan hewan
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.02 Pengelolaan perikanan budidaya
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.03 Penguatan daya saing produk perikanan
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.04 Pengawasan pengelolaan budidaya
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.01 Pengembangan iklim penanaman modal
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.02 Kerja sama penanaman modal
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.03 Promosi penanaman modal
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.04 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	RAD.02.09.01 Pembinaan koperasi

Data Tematik	Data Topik	Data Sub Topik
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	RAD.02.09.03 Pemberdayaan dan pembiayaan koperasi
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	RAD.02.09.04 Pengawasan koperasi
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02.10.02 Usaha Kecil dan Menengah
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.02 Destinasi pariwisata
Informasi Pembangunan Kewilayahan		
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pengelolaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Data Transmigrasi	RAD.03.02.01 Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.01 Pelayanan transportasi
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 Data Perumahan	RAD.03.04.01 Penataan bangunan gedung
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 Data Perumahan	RAD.03.04.02 Pengembangan kawasan permukiman
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 Data Perumahan	RAD.03.04.04 Penyelenggaraan perumahan
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 Data Pertanahan	RAD.03.06.01 Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.01 Pengendalian Penduduk
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.02 Keluarga Berencana dan Kesehatan
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.03 Pembangunan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan		

Data Tematik	Data Topik	Data Sub Topik
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.01 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.01 Kesetaraan gender
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan		
RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	RAD.05.02.01 Pemeliharaan keamanan dan ketertiban
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja		
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.05 Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	RAD.06.03.01 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Data Tematik	Data Topik	Data Sub Topik
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 Data Pemuda	RAD.06.04.01 Pemberdayaan Pemuda
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 Data Olahraga	RAD.06.05.01 Pembudayaan Olahraga
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam		
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02 Pelestarian lingkungan hidup
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.03 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.04 Pengelolaan Sampah
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.05 Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.07 Penyelenggaraan Kemitraan lingkungan
Informasi Budaya dan Agama		
RAD.08 Data Kebudayaan	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan
Informasi Pemerintahan Umum		
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.01 Politik dan pemerintahan umum
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.04 Pembinaan pemerintahan desa
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.01 Anggaran
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.02.01 Anggaran
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.06.01 Layanan
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Layanan

Data Tematik	Data Topik	Data Sub Topik
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.11 Pengembangan nilai-nilai kebangsaan

Dapat dilihat berdasarkan pemetaan untuk perwakilan setiap data berdasarkan referensi arsitektur dimana diambil dari kondisi saat ini di Pemerintahan Kabupaten Magelang terkait dari data dan informasi. Setiap data yang diolah pada proses pelaksanaan layanan di Pemerintah Kabupaten Magelang akan memiliki referensi arsitektur data dan informasi sehingga dapat dikelompokkan sebagai salah satu *resource* untuk implementasi satu data kedepannya.

Arsitektur Data dan Informasi juga dapat dibentuk berdasarkan proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang. Data merupakan aset yang digunakan ataupun yang diperoleh dari proses bisnis, sehingga arsitektur data dan Informasi memiliki kaitan yang erat dengan arsitektur proses bisnis. Data Topik dan data subtopik yang ada pada Tabel 4.3 dijadikan dasar pembuatan arsitektur data dan informasi berdasarkan pengelompokan proses bisnis utama dan pendukung, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

KABMGL.01

KABMGL.01.01

Data Pendidikan

RAD.06.01.05.02
Data Sekolah

RAD.06.01.05.08
Data Pokok Pendidikan

KABMGL.01.02

Data Pendidikan

RAD.06.01.01.01
Data Guru dan Tendik

KABMGL.01.03

Data Pemuda

RAD.06.01.05.02
Data Sekolah

KABMGL.01.04

Data Olahraga

RAD.06.05.01.01
Data Kelompok Olahraga

KABMGL.01.05

Data Pendidikan

RAD.06.01.05.15
Data Kepramukaan

KABMGL.01.06

Data Kebudayaan

RAD.08.02.01.01
Data Kelompok Penghayat

KABMGL.01.07

Data Kebudayaan

RAD.08.02.01.02
Data Seni Tradisional

KABMGL.01.08

Data Kebudayaan

RAD.08.02.01.03
Data Cagar Budaya

KABMGL.02

KABMGL.02.01

Data Kesehatan

RAD.04.01.06.01
Data Layanan Kesehatan

RAD.04.01.06.08
Data Fasilitas Kesehatan

KABMGL.02.02

Data Kesehatan

RAD.04.01.01.01
Data Tenaga Medis

RAD.04.01.01.01
Data Tenaga Medis

KABMGL.02.03

Data Kesehatan

RAD.04.01.02.04
Data Obat yang Dibutuhkan

KABMGL.02.04

Data Kesehatan

RAD.04.01.06.17
Data Posyandu

RAD.04.01.06.18
Data Ibu dan Anak

KABMGL.02.05

Data Kependudukan

RAD.03.07.01.01
Data Penduduk

KABMGL.02.06

Data Kependudukan

RAD.03.07.02.01
Data Peserta KB

KABMGL.02.07

Data Kependudukan

RAD.03.07.03.01
Data Keluarga Sejahtera

KABMGL.03

KABMGL.03.01

Data Sosial

RAD.04.02.04.22
Data Pemberdayaan Masyarakat

RAD.04.02.04.24
Data Kesejahteraan Sosial
Masyarakat

KABMGL.03.02

Data Sosial

RAD.04.02.01.01
Data Penyandang Disabilitas yang
Membutuhkan

RAD.04.02.01.07 Data PMKS
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
Napza yang Membutuhkan

KABMGL.03.03

Data Sosial

RAD.04.02.02.01
Data Kelompok Rentan

RAD.04.02.02.02
Data Fakir Miskin

KABMGL.03.04

Data Sosial

RAD.04.02.06.05
Data Informasi Bencana Alam

RAD.04.02.06.07
Data Kebutuhan Pasca Bencana

KABMGL.04

KABMGL.04.01

Data Pertanian

RAD.02.03.19.01
Data Kemandirian Pangan

KABMGL.04.02

Data Pertanian

RAD.02.03.19.02
Data Diversifikasi Pangan

KABMGL.04.03

Data Pertanian

RAD.02.03.19.03
Data Kerawanan Pangan

KABMGL.04.04

Data Pertanian

RAD.02.03.19.04
Data Keamanan Pangan

RAD.02.03.19.08
Data Ketahanan Pangan

KABMGL.05

KABMGL.05.01

Data Ketenagakerjaan

RAD.06.02.01.01
Data Lembaga Pelatihan Kerja

RAD.06.02.01.02
Data Instruktur yang tersertifikasi

KABMGL.05.02

Data Ketenagakerjaan

RAD.06.02.02.01
Data Pencari Kerja

KABMGL.05.03

Data Ketenagakerjaan

RAD.06.02.03.01
Data Perusahaan

RAD.06.02.03.03
Data Serikat Pekerja

KABMGL.05.04

Data Transmigrasi

RAD.03.02.01.01
Data Lokasi Transmigrasi

KABMGL.06

KABMGL.06.01

Data Pemberdayaan

RAD.04.03.01.01
Data Kesetaraan Gender

KABMGL.06.02

Data Pemberdayaan

RAD.04.03.03.01
Data Kekerasan terhadap perempuan

KABMGL.06.03

Data Pemberdayaan

RAD.04.03.02.01
Data Anak yang tidak terpenuhi hak nya

KABMGL.06.04

Data Pemberdayaan

RAD.04.03.04.01
Data Kekerasan terhadap anak

KABMGL.07

KABMGL.07.01

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.04.03
Data Sampah

RAD.07.05.04.04
Data Angkutan Sampah

KABMGL.07.02

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.01.01
Data DED lingkungan
Hidup

KABMGL.07.03

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.03.01
Data Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)

KABMGL.07.04

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.07.02
Data Keanekaragaman
Hayati

KABMGL.07.05

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.05.01
Data Pengelolaan
Limbah B3

KABMGL.07.06

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.02.01
Data Kualitas Air Sungai

KABMGL.07.07

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.07.03
Data Masyarakat
Hukum Adat

KABMGL.07.08

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.07.04
Data Peserta Pelatihan
Lingkungan Hidup

KABMGL.07.09

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.07.06
Data Penghargaan
Lingkungan Hidup

KABMGL.07.10

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.07.01
Data Pengaduan
Lingkungan Hidup

KABMGL.07.11

Data Lingkungan Hidup

RAD.07.05.04.05
Data Kegiatan
Persampahan

KABMGL.08

KABMGL.08.01

Data Pekerjaan Umum

RAD.03.01.01.01
Data Irigasi

KABMGL.08.02

Data Perumahan

RAD.03.04.04.01
Data Air Minum

KABMGL.08.03

Data Perumahan

RAD.03.04.04.02
Data Pengelolaan Air Limbah

KABMGL.08.04

Data Perumahan

RAD.03.01.01.02
Data Pengelolaan Drainase

KABMGL.08.05

Data Perumahan

RAD.03.04.02.01
Data Pengembangan pemukiman

KABMGL.08.06

Data Perumahan

RAD.03.04.01.01
Data pembangunan bangunan gedung

KABMGL.08.07

Data Perumahan

RAD.03.04.01.03
Data Pembangunan Masjid

KABMGL.08.08

Data Pekerjaan Umum

RAD.03.01.01.03
Data Kondisi Jalan

KABMGL.08.09

Data Pekerjaan Umum

RAD.03.01.01.07
Data Jasa Konstruksi

KABMGL.08.10

Data Pertanahan

RAD.03.06.01.01
Data Penataan Ruang

KABMGL.08.11

Data Perumahan

RAD.03.04.04.03
Data Perumahan

KABMGL.08.12

Data Perumahan

RAD.03.04.04.10
Data Pengembangan Kawasan Pemukiman

KABMGL.08.13

Data Perumahan

RAD.03.04.04.11
Data Usulan penataan kawasan kumuh

KABMGL.08.14

Data Perumahan

RAD.03.04.04.16
Data Sarana Prasarana dan Utilitas Umum

KABMGL.08.15

Data Perumahan

RAD.03.04.04.17
Data pelayananan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

KABMGL.08.16

Data Perumahan

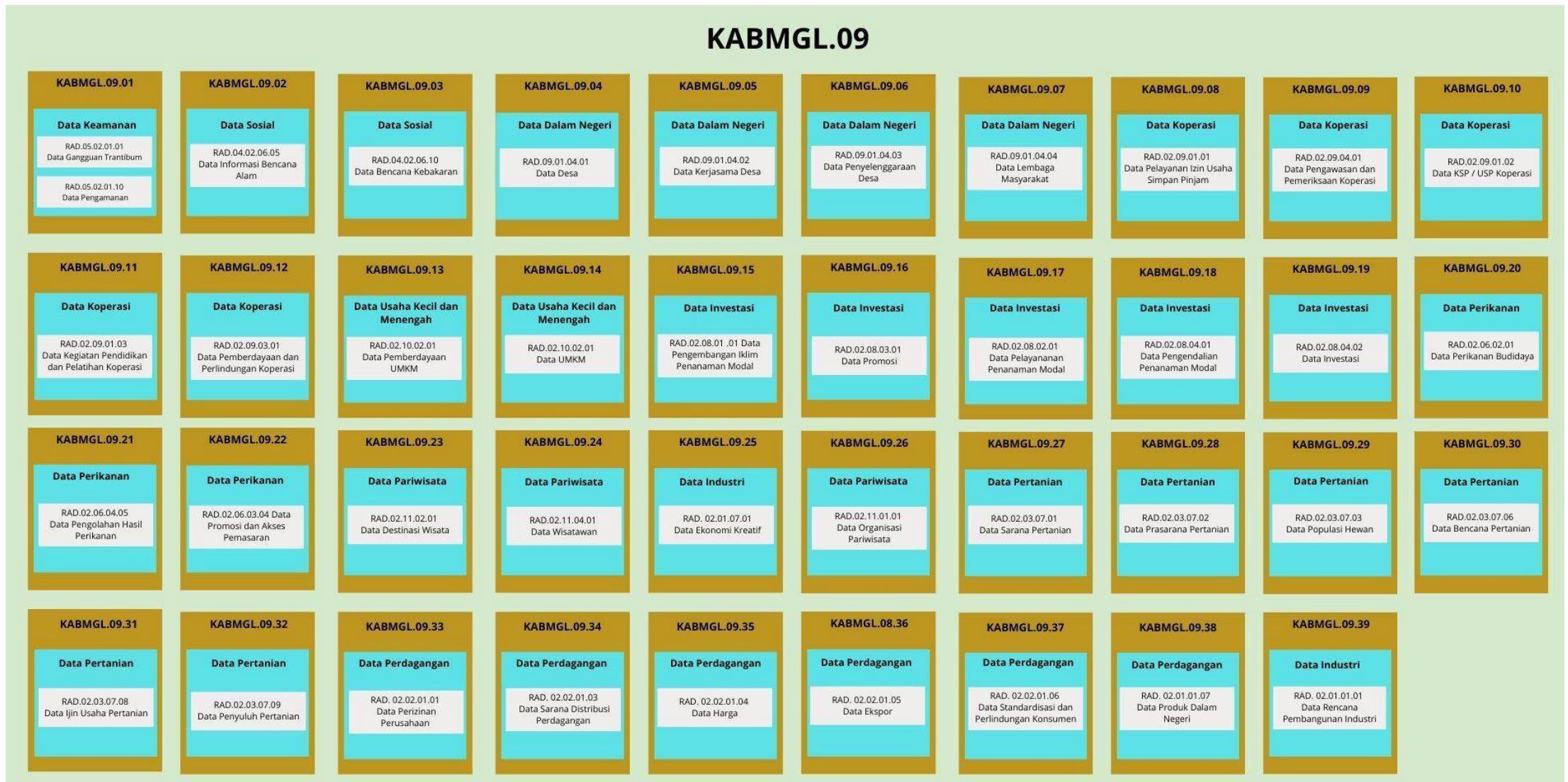
RAD.03.04.04.18
Data Ganti Rugi Tanah

KABMGL.08.17

Data Transportasi

RAD.03.03.01.01
Data Kendaraan

RAD.03.03.01.05
Data Sarana Prasarana Lalu Lintas



Gambar 4.3 Pemetaan Data berdasarkan Proses Bisnis Utama

KABMGL.10

KABMGL.10.01

Data Dalam Negeri

RAD.09.01.05.01 Data Produk hukum

RAD.09.01.05.03 Data Hibah bansos

KABMGL.10.02

Data Dalam Negeri

RAD.09.01.05.06 Data Kegiatan OPD

RAD.09.01.05.07 Data Kinerja OPD

KABMGL.10.03

Data Dalam Negeri

RAD.09.01.05.01 Data Kegiatan Anggota DPRD

KABMGL.10.04

Data Perencanaan Pembangunan Nasional

RAD.09.01.05.01 Data Kegiatan Anggota DPRD

KABMGL.10.05

Data Perencanaan Pembangunan Nasional

RAD.09.05.01.03 Data Koordinasi Perencanaan Daerah

KABMGL.10.06

Data Ilmu Pengetahuan

RAD.06.03.02.01 Data Publikasi Penelitian

KABMGL.10.07

Data Aparatur Negara

RAD.09.06.04 Data Pengawasan

KABMGL.10.08

Data Aparatur Negara

RAD.09.06.04 Data Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

KABMGL.11

KABMGL.11.01

Data Informasi

RAD.09.03.03 Data Informasi dan Komunikasi Publik

KABMGL.11.02

Data Informasi

RAD.09.03.02 Data Aplikasi Informatika

KABMGL.11.03

Data Informasi

RAD.09.03.04 Data Statistik Sektoral

KABMGL.11.04

Data Informasi

RAD.09.03.08 Data Keamanan Informasi

KABMGL.12

KABMGL.12.01

Data Keuangan

RAD.09.02.01 Data Keuangan Daerah

KABMGL.12.02

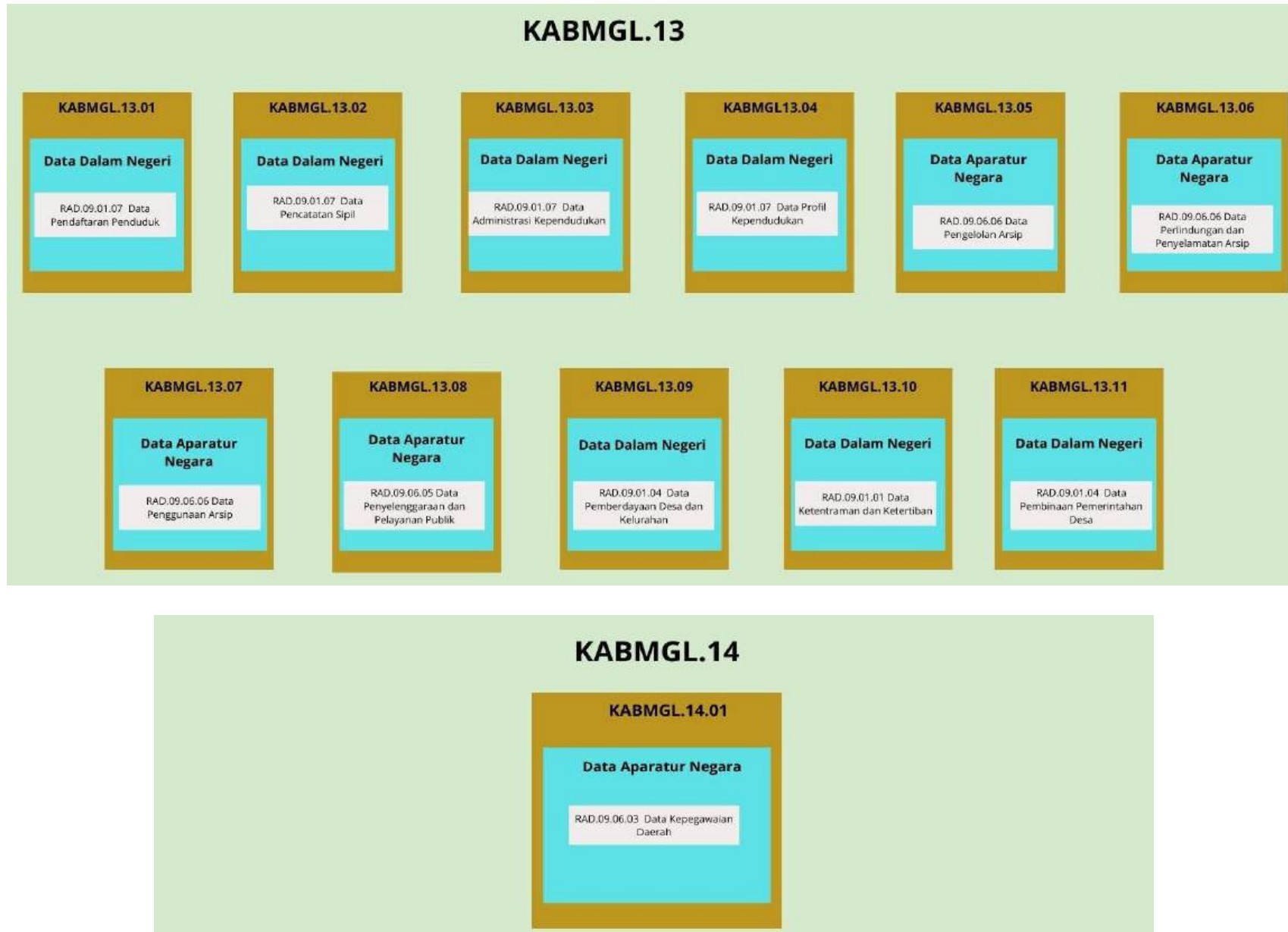
Data Keuangan

RAD.09.02.06 Data Aset/ Barang Daerah

KABMGL.12.03

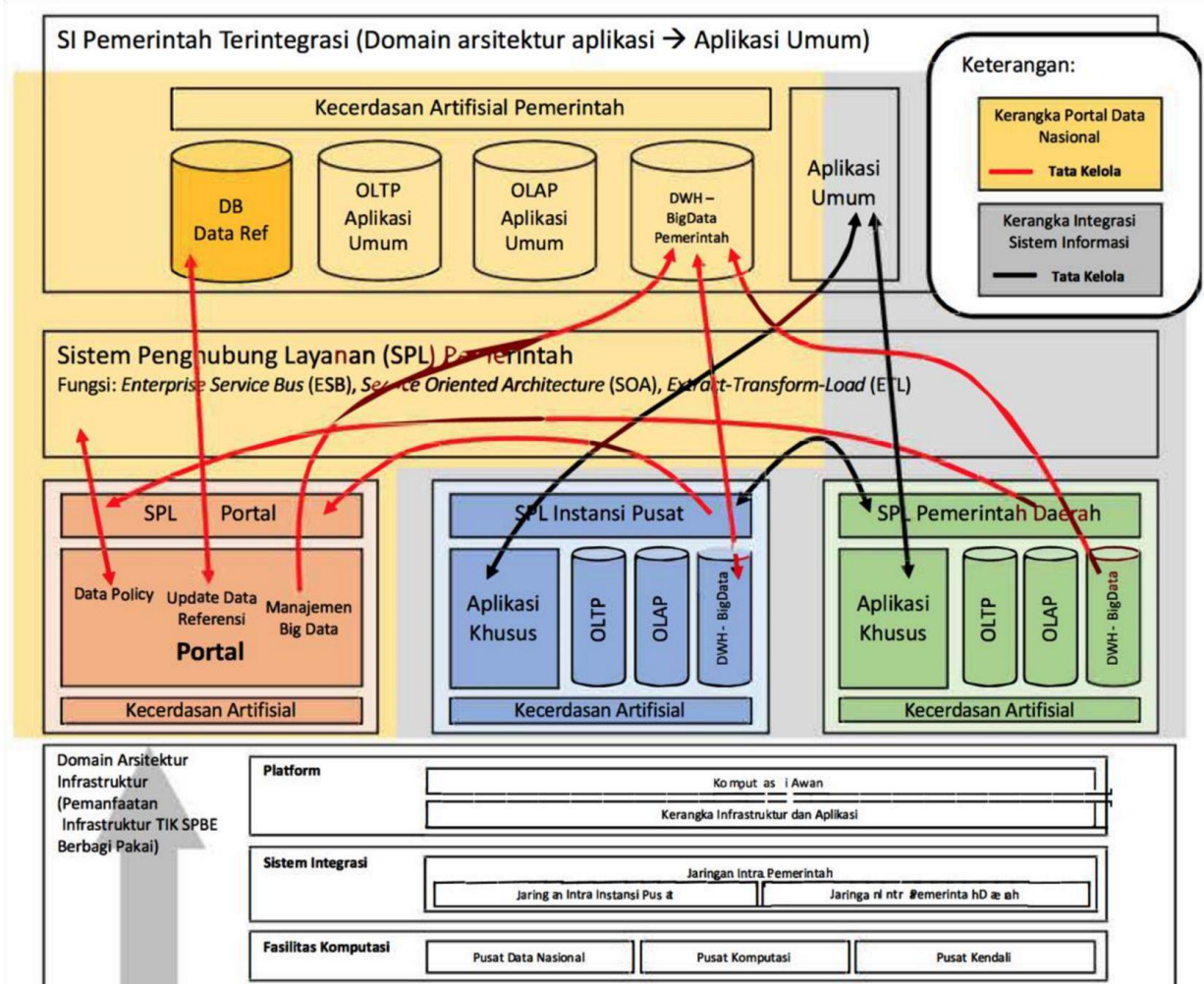
Data Keuangan

RAD.09.02.03 Data Pendapatan Daerah



Gambar 4.4 Pemetaan Data berdasarkan Proses Bisnis Pendukung

Saat ini, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) digunakan pada proses integrasi data, dengan memanfaatkan jaringan konektivitas pada Pemerintah Kabupaten Magelang (LAN, WAN, dan internet) sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung. Interkoneksi yang dibutuhkan dalam operasional aplikasi umum dalam bentuk SPLP, fungsi extract, transform, load (ETL) untuk interkoneksi ke database yang diperlukan dalam SI Pemerintah Terintegrasi. Proses integrasi ini termasuk sinkronisasi semua data dan informasi yang dimiliki oleh IPPD melalui Application Programming Interface (API) antara sistem/aplikasi yang dikembangkan IPPD dengan Portal SDI.



Gambar 4.5 Kerangka Portal Data Nasional dan Integrasi SI

Namun demikian, fasilitas komputasi di Pemerintah Kabupaten Magelang belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi pusat data nasional, pengembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan big data. Dalam Perpres No 95 Tahun 2018 disebutkan bahwa penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah. Perangkat keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini terdiri dari perangkat firewall yang terdapat komponen proxy, content filtering, intrusion detection and prevention, identity and access management, public key infrastructure (SSL), dan antivirus. Komponen antivirus terdapat antimalware dan antispam serta patch management.

2. Arsitektur Data dan Informasi To-Be

Tahap awal dalam penyusunan arsitektur data dan informasi adalah optimasi arsitektur data dan informasi melalui taktik business driven. Pada fase ini, Pemerintah Kabupaten Magelang akan menentukan fokusnya untuk mengoptimalkan arsitektur data dan informasi berdasarkan driver bisnis yang

umumnya dirasakan oleh sebagian besar organisasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut

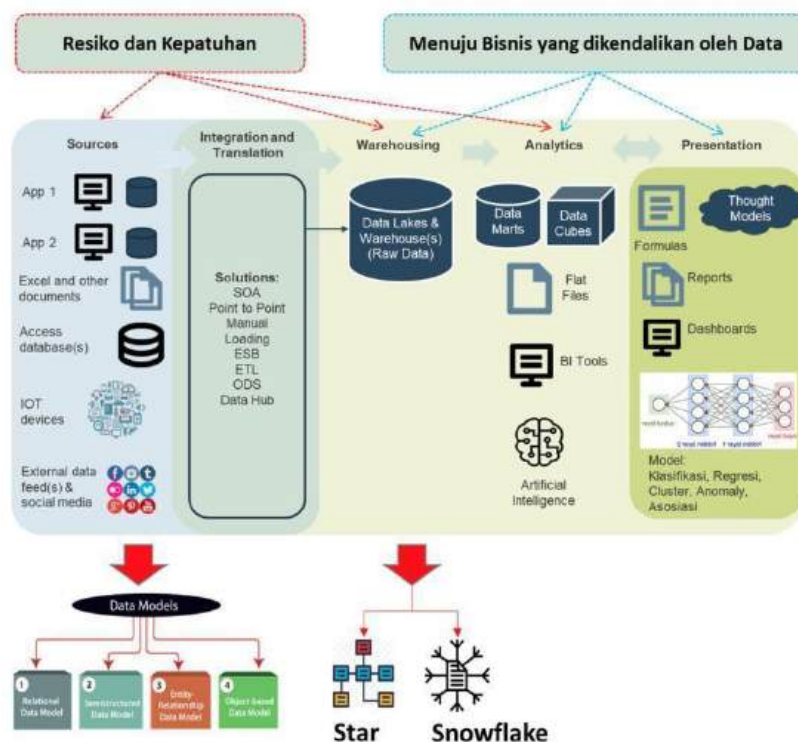


Gambar 4.6 Empat Penggerak Utama Arsitektur Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI, dan Rencana Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE nasional, penggerak utama penyusunan Arsitektur Data dan Informasi berkaitan dengan risiko dan kepatuhan serta menuju bisnis yang dikendalikan oleh data. Setelah 2 (dua) pendorong utama ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan pada Lima Lapisan Utama Model Arsitektur Data dan Informasi.

Dari pemetaan tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan sumber-sumber data yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Sumber data yang dikumpulkan berupa data terstruktur yang berasal dari aplikasi, dokumen, file, dll juga data tidak terstruktur yang berasal dari media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.

Penyusunan arsitektur data dan informasi didasarkan pada referensi arsitektur data dan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Magelang yang merupakan instansi pusat perlu melakukan identifikasi berkaitan dengan data pada tingkat 3 (data topik) dan tingkat 4 (data subtopik). Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan dalam penyusunan arsitektur data dan informasi adalah memetakan data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Hasil identifikasi dari karakteristik data yang ada saat ini di Pemerintah Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa data pokok kode 02 (Informasi Ekonomi dan Industri), kode 03 (Informasi Pembangunan Kewilayahan), kode 04 (Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan), kode 05 (Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan), kode 06 (Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja), kode 07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam) dan kode 09 (Informasi Pemerintahan Umum) merupakan data pokok yang paling relevan.



Gambar 4.7 Pemetaan Penggerak Utama Pada Lima Lapisan Utama Model Arsitektur Data dan Informasi

Target Pengelolaan data adalah terwujudnya Satu Data Pemerintah Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung Big Data dan Analytics khususnya yang melibatkan proses bisnis utama yaitu KABMGL.01, KABMGL.02, KABMGL.03, KABMGL.04, KABMGL.05, KABMGL.06, KABMGL.07, KABMGL.08 dan KABMGL.09.

3. Identifikasi Kebutuhan Data Pemerintah Kabupaten Magelang

Kebutuhan data yang saat ini perlu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, baik berkaitan dengan kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas kinerja dan SDM aparatur. Berikut identifikasi kebutuhan data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

1. Data Administrasi Kepegawaian
2. Data Peningkatan Kompetensi SDM
3. Data Bahan/Referensi Pembuatan Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan, dll)
4. Data Kerangka Regulasi
5. Data Hasil Evaluasi Kebijakan/Data Persetujuan
6. Data Kerjasama
7. Data Kunjungan Kerja

Salah satu strategi dalam implementasi program satu data Pemerintah Kabupaten Magelang dengan penyusunan data warehouse di Pemerintah Kabupaten Magelang sudah direncanakan sebelumnya. Penyusunan data warehouse di Pemerintah Kabupaten Magelang dimulai dengan melakukan identifikasi database dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. *Database* Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
2. *Database* Kelembagaan dan Tata Laksana;
3. *Database* SDM Aparatur;
4. *Database* Pelayanan Publik;
5. *Database* Aset, Keuangan dan Anggaran;
6. *Database* Kepegawaian; dan
7. *Database* Kebijakan dan regulasi.

Hasil pemetaan database tersebut terhadap data pendukung yang bersesuaian dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.4 Pemetaan Data Berdasarkan Sub Data

Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
RAD.02.01	Data Industri	RAD. 02.01.01	Peningkatan daya saing dan kemandirian industri	RAD. 02.01.01.01	Data Rencana Pembangunan Industri
				RAD. 02.01.01.02	Data Sistem Informasi Industri
RAD.02.01	Data Industri	RAD. 02.01.07	Pengelolaan Industri Kreatif	RAD. 02.01.07.01	Data Ekonomi Kreatif
RAD.02.02	Data Perdagangan	RAD. 02.02.01	Penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri	RAD. 02.02.01.01	Data Perizinan Perusahaan
				RAD. 02.02.01.02	Data Pendaftaran Perusahaan
				RAD. 02.02.01.03	Data Sarana Distribusi Perdagangan
				RAD. 02.02.01.04	Data Harga
				RAD. 02.02.01.05	Data Ekspor
				RAD. 02.02.01.06	Data Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
				RAD. 02.02.01.07	Data Produk Dalam Negeri
RAD.02.03	Data Pertanian	RAD.02.03.07	Pengembangan kualitas SDM pertanian	RAD.02.03.07.01	Data Penyuluh Pertanian
				RAD.02.03.07.02	Data Kegiatan Penyuluhan Pertanian
RAD.02.03	Data Pertanian	RAD.02.03.12	Pengelolaan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan tanaman pangan dan hortikultura	RAD.02.03.12.01	Data Bencana Pertanian
				RAD.02.03.12.02	Data Penanggulangan Bencana Pertanian
RAD.02.03	Data Pertanian	RAD.02.03.16	Pengelolaan alat dan mesin pertanian	RAD.02.03.16.01	Data Sarana Pertanian
				RAD.02.03.16.02	Data Prasarana Pertanian
RAD.02.03	Data Pertanian	RAD.02.03.18	Pengelolaan layanan perizinan berusaha bidang pertanian dan perlindungan varietas tanaman	RAD.02.03.18.01	Data Ijin Usaha Pertanian

Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
RAD.02.03	Data Pertanian	RAD.02.03.19	Ketersediaan Pangan	RAD.02.03.19.01	Data Kemandirian Pangan
				RAD.02.03.19.02	Data Diversifikasi Pangan
				RAD.02.03.19.03	Data Kerawanan Pangan
				RAD.02.03.19.04	Data Keamanan Pangan
				RAD.02.03.19.05	Data Luas Tanam
				RAD.02.03.19.06	Data Luas Panen
				RAD.02.03.19.07	Data Produksi
				RAD.02.03.19.08	Data Ketahanan Pangan
				RAD.02.03.19.09	Data Kelompok Tani
				RAD.02.03.19.10	Data Penyuluh Pertanian
RAD.02.05	Data Peternakan	RAD.02.05.04	Pengelolaan kesehatan hewan	RAD.02.05.04.01	Data Populasi Hewan
				RAD.02.05.04.02	Data Kesehatan Hewan
				RAD.02.05.04.03	Data Kesehatan Masyarakat Veteriner
RAD.02.06	Data Perikanan	RAD.02.06.02	Pengelolaan perikanan budidaya	RAD.02.06.02.01	Data Perikanan Budidaya
				RAD.02.06.02.02	Data Unit Pembenihan
				RAD.02.06.02.03	Data Target Produksi
RAD.02.06	Data Perikanan	RAD.02.06.03	Penguatan daya saing produk perikanan	RAD.02.06.03.01	Data Standardisasi
				RAD.02.06.03.02	Data Inovasi produk dan nilai tambah
				RAD.02.06.03.03	Data Pemberdayaan usaha
				RAD.02.06.03.04	Data Promosi dan akses pemasaran
RAD.02.06	Data Perikanan	RAD.02.06.04	Pengawasan pengelolaan budidaya	RAD.02.06.04.01	Data dan Peta Diversifikasi Produk Perikanan
				RAD.02.06.04.02	Data Konsumsi Ikan
				RAD.02.06.04.03	Data Pasokan Ikan
				RAD.02.06.04.04	Data Pelaku Usaha
				RAD.02.06.04.05	Data Pengolahan Hasil Perikanan

Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
RAD.02.08	Data Investasi	RAD.02.08.01	Pengembangan iklim penanaman modal	RAD.02.08.01.01	Data Pengembangan iklim penanaman modal
RAD.02.08	Data Investasi	RAD.02.08.02	Kerja sama penanaman modal	RAD.02.08.02.01	Data Pelayanan Penanaman Modal
RAD.02.08	Data Investasi	RAD.02.08.03	Promosi penanaman modal	RAD.02.08.03.01	Data Promosi
RAD.02.08	Data Investasi	RAD.02.08.04	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	RAD.02.08.04.01	Data Pengendalian Penanaman Modal
				RAD.02.08.04.02	Data Investasi
RAD.02.09	Data Koperasi	RAD.02.09.01	Pembinaan koperasi	RAD.02.09.01.01	Data Usaha Simpan Pinjam
				RAD.02.09.01.02	Data KSP / USP Koperasi
				RAD.02.09.01.03	Data Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
				RAD.02.09.01.04	Data Peserta Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
RAD.02.09	Data Koperasi	RAD.02.09.03	Pemberdayaan dan pembiayaan koperasi	RAD.02.09.03.01	Data Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
RAD.02.09	Data Koperasi	RAD.02.09.04	Pengawasan koperasi	RAD.02.09.04.01	Data Pengawasan dan Pemeriksaan Koperas
				RAD.02.09.04.02	Data Jumlah Koperasi
RAD.02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02.10.02	Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02.10.02.01	Data Pemberdayaan UMKM
				RAD.02.10.02.02	Data UMKM
RAD.02.11	Data Pariwisata	RAD.02.11.01	Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata	RAD.02.11.01.01	Data Organisasi Pariwisata
				RAD.02.11.01.02	Data SDM Kepariwisata
RAD.02.11	Data Pariwisata	RAD.02.11.02	Destinasi pariwisata	RAD.02.11.02.01	Data Destinasi Wisata
				RAD.02.11.02.02	Data Jumlah Kegiatan Event
RAD.02.11	Data Pariwisata	RAD.02.11.04	Pemasaran pariwisata	RAD.02.11.04.01	Data Wisatawan
				RAD.02.11.04.02	Data Promosi Wisata

Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
RAD.03.01	Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01	Pengelolaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	RAD.03.01.01.01	Data Irigasi
				RAD.03.01.01.02	Data Pengelolaan Drainase
				RAD.03.01.01.03	Data Drainase yang tertangani
				RAD.03.01.01.04	Data Kondisi Jalan
				RAD.03.01.01.05	Data Pembangunan Jalan dan Jembatan
				RAD.03.01.01.06	Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				RAD.03.01.01.07	Data Jasa Konstruksi
RAD.03.02	Data Transmigrasi	RAD.03.02.01	Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi	RAD.03.02.01.01	Data Lokasi Transmigrasi
RAD.03.03	Data Transportasi	RAD.03.03.01	Pelayanan transportasi	RAD.03.03.01.01	Data Kendaraan
				RAD.03.03.01.02	Data Marka
				RAD.03.03.01.03	Kendaraan Wajib UJI KIR
				RAD.03.03.01.04	Data Parkir
				RAD.03.03.01.05	Sarana Prasarana Lalu Lintas
				RAD.03.03.01.06	CCTV
				RAD.03.03.01.07	Zebra Cross
				RAD.03.03.01.08	Penerangan Jalan Umum
RAD.03.04	Data Perumahan	RAD.03.04.01	Penataan bangunan gedung	RAD.03.04.01.01	Data pembangunan bangunan gedung
				RAD.03.04.01.02	Data Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung
				RAD.03.04.01.03	Data Pembangunan Masjid
				RAD.03.04.01.04	Data pembangunan Sarana dan Prasarana selain Masjid
RAD.03.04	Data Perumahan	RAD.03.04.02	Pengembangan kawasan permukiman	RAD.03.04.02.01	Data Pengembangan pemukiman
				RAD.03.04.02.02	Luas Wilayah Pemukiman

Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
RAD.03.04	Data Perumahan	RAD.03.04.04	Penyelenggaraan perumahan	RAD.03.04.04.01	Data Air Minum
				RAD.03.04.04.02	Data Pengelolaan Air Limbah
				RAD.03.04.04.03	Data Perumahan
				RAD.03.04.04.04	Data Perawatan Rumah Susun
				RAD.03.04.04.05	Data Anggaran bantuan rutilahu
				RAD.03.04.04.06	Data usulan calon penerima manfaat perbaikan rutilahu
				RAD.03.04.04.07	Data Pemberdayaan Apartement Transit
				RAD.03.04.04.08	Data Kepenghunian Apartement Transit
				RAD.03.04.04.09	Penetapan Lokasi/Data Terkait lahan
				RAD.03.04.04.10	Data Pengembangan Kawasan Pemukiman
				RAD.03.04.04.11	Data Usulan penataan kawasan kumuh
				RAD.03.04.04.12	Data kawasan kumuh
				RAD.03.04.04.13	Data DED penataan kawasan kumuh
				RAD.03.04.04.14	Data Sanitasi Layak
				RAD.03.04.04.15	Data Rumah Tangga
				RAD.03.04.04.16	Data Sarana Prasarana dan Utulitas Umum
				RAD.03.04.04.17	Data pelayananan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
				RAD.03.04.04.18	Data Ganti Rugi Tanah
RAD.03.06	Data Pertanahan	RAD.03.06.01	Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	RAD.03.06.01.01	Data Penataan Ruang
RAD.03.07	Data Kependudukan	RAD.03.07.01	Pengendalian Penduduk	RAD.03.07.01.01	Data Penduduk
RAD.03.07	Data Kependudukan	RAD.03.07.02	Keluarga Berencana dan Kesehatan	RAD.03.07.02.01	Data Peserta KB

Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
RAD.03.07	Data Kependudukan	RAD.03.07.03	Pembangunan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	RAD.03.07.03.01	Data Keluarga Sejahtera
RAD.04.01	Data Kesehatan	RAD.04.01.01	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAD.04.01.01.01	Data Tenaga Medis
				RAD.04.01.01.02	Data Tenaga Kesehatan
RAD.04.01	Data Kesehatan	RAD.04.01.02	Pengelolaan Kefarmasian	RAD.04.01.02.01	Data PBF (Pedagang Besar Farmasi)
				RAD.04.01.02.02	Data PAK (Penyalur Alat Kesehatan)
				RAD.04.01.02.03	DATA UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional)
				RAD.04.01.02.04	Data Obat yang Dibutuhkan
RAD.04.01	Data Kesehatan	RAD.04.01.06	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.06.01	Data Layanan Kesehatan
				RAD.04.01.06.02	Data Gizi
				RAD.04.01.06.03	Data Lingkungan
				RAD.04.01.06.04	Data Jaminan Kesehatan
				RAD.04.01.06.05	Data Penyakit Menular dan Tidak Menular
				RAD.04.01.06.06	Data Pelayanan Kesehatan
				RAD.04.01.06.07	Data Informasi Kesehatan
				RAD.04.01.06.08	Data Fasilitas Kesehatan
				RAD.04.01.06.09	Data Mutu Layanan Kesehatan
				RAD.04.01.06.10	Data Rumah Sakit
				RAD.04.01.06.11	Data Gawat Darurat
				RAD.04.01.06.12	Data Pasien
				RAD.04.01.06.13	Data Profil Kesehatan
				RAD.04.01.06.14	Data STR (Surat Tanda Registrasi)
				RAD.04.01.06.15	Data Master Sistem Informasi Kesehatan

Data Topik	Data Sub Topik	Kelompok Data	
		RAD.04.01.06.16	Data Kejadian Luar Biasa
		RAD.04.01.06.17	Data Posyandu
		RAD.04.01.06.18	Data Ibu dan Anak
RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial	RAD.04.02.01.01	Data Penyandang Disabilitas yang Membutuhkan
		RAD.04.02.01.02	Data Anak Terlantar yang Tidak Membutuhkan Panti
		RAD.04.02.01.03	Data Anak Terlantar yang membutuhkan
		RAD.04.02.01.04	Data Layanan Pengasuhan
		RAD.04.02.01.05	Data Lanjut Usia yang Membutuhkan
		RAD.04.02.01.06	Data Gelandangan dan Pengemis yang Membutuhkan
		RAD.04.02.01.07	Data PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Membutuhkan
		RAD.04.02.01.08	Data Pelayanan Dukungan Sosial yang Membutuhkan
RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial	RAD.04.02.02.01	Data Kelompok Rentan
		RAD.04.02.02.02	Data Fakir Miskin
		RAD.04.02.02.03	Data Pengembangan Ekonomi
		RAD.04.02.02.04	Data Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial
RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial	RAD.04.02.04.01	Data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
		RAD.04.02.04.02	Data PSKS Lainnya
		RAD.04.02.04.03	Data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
		RAD.04.02.04.04	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga

Data Topik	Data Sub Topik	Kelompok Data	
		RAD.04.02.04.05	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan Masyarakat
		RAD.04.02.04.06	Data Fasilitasi Pemulangan
		RAD.04.02.04.07	Data Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		RAD.04.02.04.08	Data Stock Makanan Tersisa
		RAD.04.02.04.09	Data Stock Pakaian Tersisa
		RAD.04.02.04.10	Data Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		RAD.04.02.04.11	Data Anak Terlantar yang Membutuhkan Panti
		RAD.04.02.04.12	Data Jenazah
		RAD.04.02.04.13	Data Daerah Asal
		RAD.04.02.04.14	Data SK Izin Adopsi
		RAD.04.02.04.15	Data Calon Anak
		RAD.04.02.04.16	Data Calon Orang Tua
		RAD.04.02.04.17	Data Kube
		RAD.04.02.04.18	Data Buffer Stock
		RAD.04.02.04.19	Data Sarana dan Prasarana Tersedia
		RAD.04.02.04.20	Data Taman Makam Pahlawan
		RAD.04.02.04.21	Data Pemeliharaan
		RAD.04.02.04.22	Data Pemberdayaan Masyarakat
		RAD.04.02.04.23	Data Bantuan Akses Listrik
		RAD.04.02.04.24	Data Kesejahteraan Sosial Masyarakat
RAD.04.02	Data Sosial	RAD.04.02.06	Penyelenggaraan penanggulangan bencana
		RAD.04.02.06.01	Data Indeks Ketahanan Daerah
		RAD.04.02.06.02	Data Laporan Kepala Daerah
		RAD.04.02.06.03	Data Indeks Kesiapsiagaan masyarakat

Data Topik	Data Sub Topik	Kelompok Data
		RAD.04.02.06.04 Data Indikator Desa Tangguh
		RAD.04.02.06.05 Data Informasi Bencana Alam
		RAD.04.02.06.06 Data Request permintaan bantuan dari kabupaten
		RAD.04.02.06.07 Data Kebutuhan Pasca Bencana
		RAD.04.02.06.08 Data Pelatihan Bencana
		RAD.04.02.06.09 Data bencana Daerah
		RAD.04.02.06.10 Data Bencana Kebakaran
		RAD.04.02.06.11 Data Bencana Non Kebakaran
		RAD.04.02.06.12 Data Pencegahan Kebakaran
RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.01 Kesetaraan gender	RAD.04.03.01.01 Data Kesetaraan Gender
		RAD.04.03.01.02 Data Jumlah Perempuan yang Bekerja
	RAD.04.03.03 Perlindungan Hak Perempuan	RAD.04.03.03.01 Data Kekerasan terhadap perempuan
	RAD.04.03.02 Pemenuhan Hak Anak	RAD.04.03.02.01 Data Anak yang tidak terpenuhi hak nya
	RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak	RAD.04.03.04.01 Data Kekerasan terhadap anak
RAD.05.02 Data Keamanan	RAD.05.02.01 Pemeliharaan keamanan dan ketertiban	RAD.05.02.01.01 Data Gangguan Trantibum
		RAD.05.02.01.02 Data Pelanggaran
		RAD.05.02.01.03 Data Bahan Bukti
		RAD.05.02.01.04 Data Penyidik
		RAD.05.02.01.05 Berkas Perkara
		RAD.05.02.01.06 Dokumen Pemetaan
		RAD.05.02.01.07 Dokumen Permasalahan
		RAD.05.02.01.08 Data Hasil Deteksi
		RAD.05.02.01.09 Data Kendala
		RAD.05.02.01.10 Data Pengamanan

Data Topik	Data Sub Topik	Kelompok Data	
		RAD.05.02.01.11	Data Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja
RAD.06.01	Data Pendidikan	RAD.06.01.01	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		RAD.06.01.01.01	Data Guru dan Tendik
		RAD.06.01.01.02	Data Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Pendidik
		RAD.06.01.01.03	Data Penugasan Guru dan Tenaga Pendidik
		RAD.06.01.01.04	Data Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Pendidik
RAD.06.01	Data Pendidikan	RAD.06.01.05	Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan
		RAD.06.01.05.01	Data Fasilitas Fisik Sekolah
		RAD.06.01.05.02	Data Sekolah
		RAD.06.01.05.03	Data Siswa
		RAD.06.01.05.04	Data Alat praktek dan Peraga
		RAD.06.01.05.05	Data Kebutuhan Fasilitas Sekolah
		RAD.06.01.05.06	Data Perlengkapan Sekolah
		RAD.06.01.05.07	Data Pembiayaan Peserta Didik
		RAD.06.01.05.08	Data Pokok Pendidikan
		RAD.06.01.05.09	Data Fasilitas Sekolah
		RAD.06.01.05.10	Data Dokumen Silabus
		RAD.06.01.05.11	Data E-book/Buku Cetak
		RAD.06.01.05.12	Data Kurikulum
		RAD.06.01.05.13	Data Penerimaan Peserta Didik Baru
		RAD.06.01.05.14	Data Biaya Operasional Pendidikan
		RAD.06.01.05.15	Data Ijazah
		RAD.06.01.05.16	Data Sertifikat
		RAD.06.01.05.17	Data Pendirian Sekolah

Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
				RAD.06.01.05.18	Data NPSN (Nomer Pokok Sekolah Nasional)
				RAD.06.01.05.19	Data Kepramukaan
RAD.06.02	Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01	Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	RAD.06.02.01.01	Data Lembaga Pelatihan Kerja
				RAD.06.02.01.02	Data Instruktur yang tersertifikasi
				RAD.06.02.01.03	Data Perizinan Usaha Lembaga Pelatihan Kerja
				RAD.06.02.02.01	Data Pencari Kerja
				RAD.06.02.02.02	Data Lowongan Kerja
				RAD.06.02.03.01	Data Perusahaan
				RAD.06.02.03.02	Data Pekerja
				RAD.06.02.03.03	Data Serikat Pekerja
RAD.06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	RAD.06.03.02	Riset dan Inovasi	RAD.06.03.02.01	Data Publikasi Penelitian
RAD.06.04	Data Pemuda	RAD.06.04.01	Pemberdayaan Pemuda	RAD.06.04.01.01	Data Organisasi Kepemudaan
				RAD.06.04.01.02	Data Kegiatan Pemuda
RAD.06.05	Data Olahraga	RAD.06.05.01	Pembudayaan Olahraga	RAD.06.05.01.01	Data Kelompok Olahraga
RAD.07.05	Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01	Penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan	RAD.07.05.01.01	Data DED lingkungan Hidup
				RAD.07.05.01.02	Data Pengaduan Lingkungan Hidup
				RAD.07.05.01.03	Data Keanekaragaman Hayati
				RAD.07.05.01.04	Data Masyarakat Hukum Adat
				RAD.07.05.01.05	Data Peserta Pelatihan Lingkungan Hidup
				RAD.07.05.01.06	Data Kegiatan Pelatihan Lingkungan Hidup
				RAD.07.05.01.07	Data Penghargaan Lingkungan Hidup

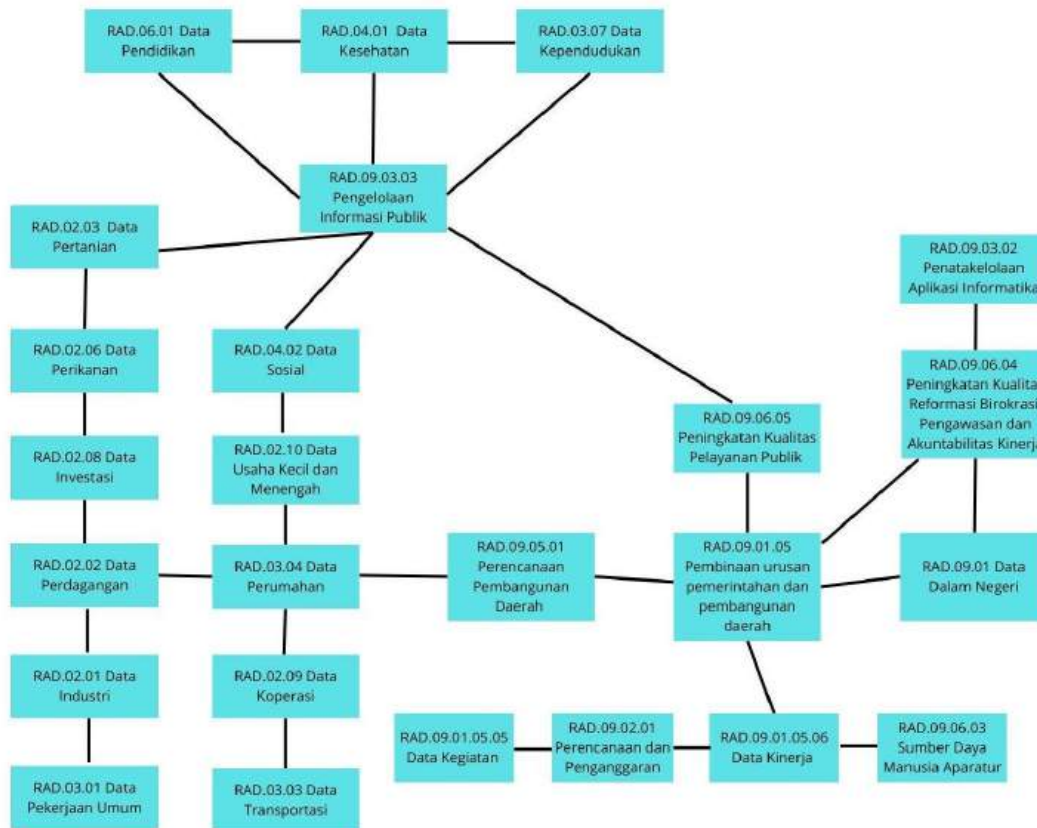
Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
				RAD.07.05.01.08	Data Peserta Penghargaan Lingkungan Hidup
RAD.07.05	Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02	Pelestarian lingkungan hidup	RAD.07.05.02.01	Data Kualitas Air Sungai
				RAD.07.05.02.02	Data Kualitas Udara
RAD.07.05	Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.03	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	RAD.07.05.03.01	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
RAD.07.05	Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.04	Pengelolaan Sampah	RAD.07.05.04.01	Data Usulan kegiatan persampahan
				RAD.07.05.04.02	Data TPS3R
				RAD.07.05.04.03	Data Sampah
				RAD.07.05.04.04	Data Angkutan Sampah
				RAD.07.05.04.05	Data Kegiatan Persampahan
RAD.07.05	Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.05	Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun	RAD.07.05.05.01	Data Pengelolaan Limbah B3
				RAD.07.05.05.02	Data IPAL
RAD.08.02	Data Kebudayaan	RAD.08.02.01	Pengelolaan Program Kebudayaan	RAD.08.02.01.01	Data Kelompok Penghayat
				RAD.08.02.01.02	Data Seni Tradisional
				RAD.08.02.01.03	Data Cagar Budaya
RAD.09.01	Data Dalam Negeri	RAD.09.01.01	Politik dan pemerintahan umum	RAD.09.01.01.01	Jumlah Partai Politik
				RAD.09.01.01.02	Data Kegiatan Pendidikan Politik
				RAD.09.01.01.03	Data Kegiatan Pengembangan Etika dan Budaya Politik
				RAD.09.01.01.04	Data Organisasi Kemasyarakatan
				RAD.09.01.01.05	Data Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

Data Topik	Data Sub Topik	Kelompok Data	
		RAD.09.01.01.06	Data Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
		RAD.09.01.01.07	Data Peningkatan Kewaspadaan Nasional
		RAD.09.01.01.08	Data Kualitas dan Fasilitasi Konflik Sosial
		RAD.09.01.01.09	Data Ketentraman dan Ketertiban
RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.04 Pembinaan pemerintahan desa	RAD.09.01.04.01	Data Desa
		RAD.09.01.04.02	Data Kerjasama Desa
		RAD.09.01.04.03	Data Penyelenggaraan Desa
		RAD.09.01.04.04	Data Lembaga Masyarakat
		RAD.09.01.04.05	Data Lembaga Adat
		RAD.09.01.04.06	Data Masyarakat Hukum Adat
		RAD.09.01.04.07	Data Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
		RAD.09.01.04.08	Data Pembinaan Pemerintahan Desa
RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.05 Pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah	RAD.09.01.05.01	Data Produk hukum
		RAD.09.01.05.02	Data Kegiatan keagamaan
		RAD.09.01.05.03	Data Hibah bansos
		RAD.09.01.05.04	Data kegiatan pimpinan
		RAD.09.01.05.05	Data Kegiatan OPD
		RAD.09.01.05.06	Data Kinerja OPD
		RAD.09.01.05.07	Data Keuangan OPD
		RAD.09.01.05.08	Data Kegiatan Anggota DPRD
RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.06 Pembinaan Keuangan Daerah	RAD.09.01.06.01	Data Keuangan Daerah
		RAD.09.01.06.02	Data Pendapatan Daerah
		RAD.09.01.06.03	Data Aset/ Barang Daerah

Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
RAD.09.01	Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09.01.07.01	Data Pendaftaran Penduduk
				RAD.09.01.05.02	Data Pencatatan Sipil
				RAD.09.01.05.03	Data Administrasi Kependudukan
				RAD.09.01.05.04	Data Profil Kependudukan
RAD.09.03	Data Informasi	RAD.09.03.02	Penatakelolaan Aplikasi Informatika	RAD.09.03.02.01	Data Aplikasi Informatika
RAD.09.03	Data Informasi	RAD.09.03.03	Pengelolaan Informasi Publik	RAD.09.03.03.01	Data Informasi Publik
				RAD.09.03.03.02	Data Informasi Pemerintahan Umum
				RAD.09.03.03.03	Data Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan
				RAD.09.03.03.04	Data Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
				RAD.09.03.03.05	Data Informasi Ekonomi dan Industri
				RAD.09.03.03.06	Data Informasi Pembangunan Kewilayahan
				RAD.09.03.03.07	Data informasi pertanian
				RAD.09.03.03.08	Data Informasi Pendukung Umum
				RAD.09.03.03.09	Data Informasi lainnya
RAD.09.03	Data Informasi	RAD.09.03.04	Pengelolaan Data Statistik	RAD.09.03.04.01	Data Statistik Sektoral
RAD.09.03	Data Informasi	RAD.09.03.08	Keamanan Informasi	RAD.09.03.08.01	Data Keamanan Informasi
RAD.09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.01	Perencanaan Pembangunan	RAD.09.05.01.01	Data Perencanaan Daerah
				RAD.09.05.01.02	Data Pengendalian dan Evaluasi Daerah
				RAD.09.05.01.03	Data Koordinasi Perencanaan Daerah
				RAD.09.06.01.04	Data Layanan Pengelolaan SPAM
RAD.09.06	Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03	Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur	RAD.09.06.03.01	Data Kepegawaian Daerah

Data Topik		Data Sub Topik		Kelompok Data	
RAD.09.06	Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09.06.04.01	Data Pengawasan
				RAD.09.06.04.02	Data Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
RAD.09.06	Data Aparatur Negara	RAD.09.06.05	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	RAD.09.06.05.01	Data Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik
				RAD.09.06.05.02	Data Layanan Publik
				RAD.09.06.05.03	Data Layanan Perizinan
				RAD.09.06.05.04	Data Layanan Pengaduan Publik
				RAD.09.06.05.05	Data Layanan Pengelolaan SPAM
				RAD.09.06.05.06	Data Layanan Lainnya
RAD.09.06	Data Aparatur Negara	RAD.09.06.06	Penyelenggaraan Kearsipan	RAD.09.06.06.01	Data Pengelolaan Arsip
				RAD.09.06.06.02	Data Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				RAD.09.06.06.03	Data Penggunaan Arsip
RAD.09.07	Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.11	Pengembangan nilai-nilai kebangsaan	RAD.09.07.11.01	Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat relasi dari data yang sudah diidentifikasi sebelumnya untuk melihat keterhubungan dari masing-masing data yang dapat digunakan sebagai dasar penerapan interoperabilitas data. Selain itu relasi data ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan proses integrasi aplikasi-aplikasi yang saat ini digunakan atau pengembangan aplikasi untuk mendukung proses bisnis dan memenuhi layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik. Relasi dari data yang ada dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.8 Relasi Antar Data

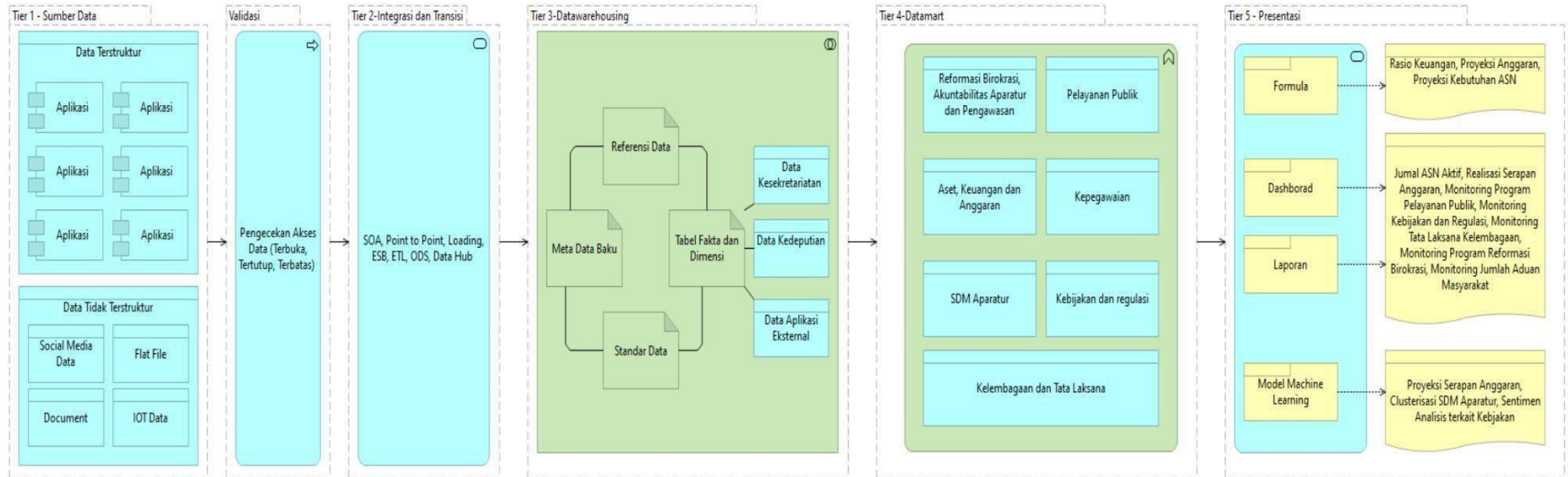
Sebagian besar data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini merupakan data yang berkaitan dengan produk, reformasi birokrasi, kelembagaan dan tata laksana, SDM Aparatur, ataupun pelayanan publik, namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada data maupun kelompok data baru yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.

Hasil kajian lainnya menunjukkan bahwa, saat ini sudah ada upaya untuk mengimplementasikan konsep Data Warehouse pada data yang saat ini dikelola, namun perlu identifikasi lebih detail dari masing--masing data dan kebutuhan. Selain itu, saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang masih fokus pada data yang sifatnya terstruktur, data yang dihasilkan atau dikelola melalui sebuah perangkat lunak/ aplikasi atau data dalam bentuk format excel, csv dan data jenis lainnya. Data tidak terstruktur yang berasal dari website dan media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk mendapatkan saran dan masukan pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan dan kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan arsitektur data dan informasi to-be yang mengarah pada pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dengan harapan:

- a. Seluruh data sudah terstandar dan siap untuk diproses secara digital
- b. Tata kelola data sudah mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Sistem sudah dapat melakukan analisa data secara otomatis

Pemerintah Kabupaten Magelang memerlukan Single Source of Truth Data yang handal yang akan memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan dengan cepat dan valid. Hal tersebut dapat dicapai, salah satunya dengan dukungan dari Data Warehouse. Data Warehouse akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Magelang yang sudah memiliki cukup banyak aplikasi dan mengintegrasikan data dalam aplikasi-aplikasi tersebut serta data lain sebagai dasar pengambilan keputusan, khususnya di level eksekutif atau top level manajemen.

Selain itu, pemanfaatan data warehouse di Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan akan banyak membantu mendukung proses-proses yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dengan dukungan data yang terpusat. Oleh karena itu, arsitektur data dan informasi to-be di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang akan disusun dengan menggunakan pendekatan arsitektur sistem pengambilan keputusan berbasis data yang didukung oleh teknologi big data analytics sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut:



Gambar 4.9 Arsitektur Data dan Informasi (To-Be)

Arsitektur data dan informasi usulan tersebut memuat proses integrasi dari berbagai sumber data, baik yang bersumber dari aplikasi, flat files, media sosial maupun berbagai perangkat IOT seperti sensor, presensi sidik jari, cctv, dsb. Untuk mendukung pengambilan keputusan, maka penggunaan five-stages menjadi salah satu alternatif dalam membantu menyusun lapisan-lapisan pendukungnya. Dalam arsitektur usulan tersebut tercakup sistem Business Intelligence (BI) maupun machine learning berbasis kecerdasan buatan yang berfungsi untuk memodelkan trend data atau prediksi trend di masa depan berdasarkan kumpulan data dan informasi yang ada selama rentang waktu tertentu yang tersimpan di berbagai datamarts. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing stages.

a) Stage 1 - Sumber Data

Pada stage pertama, seluruh sumber data dijadikan kandidat dari data yang akan dipergunakan untuk menjadi masukan bagi model data warehouse pada stage ke 3. Sumber-sumber data pada stage pertama didapatkan dari hasil pendataan yang dilakukan pada Arsitektur Aplikasi maupun Layanan, dimana sumber data dapat berasal dari Aplikasi yang sudah digunakan (baik eksternal maupun internal), dokumen eksternal yang terstruktur seperti file excel hasil pengolahan mandiri oleh unit kerja di organisasi perangkat daerah atau data yang dikelola oleh kesekretariatan, data tidak terstruktur yang ada di media sosial PAN-RB, maupun data dari perangkat IOT seperti data presensi sidik jari, cctv, dsb. Data dengan berbagai sumber ini nantinya perlu dipilah melalui proses penyaringan pada berbagai level Akses Data. Data yang memiliki sifat terbuka saja yang akan diteruskan ke stage berikutnya.

b) Stage 2 - Integrasi dan Transisi

Aplikasi integrasi dimulai karena adanya kebutuhan pertukaran data/ informasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Tujuan dari lapisan ini adalah untuk memindahkan data dari berbagai sumber baik eksternal maupun internal pada kecepatan yang berbeda untuk tujuan:

1. Memindahkan data dari sistem asal ke sistem hilir untuk mendukung proses bisnis yang terintegrasi. Hal ini memastikan data dengan akses terbuka dialirkan melalui proses yang baik dengan tujuan meningkatkan kepercayaan hasil dan kecepatan penyelesaian tugas dan proses.
2. Memindahkan data ke Stage 3 - Arsitektur Data Warehouse, di mana data disimpan untuk tujuan lain. Dalam proses migrasi data diperlukan beberapa proses seperti ETL (Extract, Transform dan Load). Tujuan dari proses ETL adalah:
 - Membersihkan data dari berbagai kemungkinan kesalahan seperti adanya typo, data yang hilang, ketidakkonsistenan
 - Menyediakan kepercayaan terhadap sumber data
 - Mengubah data transaksi kedalam granularitas waktu yang didefinisikan di data warehouse.
3. Berbagai alternatif teknologi dapat digunakan seperti Arsitektur Berorientasi Service (SOA), Point to Point, ETL, ODS, ESB serta Data Hub.

c) Stage 3 - Data Warehousing

Data Warehousing adalah proses mengumpulkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu tempat dengan 4 karakteristik yaitu berorientasi subyek, terintegrasi, mempunyai variasi waktu tertentu (granularitas waktu), serta tidak dapat dirubah. Data disimpan dalam bentuk dimensional modeling dengan beberapa tabel fakta dan dimensi. Penyusunan Data Warehouse pada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- Referensi Data, yaitu Data harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di Portal Satu Data.
- Metadata Baku, yaitu Data harus mempunyai informasi terstruktur yang berfungsi menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan atau dikelola kembali.
- Standar Data, yaitu standar yang mengatur metodologi yang meliputi definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
- Tabel Fakta dan Dimensi, yaitu berisi tabel fakta dan berbagai dimensi yang dimodelkan sesuai dengan orientasi subyek tertentu sesuai

dengan kebutuhan. Tabel-tabel fakta dibentuk dari berbagai sumber data dari kesekretariatan, badan, dinas dan eksternal.

d) Stage 4 - Datamarts

Datamarts adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan yang berorientasi subyek. Pada data mart, Business Intelligence (BI) banyak digunakan untuk melakukan analisis. Tidak seperti stage-3 di mana data tidak aktif, pada tingkat ini adalah tempat data bergerak kembali. Data disatukan dalam kombinasi unik untuk mendukung pelaporan, dan analitik. Implementasi dari Datamart di Pemerintah Kabupaten Magelang diusulkan dibangun dari berbagai subyek yang terkait dengan proses bisnis dari KABMGL-DAB sbb: subyek. Pada data mart, Business Intelligence (BI) banyak digunakan untuk melakukan analisis. Tidak seperti stage-3 di mana data tidak aktif, pada tingkat ini adalah tempat data bergerak kembali. Data disatukan dalam kombinasi unik untuk mendukung pelaporan, dan analitik. Implementasi dari Datamart di Pemerintah Kabupaten Magelang diusulkan dibangun dari berbagai subyek yang terkait dengan proses bisnis sebagai berikut:

1. Datamart Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.
Datamart ini berisi data birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasannya, serta termasuk di dalamnya data pengaduan, serta penindakan disiplin aparatur.
2. Datamart Kelembagaan dan Tata Laksana
Datamart ini berisi data kelembagaan dan pelaksanaannya meliputi indeks SPBE, Tupoksi unit, dst.
3. Datamart SDM Aparatur
Datamart ini berisi data Aparatur SDM meliputi jumlah Aparatur per periode, standar kompetensi ASN dan evaluasi kinerjanya.
4. Datamart Pelayanan Publik
Datamart ini berisi data pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang meliputi jumlah pelayanan, serta keterhubungannya dengan data dari aplikasi terkait pelayanan publik.
5. Datamart Aset, Keuangan dan Anggaran
Datamart ini berisi data terkait aset, keuangan dan anggaran meliputi rencana, realisasi / serapan anggaran, serta aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang
6. Datamart Kepegawaian
Datamart ini berisi data terkait kepegawaian meliputi profil pegawai, perjanjian kinerja, kehadiran pegawai, dst.
7. Datamart Kebijakan dan regulasi
Datamart ini berisi data terkait kebijakan dan regulasi.

e) Stage 5 - Presentasi

Pada stage ini, data dan informasi yang ditarik dari data mart digabungkan dan diproses untuk divisualisasikan ataupun dibentuk menjadi pemodelan yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Presentasi data di dalam stages kelima ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Formula / Model Matematis

Presentasi dalam bentuk formula dapat diimplementasikan pada data yang berhubungan dengan keuangan seperti dashboard yang menggambarkan rasio keuangan institusi (misal Operating Ratio, Likuiditas, dsb), proyeksi anggaran maupun serapan anggaran menggunakan regresi, serta proyeksi kebutuhan SDM dalam beberapa

tahun kedepan. Model-model tersebut merupakan model yang diturunkan dari sebuah formula maupun model matematis dengan sumber data dari data mart data mart yang diperlukan seperti Data mart Aset Keuangan dan Anggaran maupun Data mart Kepegawaian.

2. Dashboard

Dashboard didefinisikan sebagai sebuah tampilan visual dari informasi terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Data yang dibutuhkan untuk ditampilkan dalam dashboard berasal dari berbagai sumber data yang digabungkan dan diatur pada sebuah layar, menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. Penyajian informasi pada dashboard biasanya berhubungan dengan grafik, warna, peta, maupun visualisasi lainnya yang menarik. Untuk mendukung penyajian informasi dashboard yang cepat dengan tampilan yang baik, biasanya diperlukan Business Intelligence tools, seperti Tableau, Power BI, SAP Business Intelligence, Qlik View, dsb. Berbagai informasi seperti jumlah pengawakan SDM aktif, realisasi dan serapan anggaran, monitoring program maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang, tata laksana kelembagaan, serta jumlah aduan masyarakat dapat dengan mudah ditampilkan.

3. Laporan

Laporan adalah salah satu bentuk informasi yang ditujukan untuk diunduh dan dibagikan ke pihak eksternal lain. Biasanya laporan dapat berupa file excel maupun pptx dari hasil dashboard. Selain itu laporan dalam bentuk hard copy yang dapat dicetak juga terkadang diperlukan.

4. Model Machine Learning

Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu di program ulang atau diperintah. Berbagai metoda dalam Machine learning yang dapat diaplikasikan pada data-mart Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Model Regresi, digunakan untuk proyeksi kebutuhan pegawai, anggaran, serapan anggaran, dsb.
- b. Model Clustering, digunakan untuk pengelompokan SDM berdasarkan beberapa parameter / kriteria tertentu seperti tingkat kepatuhan/kedisiplinan, kinerja, inovasi, harta kekayaan, dsb. Selain itu pengelompokan dapat dilakukan untuk melihat tingkat kinerja dari beberapa program yang dikerjakan.
- c. Model Klasifikasi, digunakan dalam pemetaan response /sentimen kelompokkelompok masyarakat terhadap suatu kebijakan / reformasi birokrasi yang menjadi program kementerian

B. Metadata Data dan Informasi

Data yang diperoleh dari bagian Datin yaitu data umum yang ada di sekretariat dan data khusus yang ada di organisasi perangkat daerah saat ini belum memiliki metadata sebagaimana yang disyaratkan dalam Rancangan Perpress SPBE nasional. Oleh karena itu, perlu disusun meta data dari masing-masing data tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 36. Metadata Data dan Informasi.

Tabel 4.5 Atribut Metadata Data dan Informasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
9	Penghasil Data/Produsen Data	Merupakan penghasil data
10	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Merupakan penanggung jawab data
11	Informasi yang terkait (<i>output</i>)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
12	Informasi yang terkait (<i>input</i>)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
13	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Data yang diperoleh dari bagian Datin yaitu data umum yang ada di sekretariat dan data khusus yang ada di organisasi perangkat daerah saat ini belum memiliki metadata sebagaimana yang disyaratkan dalam Rancangan Perpress SPBE nasional. Oleh karena itu, perlu disusun meta data dari masing-masing data tersebut sebagaimana dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.6 Metadata Data dan Informasi

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawa/ Walidata
RAD.02.01	Data Industri	Data yang berkaitan dengan urusan industri	Sebagai informasi terkait industri	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.02.02	Data Perdagangan	Data yang berkaitan dengan urusan perdagangan	Sebagai informasi terkait perdagangan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.02.03	Data Pertanian	Data yang berkaitan dengan urusan pertanian	Sebagai informasi terkait pertanian	Terbuka	Data Statistik	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.02.05	Data Peternakan	Data yang berkaitan dengan urusan peternakan	Sebagai informasi terkait peternakan	Terbuka	Data Statistik	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.02.06	Data Perikanan	Data yang berkaitan dengan urusan perikanan	Sebagai informasi terkait perikanan	Terbuka	Data Statistik	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.02.08	Data Investasi	Data yang berkaitan dengan urusan investasi	Sebagai informasi terkait investasi	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.02.09	Data Koperasi	Data yang berkaitan dengan urusan koperasi	Sebagai informasi terkait koperasi	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang berkaitan dengan urusan usaha kecil dan menengah	Sebagai informasi terkait usaha kecil dan menengah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.02.11	Data Pariwisata	Data yang berkaitan dengan urusan pariwisata	Sebagai informasi terkait pariwisata	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum	Sebagai informasi terkait pekerjaan umum	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.03.02	Data Transmigrasi	Data yang berkaitan dengan urusan transmigrasi	Sebagai informasi terkait transmigrasi	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika

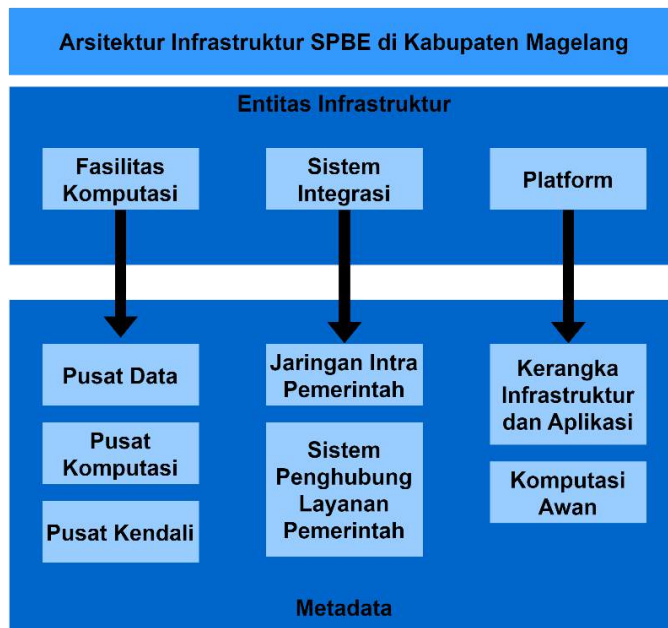
ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawa/ Walidata
RAD.03.03	Data Transportasi	Data yang berkaitan dengan urusan transportasi	Sebagai informasi terkait transportasi	Terbuka	Data Statistik	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.03.04	Data Perumahan	Data yang berkaitan dengan urusan perumahan	Sebagai informasi terkait perumahan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.03.06	Data Pertanahan	Data yang berkaitan dengan urusan pertanahan	Sebagai informasi terkait pertanahan	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.03.07	Data Kependudukan	Data yang berkaitan dengan urusan kependudukan	Sebagai informasi terkait kependudukan	Terbuka	Data Statistik	Semester an	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.04.01	Data Kesehatan	Data yang berkaitan dengan urusan kesehatan	Sebagai informasi terkait kesehatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.04.02	Data Sosial	Data yang berkaitan dengan urusan sosial	Sebagai informasi terkait sosial	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan	Sebagai informasi terkait pemberdayaan perempuan	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.05.02	Data Keamanan	Data yang berkaitan dengan urusan keamanan	Sebagai informasi terkait keamanan	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.06.01	Data Pendidikan	Data yang berkaitan dengan urusan pendidikan	Sebagai informasi terkait pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan	Sebagai informasi terkait ketenagakerjaan	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang berkaitan dengan urusan ilmu pengetahuan dan teknologi	Sebagai informasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.06.04	Data Pemuda	Data yang berkaitan dengan urusan pemuda	Sebagai informasi terkait pemuda	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawa/ Walidata
RAD.06.05	Data Olahraga	Data yang berkaitan dengan urusan olahraga	Sebagai informasi terkait olahraga	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup	Sebagai informasi terkait lingkungan hidup	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.08.02	Data Kebudayaan	Data yang berkaitan dengan urusan kebudayaan	Sebagai informasi terkait kebudayaan	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.09.01	Data Dalam Negeri	Data yang berkaitan dengan urusan dalam negeri	Sebagai informasi terkait dalam negeri	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.09.02	Data Keuangan	Data yang berkaitan dengan urusan keuangan	Sebagai informasi terkait keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.09.03	Data Informasi	Data yang berkaitan dengan urusan informasi	Sebagai informasi terkait informasi	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan	Sebagai informasi terkait perencanaan pembangunan	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.09.06	Data Aparatur Negara	Data yang berkaitan dengan urusan aparatur negara	Sebagai informasi terkait aparatur negara	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
RAD.09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan negara	Sebagai informasi terkait kesekretariatan negara	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR

A. Pendahuluan

Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Magelang didasarkan pada sebuah entitas yang menginformasikan teknologi yang digunakan untuk menetapkan dan menerapkan prinsip-prinsip Arsitektur Infrastruktur SPBE. Arsitektur ini terbagi menjadi tiga bagian utama: platform, integrasi sistem, dan fasilitas komputasi. Dalam penerapannya, setiap bagian dari ketiga entitas ini dianalisis secara terperinci dengan atribut khusus yang mempengaruhi setiap komponen dari infrastruktur SPBE, sebagaimana yang diilustrasikan dalam Gambar 5.1.

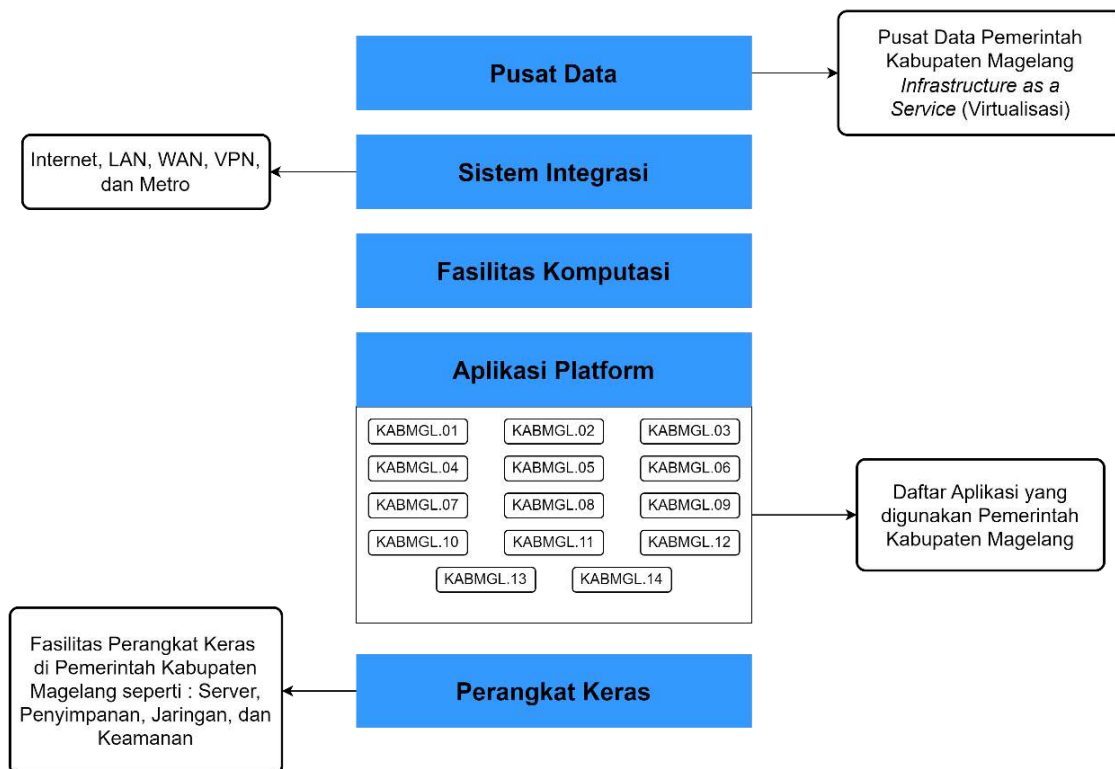


Gambar 5.1. Dekomposisi Entitas Metadata Arsitektur SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan semua fitur teknologi yang dibutuhkan untuk arsitektur data dan aplikasi dengan dukungan arsitektur keamanan. Arsitektur Infrastruktur SPBE mendukung berbagai layanan seperti akses mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas bagi masyarakat melalui aplikasi-aplikasi yang terhubung dalam pusat data. Infrastruktur SPBE diklasifikasikan menjadi fasilitas komputasi, sistem integrasi, dan platform dengan mengacu pada kondisi infrastruktur yang ada saat ini di Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kondisi infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Magelang memungkinkan pengguna dapat menyimpan data secara terpusat pada satu server berdasarkan layanan yang disediakan pusat data dalam hal ini pusat data sebagai IaaS (*Infrastructure as a Service*) yang memanfaatkan virtualisasi dalam pemakaiannya. Dalam sistem integrasi, Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan memanfaatkan jaringan konektivitas pada Pemerintah Kabupaten Magelang (LAN, WAN, dan internet) sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/ organisasi. Jaringan ini dikelola pada lapisan fasilitas komputasi, berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center*) Noc pemerintah yang diintegrasikan dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Unit Kerja.

Kondisi jaringan intra pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah berjalan dimana berbagai layanan dapat diakses secara daring melalui aplikasi yang menjadi layanan kepada masyarakat dan instansi terkait. Konektivitas pada Pemerintah Kabupaten Magelang (LAN, WAN, dan internet), terdapat bandwidth yang memadai untuk digunakan dalam mendukung kelancaran terhadap akses layanan yang ada dengan integrasi akses aplikasi sistem informasi yang menerapkan *Virtual Private Network* (VPN) untuk memudahkan konektivitas dan tingkat keamanan. Fasilitas komputasi di Pemerintah Kabupaten Magelang belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi pusat layanan big data nasional, pengembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan big data. Kondisi infrastruktur TI di Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini dipetakan pada komponen umum infrastruktur TI seperti dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2. Pemetaan Komponen Umum Infrastruktur TI di Pemerintah Kabupaten Magelang

Berdasarkan seluruh aktivitas koleksi data dari pemetaan komponen umum yang telah dilakukan, informasi kondisi infrastruktur Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini digambarkan ke dalam metadata arsitektur infrastruktur SPBE seperti dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Metadata arsitektur infrastruktur SPBE

No.	Nama Metadata	Deskripsi Fasilitas	Kondisi Saat Ini
1	Pusat Data	Pusat Data Pemerintah Kabupaten Magelang (<i>Infrastructure as a Service (IaaS)</i>)	Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah menerapkan konsep pusat data secara maksimal dengan konsep <i>Infrastructure as a Service (IaaS)</i> yang dikelola secara mandiri oleh pihak Diskominfo.
2	Perangkat Lunak Platform	Perangkat lunak platform layanan aplikasi terdiri dari	Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki beberapa perangkat lunak

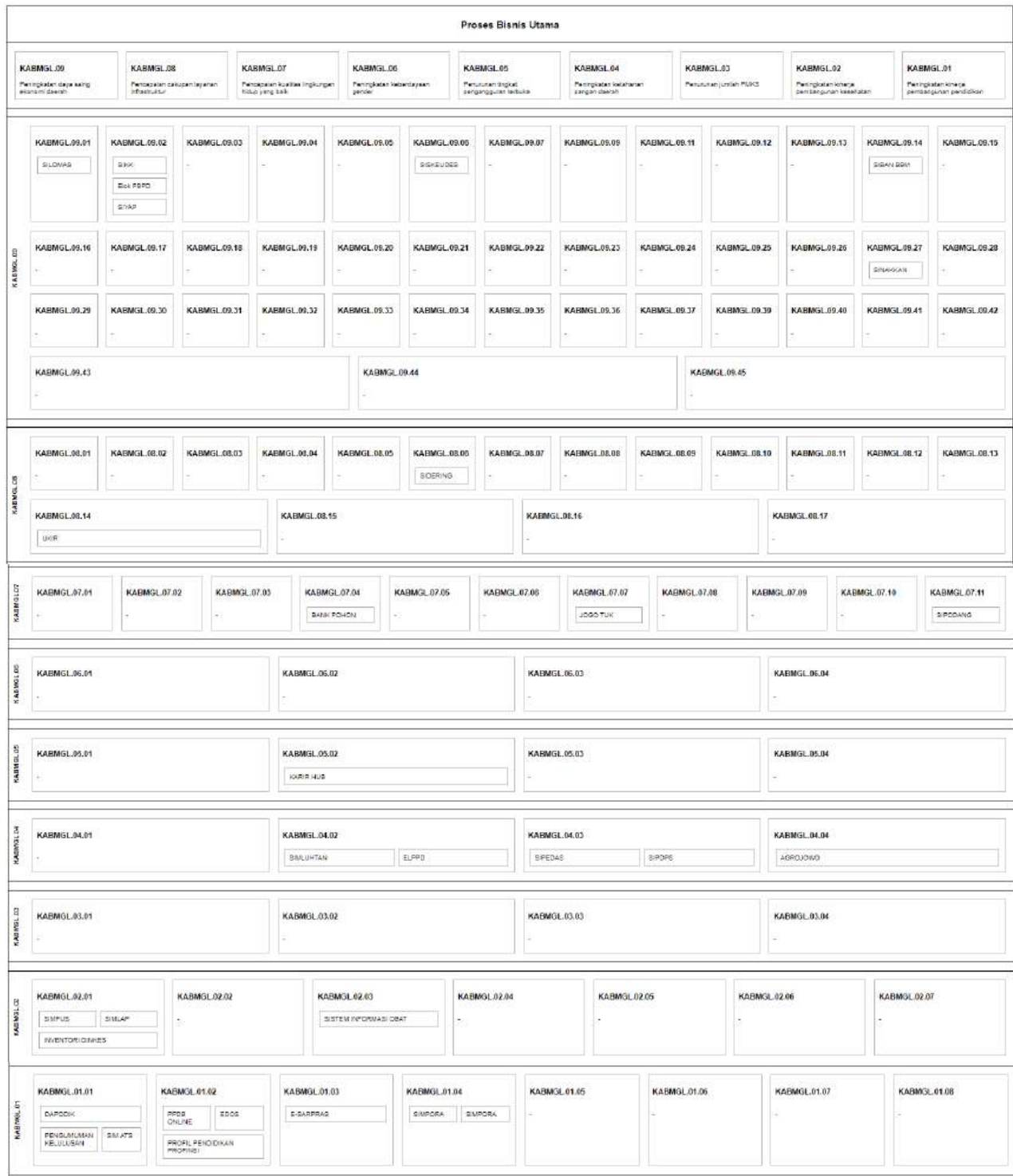
No.	Nama Metadata	Deskripsi Fasilitas	Kondisi Saat Ini
		45 aplikasi dan perangkat lunak pendukung (sistem operasi, sistem database, sistem utilitas)	platform yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dan layanan yang dapat diakses dengan mayoritas menggunakan teknologi <i>website</i> , dan juga dapat diakses secara mobile.
3	Perangkat Keras Server	Server digunakan untuk menjalankan semua layanan aplikasi Pemerintah Kabupaten Magelang. Pusat Data Diskominfo terdiri dari 47 server fisik.	Perangkat keras server di Pemerintah Kabupaten Magelang telah menggunakan teknologi arsitektur tiga lapis (<i>three-tier architecture</i>) yang diharapkan menghasilkan suatu sistem dengan tingkat skalabilitas, kemudahan pemeliharaan dan manajemen, dan meningkatkan keamanan serta dikelola oleh pihak Diskominfo untuk mendukung kinerja aplikasi yang berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
4	Perangkat Keras Media Penyimpanan	Perangkat keras yang digunakan untuk penyimpanan data di lingkungan internal.	Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki perangkat keras media penyimpanan dengan kapasitas yang cukup besar untuk mendukung operasional yang dijalankan.
5	Perangkat Keras Jaringan	Router Jaringan, <i>Switch Host, Bandwidth Management, Access Point, Switch Storage Server, Switch</i> distribusi	Pada perangkat keras jaringan telah menggunakan perangkat memadai yang memungkinkan kinerja maksimal dalam mendukung konektivitas operasional di Pemerintah Kabupaten Magelang dengan mengacu pada aspek keamanan, ketersediaan, pertukaran data, dll.
6	Perangkat Keras Keamanan	Perangkat untuk Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan TI, pengendalian lalu lintas jaringan, kontrol penghubung jaringan, Penyaringan keamanan, <i>Proxy</i> dan <i>controller VPN</i> .	Pada perangkat keras keamanan telah menggunakan beberapa teknologi untuk berbagai fungsi (<i>firewall, keamanan, VPN, pengendalian jaringan, control penghubung jaringan</i>).

No.	Nama Metadata	Deskripsi Fasilitas	Kondisi Saat Ini
7	Perangkat Keras <i>Peripheral</i>	<i>Backup power supply, Switching monitor</i>	Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki perangkat keras peripheral dalam mendukung kinerja perangkat lainnya terutama dalam penyediaan backup sumber daya listrik dan perangkat monitoring. Selain itu telah memiliki perangkat <i>peripheral</i> pendukung yang dapat digunakan dalam interaksi terhadap layanan pusat data.
8	Penghubung Layanan Pemerintah	Jaringan konektivitas pada Pemerintah Kabupaten Magelang (LAN, WAN, dan internet)	SPLP di Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penerapannya telah berjalan dengan menggunakan jaringan konektivitas pada Pemerintah Kabupaten Magelang (LAN, WAN, dan internet sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung.
9	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Intranet DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>), Pusat Data Diskominfo dengan Pusat Data Provinsi Jawa tengah.	Jaringan intra pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik. Akses terhadap pusat data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan pusat data Provinsi Jawa Tengah sudah memakai jalur metro agar mempermudah untuk <i>recovery file</i> untuk DRC.
10	Fasilitas Komputasi	-	Fasilitas komputasi di Pemerintah Kabupaten Magelang belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi penerapan big data <i>analytics</i> , dan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> .

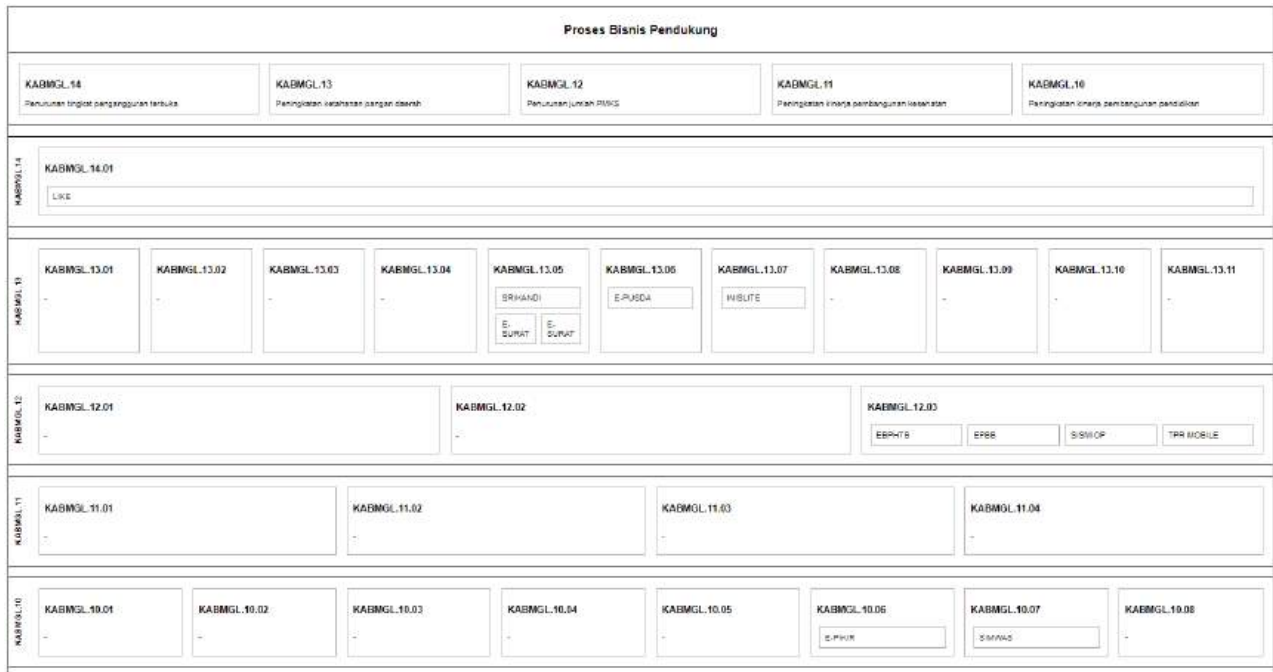
B. Kapabilitas Infrastruktur

Kemampuan Infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Magelang mencakup kapasitas yang dimiliki oleh elemen-elemen aktif seperti organisasi, individu, dan sistem. Dalam implementasinya, infrastruktur SPBE beroperasi secara independen, terintegrasi, dan standar, mencakup semua tingkat pemerintahan dan instansi. Ini termasuk optimalisasi penggunaan Aplikasi SPBE yang terintegrasi dan berbagi sumber daya, serta penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan bermutu, sesuai dengan rencana Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo). Penilaian kapabilitas infrastruktur SPBE melibatkan identifikasi

komponen infrastruktur yang terlibat dalam berbagai layanan kunci, yang mendukung pemahaman menyeluruh tentang struktur pendukung (termasuk perangkat keras dan perangkat lunak) dengan fokus pada standar kualitas yang diharapkan. Pemetaan kapabilitas infrastruktur SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi layanan berdasarkan proses bisnis Utama dan Pendukung di Pemerintah Kabupaten Magelang, yang diadaptasi dengan infrastruktur teknologi sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4



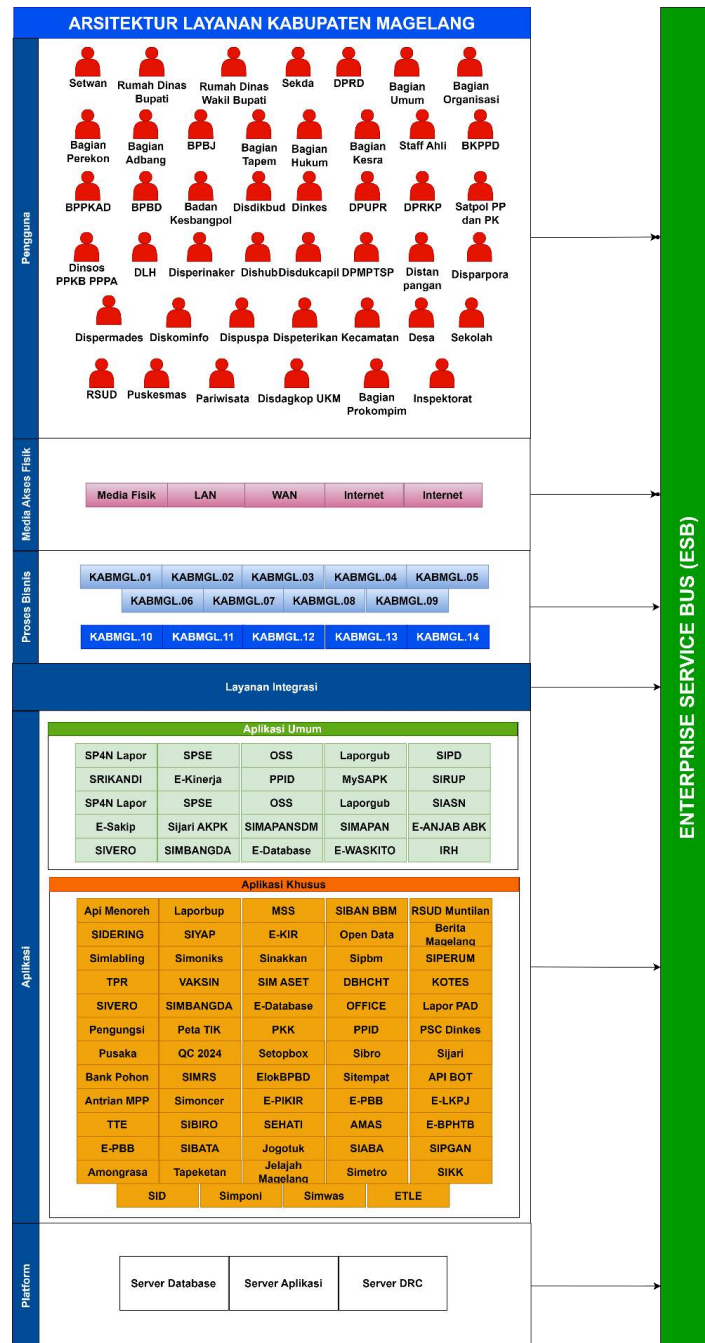
Gambar 5.3. Pemetaan Infrastuktur Aplikasi dan Proses Bisnis Utama pada Pemerintah Pemerintah Kabupaten Magelang



Gambar 5.4. Pemetaan Infrastuktur Aplikasi dan Proses Bisnis Pendukung pada Pemerintah Kabupaten Magelang

C. Model Arsitektur Integrasi

Arsitektur integrasi menjadi kebutuhan penting di Pemerintah Kabupaten Magelang yang memiliki kompleksitas tinggi. Ini diperlukan untuk memenuhi integrasi layanan yang telah terdefinisi dengan menggunakan sistem yang berbeda, sambil memastikan kontrol proses yang lebih baik. Pemodelan arsitektur ini menawarkan pendekatan strategis untuk mengintegrasikan sub kategori layanan, proses bisnis, aplikasi, data, dan teknologi secara menyeluruh. Proses dimulai dengan mendeskripsikan konsep bisnis pada layanan untuk menetapkan kebutuhan integrasi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam komponen-komponen yang dibutuhkan. Setiap komponen ini memerlukan platform fisik yang sesuai, memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan layanan melalui media akses yang ditentukan. Terdapat beberapa lapisan dalam arsitektur model integrasi ini, yaitu seperti tercantum pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5. Model Arsitektur Integrasi Layanan Pemerintah Kabupaten Magelang

1. Lapisan Pengguna : Merupakan otorisasi tingkat layanan pengguna yang akan berinteraksi dengan proses dan layanan Pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Lapisan Media Akses : Media yang digunakan pengguna untuk mengakses layanan yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Lapisan Proses : Kumpulan fungsi utama dan pendukung bisnis.
4. Lapisan Layanan : Merupakan kumpulan kemampuan layanan yang disampaikan.
5. Lapisan Integrasi : Merupakan lapisan integrasi layanan shared service
6. Lapisan Aplikasi : Merupakan tempat aplikasi dukungan
7. Lapisan Platform : Infrastruktur teknologi

Arsitektur integrasi adalah kebutuhan penting untuk menggabungkan berbagai sistem yang berbeda, dengan tujuan mempermudah kontrol terhadap proses bisnis. Proses integrasi ini dilakukan menggunakan kerangka kerja standar dalam SOA (*Service Oriented Architecture*). Dengan memanfaatkan SOA, diharapkan tercipta solusi yang optimal untuk memperoleh infrastruktur yang baik dengan kemampuan integrasi yang terkelola, memfasilitasi pertukaran informasi antar aplikasi, mengurangi dampak dari perubahan, dan menekan biaya yang diperlukan untuk integrasi dan modifikasi aplikasi.

Setiap lapisan dalam arsitektur ini menjelaskan hubungan dari lapisan pengguna hingga lapisan platform atau teknologi yang digunakan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai strategi integrasi untuk setiap lapisan arsitektur:

1. Lapisan Pengguna

Pada lapisan ini, diidentifikasi siapa saja pengguna yang ada dan terlibat dalam mengakses layanan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Pengguna diberikan kewenangan dan kemudahan untuk menjalankan proses tertentu sesuai dengan kapasitas dan status mereka, terutama untuk mendapatkan informasi. Hak akses pengguna diidentifikasi untuk memungkinkan interaksi dengan sistem sesuai dengan otoritas akses terhadap layanan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam peran dan hak-hak yang diterapkan secara logis dalam otentikasi keamanan. Dengan satu kali *sign on*, pengguna dapat memperoleh informasi dan daftar proses yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka.

2. Lapisan Media Akses

Lapisan ini menunjukkan bagaimana para pengguna dapat menggunakan berbagai media akses untuk mendapatkan informasi atau menjalankan proses yang mereka butuhkan dalam mengakses layanan bisnis. Penting untuk mempertimbangkan penetapan media akses layanan. Berdasarkan proses bisnis yang ada dan analisis kebutuhan informasi layanan, terdapat berbagai media akses yang digunakan untuk mendukung operasional dan memenuhi keinginan pengguna. Media akses yang diperlukan meliputi perangkat *peripheral* fisik, media jaringan LAN, WAN, dan internet.

3. Lapisan Proses Bisnis

Lapisan ini mengidentifikasi proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Magelang ke dalam *values* (sub fungsi) dan *value streams* sebagai aliran proses bisnis utama, yang kemudian didukung oleh proses bisnis pendukung. Pengelompokan ini mencakup proses bisnis utama dan pendukung yang telah diuraikan dalam arsitektur proses bisnis. Proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Magelang dikelompokkan untuk mendefinisikan keterkaitan antara tujuan yang telah selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang, yang diterjemahkan ke dalam sub fungsi dalam sembilan proses bisnis utama (KABMGL.01, KABMGL.02, KABMGL.03, KABMGL.04, KABMGL.05, KABMGL.06, KABMGL.07, KABMGL.08, dan KABMGL.09) dan lima proses bisnis pendukung (KABMGL.10, KABMGL.11, KABMGL.12, dan KABMGL.14).

4. Lapisan Layanan Bisnis

Lapisan ini menjelaskan layanan bisnis yang ada dalam proses bisnis yang sudah ada. Layanan bisnis adalah kumpulan layanan yang memiliki nilai bagi proses bisnis. Lapisan ini menekankan masalah interoperabilitas dalam *platform*, yang diatasi melalui pengembangan teknologi dan standar untuk integrasi dengan berbagai *platform* teknologi. Perkembangan teknologi dan standar aplikasi memungkinkan pengguna berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kumpulan kemampuan layanan di Pemerintah Kabupaten Magelang berasal dari kategori layanan yang telah didefinisikan sebelumnya dalam arsitektur layanan, sesuai dengan kebutuhan bisnis dan keinginan pengguna.

5. Lapisan Integrasi Layanan

Lapisan integrasi layanan mencakup berbagai layanan integrasi yang disediakan untuk mengakses layanan bisnis, yang merupakan bagian dari proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Magelang. Pendekatan integrasi

layanan ini memanfaatkan aplikasi dukungan yang diintegrasikan ke dalam arsitektur layanan. Strategi integrasi memberikan panduan tentang bagaimana aplikasi dukungan dapat mendukung arsitektur layanan, dengan nilai strategis tinggi bagi organisasi. Integrasi layanan yang direkomendasikan dilakukan melalui pendekatan arsitektur berorientasi layanan, menyediakan layanan yang dapat diakses oleh pengguna melalui berbagai media, dan berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Strategi ini dipetakan dalam pemaketan layanan, yang merupakan ciri khas dari pendekatan arsitektur berorientasi layanan. Kombinasi lapisan integrasi dan lapisan layanan bisnis menggunakan *Enterprise Service Bus* (ESB). ESB adalah infrastruktur terdistribusi yang mendukung integrasi dan pengaturan layanan bisnis. Gambar 5.4 menunjukkan bagaimana ESB mengintegrasikan semua lapisan dalam arsitektur layanan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Integrasi aplikasi dukungan ini dijelaskan secara jelas dan digambarkan dalam domain arsitektur layanan.

6. Lapisan Aplikasi

Lapisan ini menggambarkan kembali aplikasi yang telah diidentifikasi dan digunakan dalam pembentukan infrastruktur teknologi. Lapisan ini adalah tempat semua artefak terkait dengan aplikasi dukungan yang terintegrasi atau perlu diintegrasikan dengan arsitektur layanan. Pada lapisan ini, direkomendasikan untuk menggunakan teknologi *web services*, karena karakteristik dan pola teknologi ini sinergi dengan kebutuhan integrasi layanan, memungkinkan interaksi antara aplikasi yang sudah ada dan yang baru.

7. Lapisan Platform

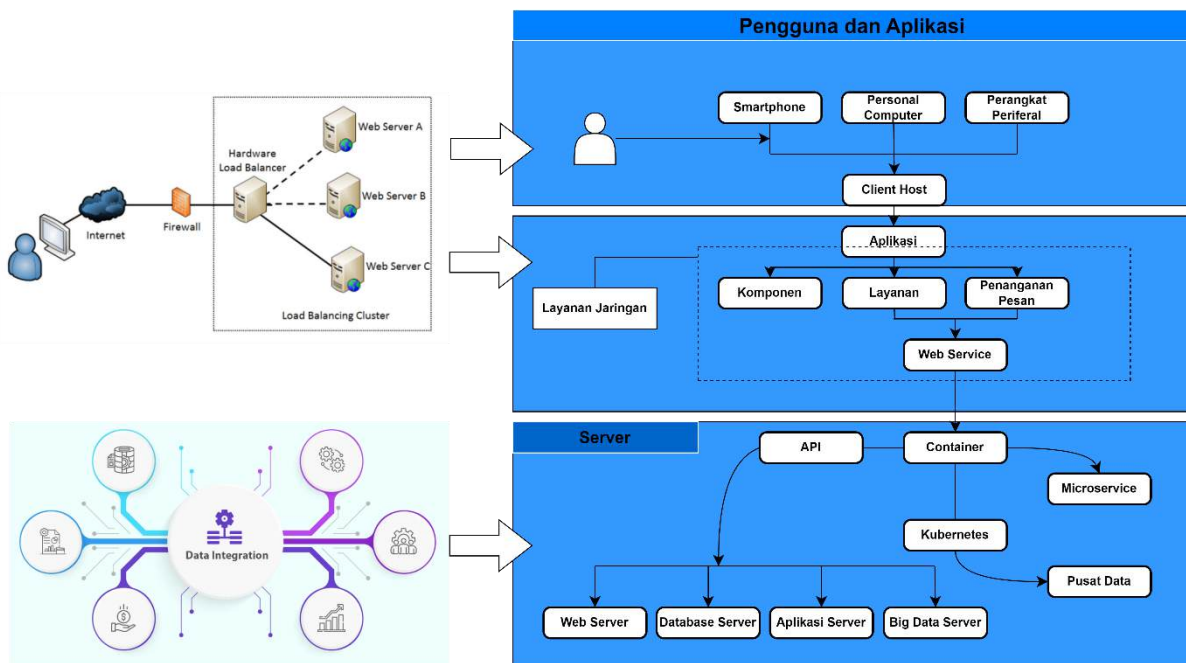
Lapisan ini adalah platform yang diusulkan untuk pembentukan infrastruktur teknologi. Lapisan ini merepresentasikan kebutuhan teknologi yang diperlukan dalam lingkungan bisnis untuk penyediaan layanan TI, yang merupakan infrastruktur penting untuk mendukung operasional layanan yang digunakan oleh organisasi. Dalam mendefinisikan kebutuhan teknologi, pertama-tama dilakukan identifikasi terhadap prinsip dan *platform* teknologi yang akan digunakan. Prinsip platform teknologi ini harus memenuhi kebutuhan seluruh organisasi secara keseluruhan. Proses dan layanan harus dapat diakses oleh semua pengguna, di mana saja, kapan saja, dan melalui berbagai media akses. Platform yang saat ini tersedia di Pemerintah Kabupaten Magelang mencakup perangkat lunak sistem operasi, *server*, dan perangkat database. Dalam memilih platform *ESB*, beberapa produk yang dapat dipertimbangkan antara lain *Apache Camel*, *WSO2 Enterprise Integrator*, *MuleSoft Anypoint Platform*, *Talend ESB*, *Red Hat Fuse*, *IBM Integration Bus* (IIB), dan *Apache ServiceMix*. Pemilihan *platform* ini harus memperhatikan kesesuaiannya dengan fungsi yang diperlukan, jaminan keberlanjutan untuk kebutuhan bisnis di masa depan, kepatuhan terhadap standar implementasi, serta dukungan internal dan dari vendor.

D. Infrastruktur Target

1. Arsitektur Teknologi Layanan

Arsitektur ini menjelaskan elemen utama dari infrastruktur teknologi layanan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Elemen-elemen ini diuraikan dalam tiga lapisan persegi panjang, yang mencakup area pengguna, area layanan aplikasi, dan area server. Elemen-elemen tersebut digambarkan dalam diagram yang mengilustrasikan bagaimana infrastruktur fisik dipetakan ke dalam kemampuan logis. Arsitektur infrastruktur teknologi layanan ini akan digunakan untuk merancang lingkungan target yang mencakup:

1. Area pengguna yang terdiri dari perangkat *peripheral* yang menjadi media akses pengguna. Dalam hal ini pengguna terhubung pada aplikasi dengan menggunakan jaringan internet, ditunjukkan dengan dengan panah ke area aplikasi.
2. Area layanan aplikasi terdiri dari komponen, layanan, penanganan pesan yang mengacu proses pada aplikasi. Pada area ini digunakan teknologi *web services*, untuk kebutuhan integrasi layanan aplikasi yang telah ada dan aplikasi yang baru. Pada prosesnya area ini membutuhkan *load balancer* untuk proses pendistribusian *traffic* layanan jaringan aplikasi ke beberapa server.
3. Area server meliputi *web server*, *database server*, aplikasi server, dan big data server. Area ini menjelaskan penerapan teknologi pusat data, yang merupakan teknologi pengelolaan data dan informasi internet yang terlihat dalam bentuk infrastruktur fisik dan platform yang digunakan. Selain itu, teknologi layanan berbagi pakai (*shared service*) yang menggunakan arsitektur *microservice* dijelaskan di sini, dimana *microservice* adalah pendekatan pengembangan aplikasi dalam unit terkecil, yang bisa berupa fungsi kompleks atau fungsi sederhana. Area ini juga mencakup elemen lingkungan integrasi data yang terhubung ke berbagai penyimpanan, termasuk *database relasional*, *OLAP database*, dan big data *database*, yang dijumpai oleh aplikasi dukungan dan analitik big data.

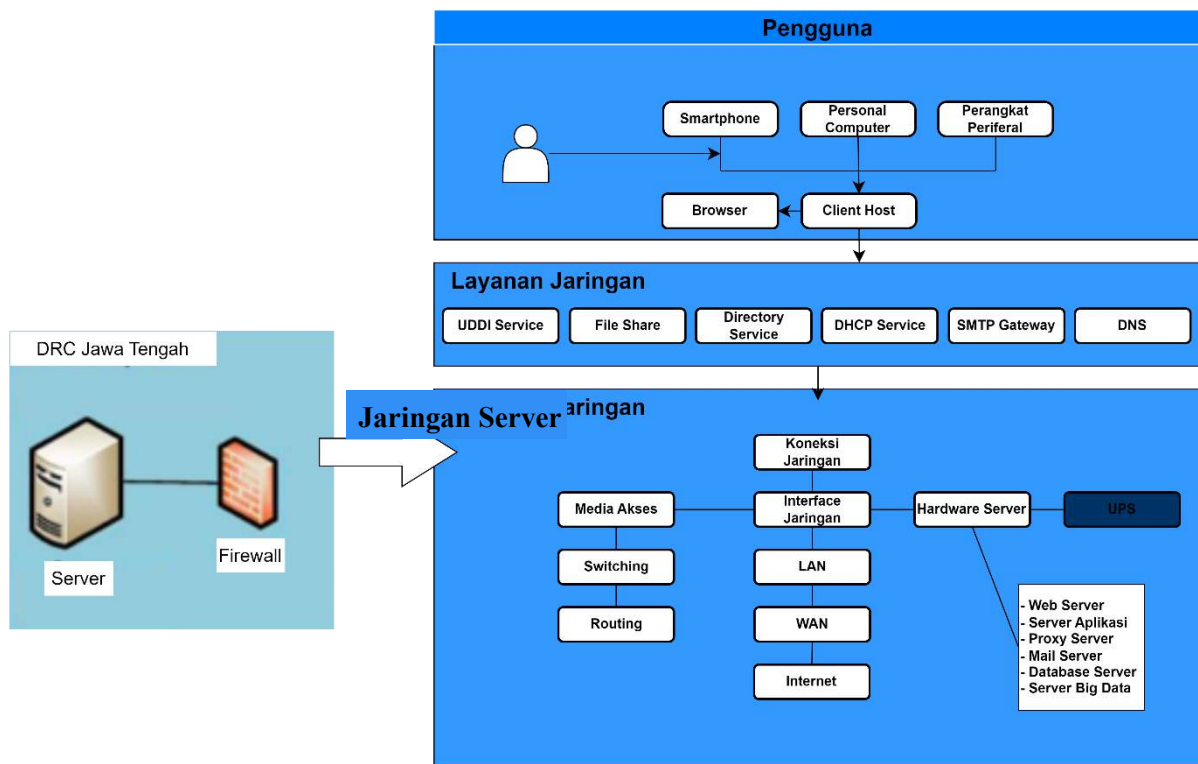


Gambar 5.6. Arsitektur Infrastruktur Teknologi Layanan Pemerintah Kabupaten Magelang

2. Arsitektur Jaringan

Konseptual arsitektur jaringan Pemerintah Kabupaten Magelang dirancang berdasarkan kebutuhan distribusi data dan aplikasi, serta hubungan berbagi data antara unit kerja organisasi, institusi lain, dan masyarakat, sambil mempertimbangkan lokasi bisnis. Arsitektur jaringan ini mencakup infrastruktur dasar seperti *Local Area Network (LAN)*, *Wide Area Network (WAN)*, dan *Internet*, yang mengkonfigurasi jaringan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan *Data Recovery Center (DRC)* di Jawa Tengah. Selain itu, arsitektur infrastruktur jaringan ini juga melibatkan teknologi dengan konsep jaringan intra pemerintah yang dikelola melalui pusat kendali jaringan, mengadopsi virtualisasi server, fasilitas komputasi, virtualisasi jaringan, dan optimalisasi penyimpanan dengan teknologi VPN (*Virtual Private Network*).

Dalam perencanaan penerapan *data warehouse*, *big data analytics*, dan *artificial intelligence*, diharapkan untuk menambah perangkat server dan jalur komunikasi berdasarkan konsep teknologi *High Performance Computing Cluster* (HPCC) untuk proses data seperti *Extract*, *Transform*, dan *Load*. Konseptual arsitektur jaringan ini mencakup sistem penghubung layanan pemerintah, operasi komputasi, masukan, keluaran, perangkat penyimpanan, dan fasilitas komunikasi, serta digunakan untuk mendukung fungsi bisnis utama di Pemerintah Kabupaten Magelang.

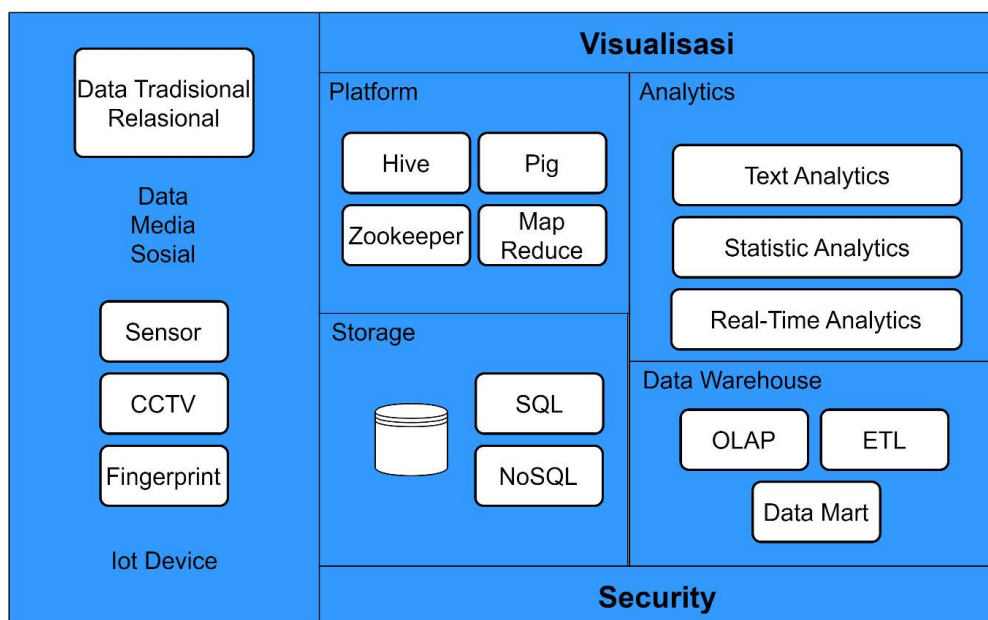


Gambar 5.7. Arsitektur Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kabupaten Magelang

3. Arsitektur Pusat Layanan Big Data

Arsitektur pusat layanan big data dirancang berdasarkan perencanaan arsitektur data lima lapis (*five-tiers*), dengan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kecepatan proses pembuatan laporan melalui integrasi menggunakan SOA. Arsitektur pusat data ini dikelola menggunakan berbagai platform data, termasuk basis data relasional tradisional (RDBMS) dan *NoSQL*. Kebutuhan akan pelaporan, analitik, integrasi, kualitas, metadata, pengembangan, dan administrasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, sehingga diharapkan dapat memberikan optimalisasi dalam hal kecepatan, skala, interoperabilitas, dan ketersediaan.

Komponen infrastruktur pusat data bergantung pada perangkat keras yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, seperti memori server, jaringan, dan penyimpanan. Komponen-komponen yang diperlukan dalam arsitektur ini harus menjadi bagian dari sistem pusat data, menggunakan kerangka kerja open source atau berlisensi untuk memanfaatkan sepenuhnya semua fitur dari berbagai komponen sistem tersebut. Arsitektur layanan *big data* terdiri dari lapisan-lapisan yang digambarkan pada Gambar 5.7 di bawah ini :



Gambar 5.8. Arsitektur layanan big data Pemerintah Kabupaten Magelang

a. Lapisan Sumber Data

Lapisan ini mengidentifikasi berbagai jenis sumber data, baik internal maupun eksternal dari Pemerintah Kabupaten Magelang, seperti data RDBMS, data media sosial, dan *data IoT*, yang perlu dianalisis. Data ini dikategorikan sebagai *big data*, yang ditandai dengan *volume*, variasi, dan kecepatan yang sangat tinggi. Karena aliran data dalam arsitektur ini sangat kompleks, diperlukan kemampuan untuk memvalidasi, membersihkan, mengubah, mengurangi, dan mengintegrasikan data.

b. Lapisan Keamanan

Lapisan ini dirancang untuk melindungi data karena keamanan data adalah prioritas utama. Mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, data dan informasi adalah area prioritas organisasi dalam pelaksanaan keamanan informasi SPBE berdasarkan standar SNI ISO/IEC 27001. Data dari media sosial dan *IoT* membutuhkan perlindungan khusus, baik untuk memenuhi persyaratan kepatuhan maupun untuk melindungi data individu.

c. Lapisan Penyimpanan

Lapisan ini didesain untuk penyimpanan dan pemrosesan data besar-besaran, yang merupakan perubahan signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola data. Penyimpanan ini menggunakan sistem file terdistribusi dengan jenis *SQL* dan *NoSQL*, dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah sangat besar (*terabyte* atau *petabyte*) melalui perangkat dengan konsep cluster.

d. Lapisan *Data Warehouse*

Lapisan ini berisi data dan informasi dari transaksi operasional maupun historis di Pemerintah Kabupaten Magelang, disimpan dalam database yang dioptimalkan untuk analisis data dan pelaporan (terutama *OLAP*). Proses migrasi data dalam lapisan ini melibatkan beberapa langkah seperti *ETL* (*Extract, Transform, dan Load*). Selain itu, konsep *data mart* diterapkan untuk mendukung pembuatan laporan dan analisis data.

e. Lapisan *Platform*

Lapisan ini menyediakan perangkat untuk memproses data menggunakan *platform cluster Hadoop* dengan konsep *MapReduce*, serta bahasa *query* untuk mengakses *database NoSQL* dengan sistem penyimpanan file terdistribusi HDFS (*Pig, Hive, Spark, Sqoop*, dll). Proses manipulasi dan pemrosesan data menggunakan kerangka kerja pemrosesan paralel. Teknologi utama pada lapisan ini berfokus pada pergerakan data dalam lingkungan komputasi terdistribusi.

f. Lapisan Visualisasi

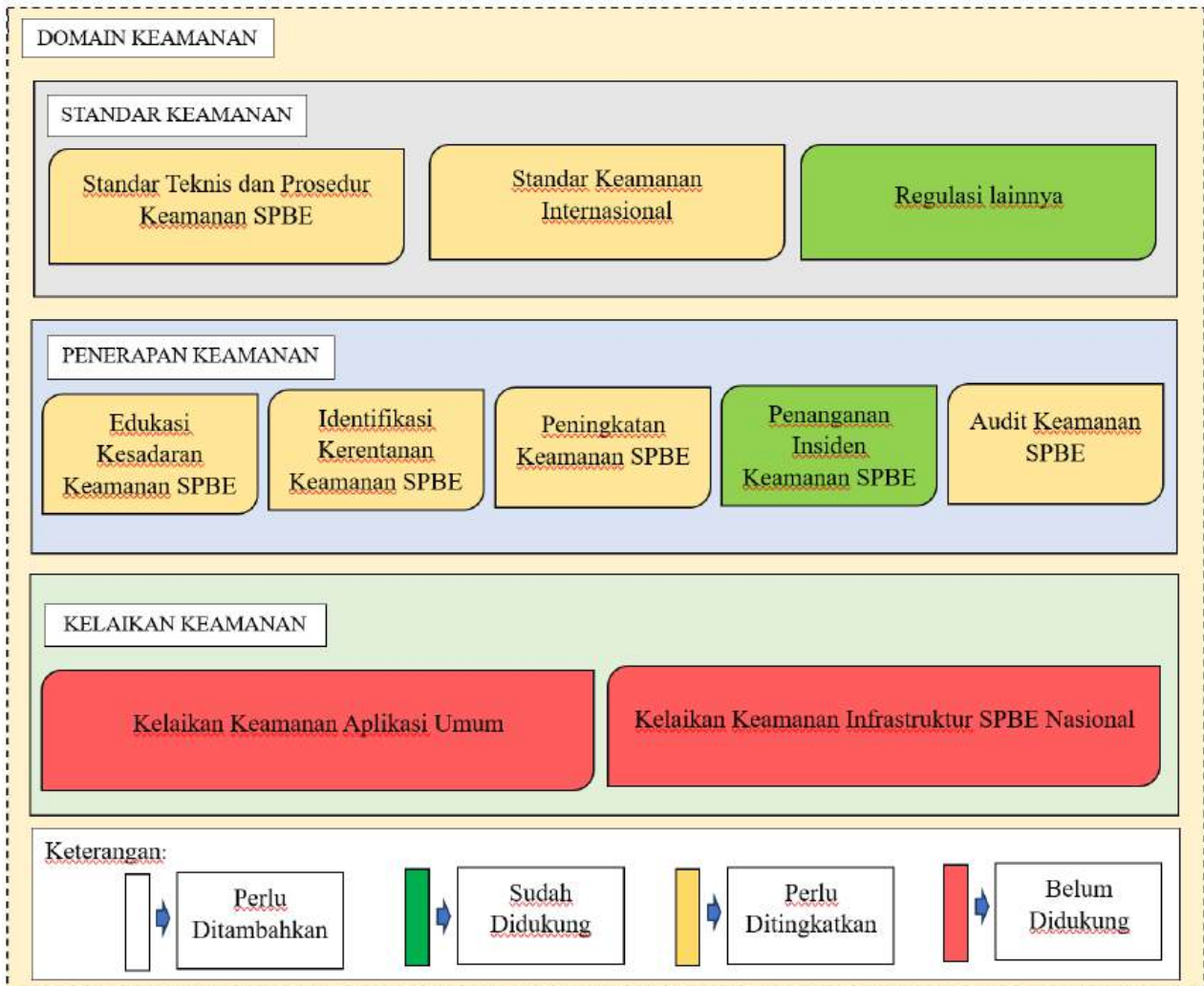
Lapisan ini juga berkaitan dengan analisis data, memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan cepat dalam memeriksa berbagai aspek data dalam mode visual. Ini memungkinkan pengguna bekerja dengan bahasa komputasi yang mudah dipahami.

BAB VI ARSITEKTUR KEAMANAN

A. PEMETAAN KEAMANAN SPBE

Pemetaan arsitektur keamanan terhadap metadata arsitektur keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari dua tingkatan. Pertama domain keamanan dengan uraian standar dan atau kebijakan keamanan, penerapan keamanan serta kelaikan keamanan. Kedua area keamanan terhadap domain arsitektur lain yaitu arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur.

Hasil pemetaan metadata arsitektur keamanan terhadap kondisi eksisting dapat dilihat pada Gambar Berikut:



Gambar 6.1 Kondisi Eksisting Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Magelang

Kondisi diatas merupakan kondisi tingkat 1 (Domain Keamanan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Warna kuning menunjukkan dokumen serta kegiatan sudah ada namun belum sepenuhnya diterapkan. Warna merah sama sekali belum ada dokumen atau belum ada kegiatan tentang domain arsitektur keamanan.

1. Standar dan atau Kebijakan Keamanan SPBE

Saat ini terdapat enam kebijakan terkait keamanan informasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dan menggunakan dua standar dan acuan utama diantaranya Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE dan dari Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Daftar kebijakan atau regulasi keamanan yang ada di lingkungan Kabupaten Magelang seperti dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1 Kebijakan/ Regulasi Keamanan

No	Kebijakan
1	Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
2	Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
3	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
4	Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/90/Kep/15/2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Insiden Response Team) Kabupaten Magelang
5	Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor 555/01.08/2023 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sertifikat/Tandatangan Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
6	Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor 555/1883/2024 Tahun 2024 tentang Himbauan Keamanan Web Defacement Judi Online Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

Tabel 6.2 Standar Keamanan

No	Standar Keamanan
1	Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE
2	Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2023 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit SPBE

2. Penerapan Keamanan

Terdapat lima kegiatan penerapan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang diantaranya:

a. Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi

Tim keamanan SPBE melakukan kegiatan edukasi kesadaran keamanan informasi menggunakan media online dan offline. Kegiatan edukasi keamanan secara online dilakukan menggunakan website CSIRT Kabupaten Magelang (MagelangKab-CSIRT) dan menggunakan media sosial. Sedangkan literasi keamanan informasi secara offline dilakukan dengan sosialisasi tentang keamanan informasi kepada ASN dan Masyarakat di lingkungan Kabupaten Magelang.

Selain itu anggota tim keamanan SPBE juga aktif dalam mengikuti kegiatan webinar dan sosialisasi terkait keamanan informasi yang diadakan oleh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kompetensi anggota tim Keamanan SPBE.

- b. Kegiatan Identifikasi kerentanan keamanan SPBE
Tim Keamanan SPBE telah melakukan kegiatan identifikasi kerentanan SPBE dengan melakukan *vulnerability assessment* dan *Penetration Testing* mandiri terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang dari tahun 2022 sampai 2024. Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Selain itu Tim Keamanan SPBE juga telah menggunakan layanan *Information Technology Security Assessment (ITSA)* dari BSSN yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.
 - c. Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE
Kegiatan peningkatan keamanan SPBE dilakukan dengan meningkatkan keamanan aplikasi yang tidak memiliki sistem keamanan yang baik, memperbaiki dan/atau merekomendasikan keamanan terhadap Aplikasi yang telah terjadi insiden, dan memperbaiki dan/atau merekomendasikan aplikasi yang teridentifikasi kerentanannya. identifikasi kerentanan yang diperoleh berasal dari *vulnerability assessment*, *penetration testing* mandiri, laporan hasil ITSA dan laporan *bug hunter* yang masuk ke Tim keamanan SPBE. Selain itu, untuk meningkatkan Keamanan SPBE di Kabupaten Magelang Tim keamanan SPBE juga memanfaatkan layanan dari BSSN berupa pemasangan *Honeypot*.
 - d. Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE
Tim keamanan SPBE melakukan penanganan insiden keamanan SPBE melalui MagelangKab-CSIRT. Tim keamanan SPBE pada Magelangkab-CSIRT memiliki tugas sebagai tim keamanan informasi. Sehingga memudahkan dalam melakukan penanganan insiden keamanan SPBE. Penanganan insiden keamanan SPBE dilakukan dengan pemantauan aplikasi dan penanganan insiden keamanan SPBE. Pemantauan keamanan informasi dilakukan menggunakan menggunakan *Google Search Console* dan *Sistem Informasi Event Management (SIEM)* yang berupa aplikasi WAZUH. Sedangkan untuk penanganan insiden tim keamanan informasi selalu berkoordinasi dengan Bidang Informatika pada Diskominfo Kabupaten Magelang.
 - e. Kegiatan Audit Keamanan SPBE
Kegiatan audit keamanan SPBE belum dilakukan secara spesifik, terencana dan berkesinambungan. Audit keamanan yang telah dilakukan berupa audit kinerja yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Magelang pada Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo Kabupaten Magelang. Audit tersebut belum menggunakan prosedur dan panduan terkait dengan audit keamanan SPBE. Namun tim keamanan SPBE telah melakukan penilaian mandiri menggunakan indeks KAMI dari BSSN sebagai penilaian terhadap keamanan informasi pada Diskominfo Kabupaten Magelang.
3. Kelaikan keamanan SPBE
- a. Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan atau Pemerintah Daerah. Tim keamanan SPBE Kabupaten Magelang belum pernah melakukan uji kelaikan aplikasi umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
 - b. Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional
Kelaikan keamanan infrastruktur tidak dilakukan penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD sehingga belum dapat dipastikan kelaikan keamanan infrastuktur SPBE Nasional. Sedangkan untuk kelaikan keamanan infrastruktur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah dilakukan penilaian menggunakan indeks KAMI dan penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) dari BSSN.

4. Pemetaan Keamanan Data dan Aplikasi

Keamanan Data dan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah menggunakan standar yang berlaku, baik standar dan peraturan nasional ataupun standar internasional. Keamanan data dan aplikasi merupakan doamain keamanan level 2 dimana keamanan data dan aplikasi mengacu kepada peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 tentang Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE penerapan keamanan data dan aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Standar Teknis Keamanan	Keterangan
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI		
1	Kerahasiaan	Diterapkan
2	Keaslian	Diterapkan
3	Keutuhan	Diterapkan
4	Kenirsangkalan	Diterapkan
5	Ketersediaan	Diterapkan
KEAMANAN APLIKASI BERBASIS WEB		
1	Authentikasi	Perlu peningkatan
2	Manajemen Sesi	Perlu peningkatan
3	Persyaratan control Akses	Diterapkan
4	Validasi Input	Diterapkan
5	Kriptografi pada verifikasi statis	Belum Diterapkan
6	Penanganan Error dan Pencatatan Log	Perlu peningkatan
7	Proteksi Data	Belum Diterapkan
8	Keamanan komunikasi	Diterakan
9	Pengendalian Kode Berbahaya	Perlu peningkatan
10	Logika Bisnis	Perlu peningkatan
11	file	Perlu peningkatan
12	Keamanan Api dan web service	Diterapkan
13	Keamanan Konfigurasi	Perlu Peningkatan
KEAMANAN APLIKASI BERBASIS MOBILE		
1	penyimpanan data dan persyaratan privasi	Perlu Peningkatan
2	kriptografi	Perlu Peningkatan
3	autentikasi dan manajemen sesi	Perlu Peningkatan
4	komunikasi jaringan	Diterapkan
5	interaksi platform	Perlu Peningkatan
6	kualitas kode dan pengaturan build	Diterapkan
7	ketahanan	Perlu Peningkatan

No	Standar Teknis Keamanan	Keterangan
KEAMANAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN		
1	keamanan interoperabilitas data dan informasi	Diterapkan
2	kontrol sistem integrasi	Diterapkan
3	kontrol perangkat integrator	Diterapkan
4	keamanan API dan web service	Perlu Peningkatan
5	keamanan migrasi data	Perlu Peningkatan
KEAMANAN JARINGAN INTRA		
1	Aspek administrasi keamanan Jaringan Intra	Diterapkan
2	Kontrol akses dan autentikasi	Perlu Peningkatan
3	Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra	Perlu Peningkatan
4	Kontrol keamanan gateway	Perlu Peningkatan
5	Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	Perlu Peningkatan
6	Kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel	Diterapkan
KEAMANAN PUSAT DATA		
1	Persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data	Diterapkan
2	Persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data	Diterapkan

5. Pemetaan Perangkat Keamanan

Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerapkan sebagian perangkat keamanan dalam menjalankan SPBE. Perangkat keamanan tersebut digunakan dalam penerapan keamanan yang meliputi identifikasi kerentanan, peningkatan keamanan SPBE dan penanganan insiden keamanan SPBE. Perangkat keamanan yang terdapat pada Diskominfo Kabupaten Magelang belum seluruhnya terpenuhi dan baru diterapkan Sebagian. Berikut perangkat keamanan yang digunakan pada Diskominfo selaku Koordinator SPBE pada Kabupaten Magelang:

No	Perangkat Keamanan	Keterangan
Perangkat Peningkatan Keamanan SPBE		
1	FORTINET 200F	FIREWALL
2	MOD SECURITY	WAF
3	IMUNIFY 360	FIREWALL, WAF, IDS, IPS, ANTIVIRUS, PROACTIVE DEFENSE
4	HONEY POT	Perangkat Lunak
5	SECTIGO SSL/TLS	SSL/TLS
Perangkat Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE		

No	Perangkat Keamanan	Keterangan
1	TENABLE NESSUS	Perangkat Lunak
2	BURPSUITE	Perangkat Lunak
3	NMAP	Perangkat Lunak
4	SQLMAP	Perangkat Lunak
5	OWASP ZAP	Perangkat Lunak
6	WP Scan	Perangkat Lunak
7	KALI LINUX	Sistem Operasi Khusus
Perangkat Penanganan Insiden SPBE		
1	Wazuh	SIEM
2	Sandbox	Perangkat Lunak
3	Google Console	Perangkat Lunak
4	OS Ticketing	Perangkat Lunak
5	Write Blocker	Perangkat Keras
6	Autopsy	Perangkat Lunak

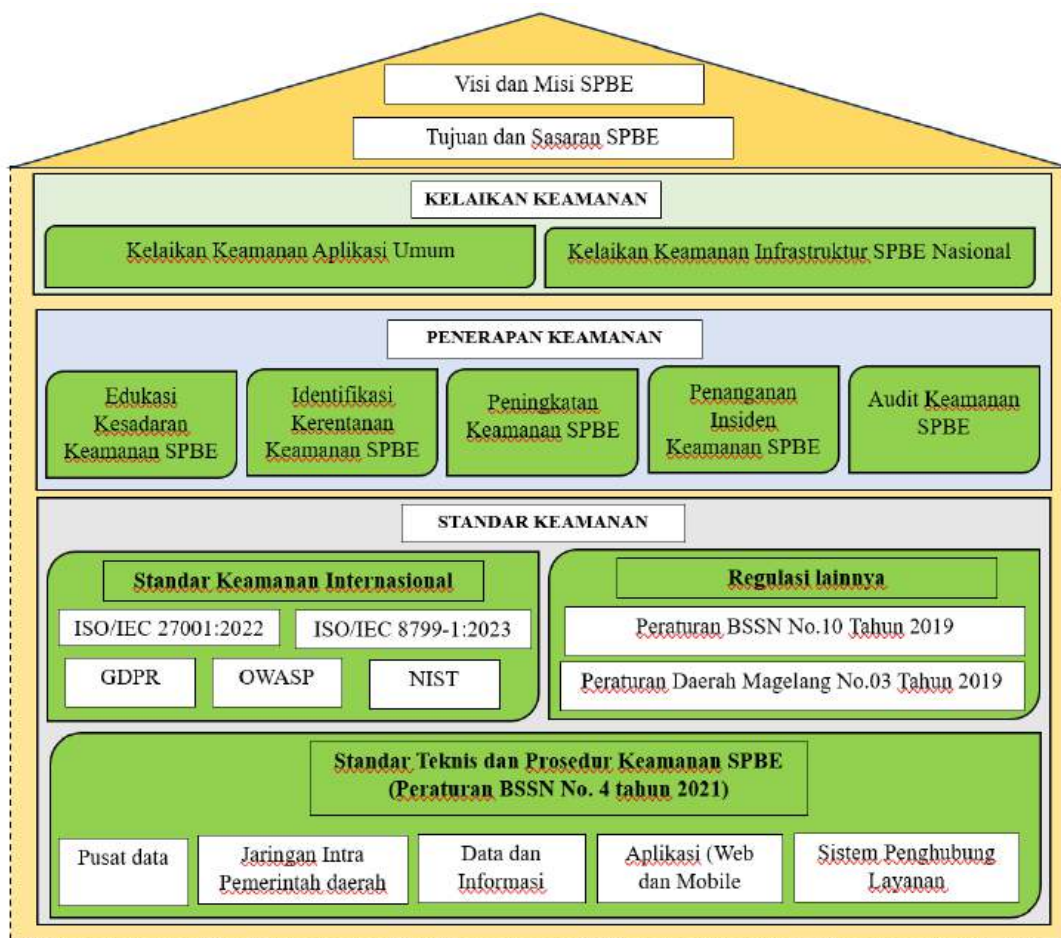
B. ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam usaha organisasi untuk melindungi aset-aset penting yang dimilikinya. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan tata letak kontrol-kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI organisasi. Arsitektur keamanan bisa berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ia bergantung pada subsistem, produk dan aplikasi-aplikasi yang dikelola/digunakannya. Perbedaan kondisi tersebut pada gilirannya akan menyebabkan perbedaan pendekatan dalam menerapkan pertahanan mendalam (*defense in depth*).

Arsitektur keamanan mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks. Setiap komponen pada arsitektur tersebut juga mengandung risiko keamanan. Mengingat kondisi yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, maka analisis dan desain arsitekturnya mesti mempertimbangkan variabel dan risiko spesifik yang mungkin terjadi pada masing-masing organisasi.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Arsitektur Keamanan Informasi SPBE bertujuan untuk mendukung Tujuan & Sasaran serta Visi & Misi SPBE Pemerintah Kabupaten Mgelang. Komponen arsitektur keamanan terdiri dari Standar Keamanan, Penerapan Keamanan, dan Kelaikan Keamanan. Setiap komponen terdiri dari beberapa referensi.



Gambar Arsitektur Keamanan SPBE

1. Standar Teknis dan Prosedur

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh IPPD masing-masing. Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Saat ini telah terbit Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dimana didalamnya memuat:

a. Keamanan Data dan Informasi

Standar teknis keamanan data dan informasi meliputi aspek:

- 1) Kerahasiaan (*Confidentiality*);
- 2) Keaslian (*Authentication*);
- 3) Keutuhan (*Integrity*);
- 4) Kenirsangkalan (*Non-Repudiation*); dan
- 5) Ketersediaan (*Availability*).

Berikut ini adalah rincian beberapa prosedur untuk memenuhi aspek - aspek standar teknis.

1) Kerahasiaan dengan menerapkan:

- Klasifikasi informasi
- Enkripsi dengan sistem kriptografi
- Kontrol Akses atau pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penerapan klasifikasi informasi dapat mengacu pada Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Klasifikasi Informasi	Penjelasan
SANGAT RAHASIA	Jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa
RAHASIA	Jika diketahui oleh tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
TERBATAS	Jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan.
PUBLIK	Jika dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Standar Kriptografi untuk Enkripsi

Date	Minimum of Strength	Symmetric Algorithms	Factoring Modulus	Discrete Logarithm Key	Discrete Logarithm Group	Elliptic Curve	Hash (A)	Hash (B)
(Legacy)	80	2TDEA*	1024	160	1024	160	SHA-1**	
2016 - 2030	112	3TDEA	2048	224	2048	224	SHA-224 SHA-512/224 SHA3-224	
2016 - 2030 & beyond	128	AES-128	3072	256	3072	256	SHA-256 SHA-512/256 SHA3-256	SHA-1
2016 - 2030 & beyond	192	AES-192	7680	384	7680	384	SHA-384 SHA3-384	SHA-224 SHA-512/224 SHA-256
2016 - 2030 & beyond	256	AES-256	15360	512	15360	512	SHA-512 SHA3-512	SHA-512/256 SHA-384 SHA-512 SHA3-512

- 2) Keaslian dengan menerapkan:
 - Mekanisme verifikasi;
 - Mekanisme validasi; dan
 - Menerapkan sistem *hash function*.
- 3) Keutuhan dengan menerapkan:
 - Penerapan pendeteksian modifikasi
 - Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi
- 4) Kenirsangkalan dengan menerapkan:
 - Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
 - Penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.
- 5) Ketersediaan dengan menerapkan:
 - Penerapan sistem pencadangan secara berkala;
 - Pembuatan perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; dan
 - Penerapan sistem pemulihan.

b. Keamanan Aplikasi SPBE

Keamanan Aplikasi SPBE meliputi keamanan pada:

- 1) Aplikasi berbasis web, yaitu dalam Aplikasi SPBE berbasis web harus memiliki fungsi autentikasi, manajemen sesi, persyaratan kontrol akses, validasi input, kriptografi pada verifikasi statis, penanganan error dan pencatatan log, proteksi data, keamanan komunikasi,

pengendalian kode berbahaya, logika bisnis, file, keamanan API dan web service, dan keamanan konfigurasi.

- 2) Aplikasi berbasis *mobile*, yaitu pada aplikasi SPBE berbasis mobile harus terpenuhi fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi, kriptografi, autentikasi dan manajemen sesi, komunikasi jaringan, interaksi platform, kualitas kode dan pengaturan build dan ketahanan.
- 3) Keamanan Server (*application layer*), yaitu berfungsi sebagai keamanan pada lapisan aplikasi dalam hal ini penjaminan terhadap isi atau data permintaan dari *client* benar-benar data yang benar, bukan berisi virus, trojan atau ancaman lainnya.

c. Sistem Penghubung Layanan

Keamanan pada system penghubung layanan meliputi adanya keamanan interoperabilitas data dan informasi, kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan *web service*, dan keamanan migrasi data.

d. Jaringan Intra Pemerintah

Keamanan jaringan Intra yaitu terpenuhinya aspek-aspek administrasi keamanan Jaringan Intra, kontrol akses dan autentikasi, persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra, kontrol keamanan gateway, kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel, dan kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.

e. Pusat Data Nasional

Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/ atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan pada Perpres Nomor 95 tahun 2018, maka Pusat Data nasional harus:

- 1) memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data yaitu SNI ISO/IEC 8799-1:2023;
- 2) menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

2. Manajemen Keamanan Informasi SPBE

Dasar hukum dari Manajemen Keamanan Informasi SPBE yakni:

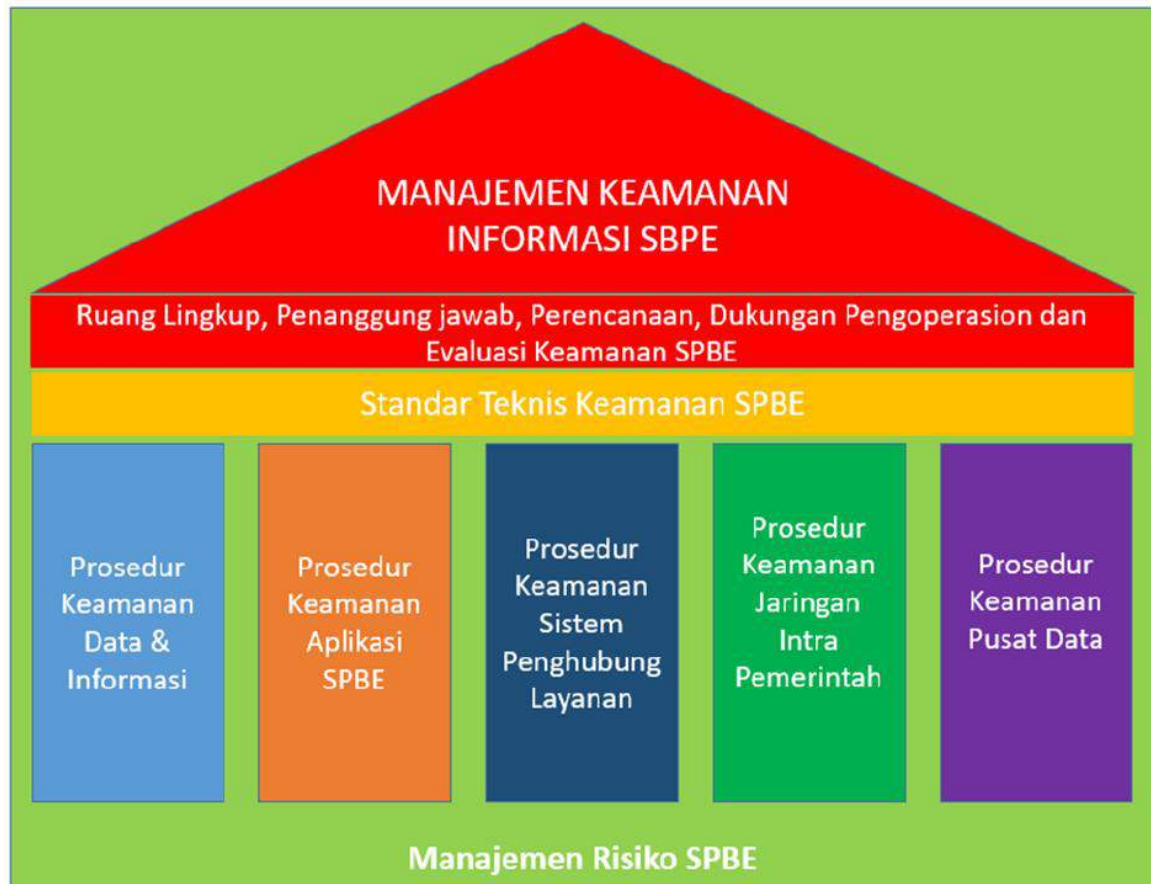
- a. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE dan Standar Teknis & Prosedur Keamanan SPBE;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Seuai dengan Perpres Nomor 95 tahun 2018 disebutkan bahwa Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Selanjutnya, di dalam Perban BSSN Nomor 4 tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa Pedoman Manajemen Keamanan Informasi merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,

dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE.

a. Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE

Selain pedoman manajemen terdapat juga standar teknis dan prosedur keamanan sebagai acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE. Penyusunan pedoman manajemen dan keamanan informasi berbasis risiko yang artinya melibatkan proses asesmen, identifikasi, dan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi di SPBE yang dapat digambarkan sebagai pilar seperti di bawah ini.



Gambar Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE

Dalam manajemen Keamanan Informasi SPBE meliputi:

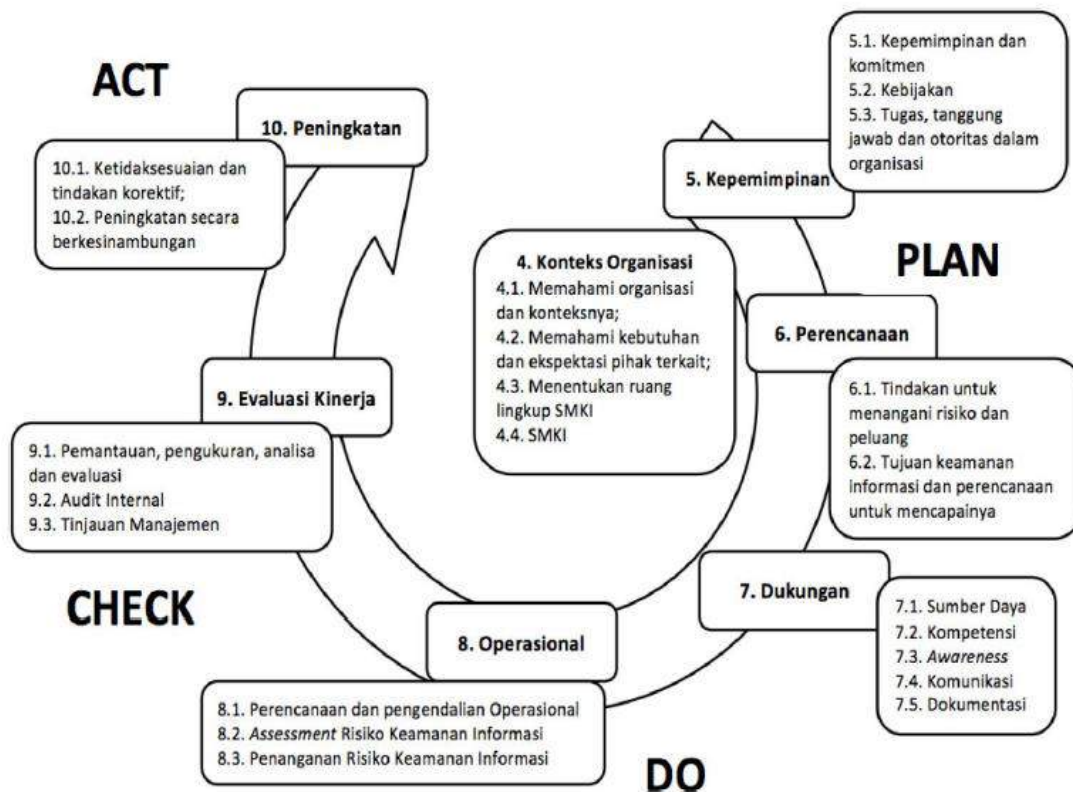
- 1) Penetapan Ruang Lingkup
- 2) Penetapan tanggung jawab
- 3) Perencanaan
- 4) Dukungan pengoperasian
- 5) Evaluasi kinerja
- 6) Perbaikan berkelanjutan

b. Standar Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001:2022

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau dikenal juga dengan sebutan *Information Security Management System* (ISMS) adalah suatu bentuk susunan proses yang dibuat berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk merencanakan (*plan*) mengimplementasikan dan mengoperasikan (*do*) memonitoring dan meninjau (*check*) serta memelihara dan meningkatkan atau mengembangkan (*act*) terhadap keamanan informasi. Standar internasional SNI ISO/IEC 27001:2022 berguna untuk menentukan, menerapkan, mengoperasikan, meninjau, memelihara, mengawasi, dan meningkatkan kebijakan dan dokumen dari SMKI berdasarkan kebutuhan organisasi.

<i>Plan</i> (Penetapan SMKI)	Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan.
<i>Do</i> (Penerapan dan Pengoperasian SMKI)	Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan.
<i>Check</i> (Pemantauan dan Pengkajian SMKI)	Mengakses dan apabila berlaku mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran SMKI dan pengalaman praktis dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk pengkajian.
<i>Act</i> (Peningkatan dan Pemeliharaan SMKI)	Mengambil tindakan korektif dan pencegahan berdasarkan hasil internal audit SMKI dan tinjauan manajemen atau informasi terkait lainnya, untuk mencapai perbaikan berkesinambungan dalam SMKI.

SMKI berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2012 merupakan pendekatan proses “Plan-Do-Check- Act” seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar Plan-Do-Check-Act (PDCA)

SNI ISO 27001:2022 mencakup beberapa ketentuan terkait *privacy* dan keamanan siber. Standar tersebut mengharuskan organisasi untuk menerapkan kontrol yang melindungi aset informasi dari ancaman siber dan untuk menetapkan proses yang mengelola risiko keamanan siber. Selain itu, SNI ISO/IEC 27001:2022 menekankan pentingnya penetapan kebijakan keamanan informasi yang mencakup tanggung jawab, kepemimpinan, dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Secara lebih rinci, SNI ISO/IEC 27001:2022 mengharuskan manajemen untuk:

1. mengkaji risiko keamanan informasi organisasi, mempertimbangkan ancaman, kerentanan, dan dampak secara sistematis;
 2. merancang dan mengimplementasikan rangkaian kontrol keamanan informasi yang koheren dan komprehensif dan/atau bentuk lain dari penanganan risiko (seperti menghindari risiko atau mentransfer risiko) untuk mengatasi risiko-risiko yang dianggap tidak dapat diterima; dan
 3. mengadopsi proses manajemen menyeluruh untuk memastikan bahwa kontrol keamanan informasi dapat terus memenuhi kebutuhan keamanan informasi organisasi secara berkelanjutan.
- c. Aktivitas Keamanan Informasi

Dalam menjalankan keamanan SPBE, Diskominfo dapat menerapkan keamanan SPBE yang mengacu pada Kerangka Kerja Keamanan Informasi sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara rinci Kerangka Kerja Keamanan Siber hal ini sesuai dengan *Cyber Security Framework* yang dipublikasikan oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST). Pada kerangka kerja tersebut terdapat 5 (lima) aktivitas yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi dalam menghadapi serangan siber yakni identifikasi (*identity*), proteksi (*protect*), deteksi (*detect*), respon (*respond*), dan pemulihan (*recover*). Masing – masing aktivitas tersebut memiliki tujuan dan manfaat serta kegiatan atau inisiatif yang berbeda – beda, sesuai dengan fungsinya.

1. Identifikasi (*Identify*)

Pada tahap ini Diskominfo perlu mengidentifikasi sistem, data, aset informasi, dan kemampuan yang harus dilindungi sesuai dengan tingkat kritikalitas dan prioritas yang ditentukan. Kegiatan dalam tahap identifikasi antara lain:

- a) Manajemen Aset;
- b) Lingkungan Bisnis;
- c) Tata Kelola;
- d) Penilaian Risiko; dan
- e) Strategi Manajemen Risiko.

2. Proteksi (*Protect*)

Pada tahap ini Diskominfo perlu melakukan tindakan mengembangkan dan menerapkan perlindungan terhadap seluruh aset informasi sesuai dengan kategori keamanan data yang telah ditentukan. Kegiatan dalam tahap proteksi antara lain:

- a) Akses Kontrol;
- b) Pemahaman dan Pelatihan;
- c) Keamanan Data;
- d) Proses dan Prosedur Proteksi Informasi; dan
- e) Pemeliharaan.

3. Deteksi (*Detect*)

Pada tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi terjadinya serangan siber. Kegiatan dalam tahap deteksi antara lain:

- a) Anomali dan kejadian;
- b) Pemantauan Keamanan Berkelanjutan; dan
- c) Proses Deteksi.

4. Respon (*Respond*)

Pada tahap ini Diskominfo diharapkan dapat melakukan tindak lanjut terhadap insiden keamanan yang terdeteksi atau terjadi. Kegiatan dalam tahap respon antara lain:

- a) Rencana Respon;
- b) Komunikasi;
- c) Analisis;
- d) Mitigasi; dan
- e) Improvisasi.

5. Pemulihan (*Recover*)

Pada tahap ini Diskominfo diharapkan dapat memperbaiki atau memulihkan kemampuan, layanan, dan kondisi bisnis kembali seperti sedia kala yang mengalami gangguan keamanan/siber. Kegiatan dalam tahap pemulihan antara lain:

- a) Rencana Pemulihan;
- b) Improvisasi; dan
- c) Komunikasi.

Aktivitas dan kegiatan dari identifikasi sampai dengan pemulihan dapat dilaksanakan oleh *Security Operation Center* (SOC). Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, SOC berpedoman pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Untuk selanjutnya SOC bisa bekerja sama dengan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang dibentuk bekerja sama dengan BSSN. CSIRT adalah tim yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber, pada suatu wilayah (*constituency*) yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Tim CSIRT akan bertanggung jawab penuh untuk memonitor dan mengelola berbagai isu-isu terkait dengan keamanan internet untuk menjaga aset informasi dan komunikasi dari seluruh unit-unit aktivitas organisasi.

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

